



**POLITIK KEKUASAAN VLADIMIR PUTIN
DI RUSIA TAHUN 2003-2007**

TESIS

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Politik pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik


RIZKI ANDONO PRAKOSO

NPM: 1006745442

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rizki Andono Prakoso
NPM : 1006745442
Tanda Tangan : 
Tanggal : 22 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rizki Andono Prakoso
NPM : 1006745442
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Politik
Judul Tesis : Politik Kekuasaan Vladimir Putin di Rusia tahun
2003-2007

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada Program Studi S2 Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Valina Singka Subekti

Sekretaris Sidang : Syaiful Bahri, S.Sos, M.Si

Pembimbing : Dra Fadjari Iriani S, M.Si

Penguji Ahli : Dr. Isbodroini Suyanto, MA

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 12 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Magister Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dra Fadjari Iriani Sophiaan Yudoyoko M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini
- (2) Dr. Valina Singka Subekti sebagai Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- (3) Dr. Isbodroini Suyanto selaku penguji ahli yang telah memberikan saran dan kritik bagi tesis ini.
- (4) Orang Tua Penulis Bapak Angger Waspodo dan Ibu Rr. Elista Soekmawardhani, yang membantu penulis dan terus memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.
- (5) Adik-adik Penulis Rizka Andini Pratiwi dan Putri Anggraeni Kusumawardhani serta Eyang Putri R.A. Noerzakia yang terus mendukung penulis.
- (6) Dosen-Dosen yang turut membantu penulisan tesis ini Syaiful Bahri, S.Sos, M.Si; Nurul Nurhandjati, S.IP, M.Si; dra. Nuri Soeseno, MA; dan Rosa Evaquarta, Ph.D.
- (7) Staf Sekretariat Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia yang membantu penulis menyelesaikan tesis ini, Ibu Romlah, Ibu Sri Herawati, Ibu Retno Amriyanti, Mas Andri Priyatna, Bapak Biwoso, Bapak Kadianto, dan Mas Yanto.
- (8) Ibu Meutya Viada Hafid yang telah memberikan izin serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

- (9) Sahabat-sahabat Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia khususnya kepada Ilmu Politik Angkatan 2010; Kadek Dwita Apriani, Esty Ekawati, Rekho Adriadi, Sarifah Girsang, Eko Sri Raharjo, Ridho Imawan Hanafi, Lukman Hasriansyah, Mina Apratima Nour, Teguh Iman Pradana, Mouddy JDE Johasan, La Husen Zuhada, Bambang Hermansyah, Adi Prayitno, Guntur Sitompul, Agung Suprio, yang membantu dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan tesisnya.
- (10) Teman-teman Penulis yang selalu memberikan bantuan moril dalam penulisan tesis ini: Ika Sri Hartantiningsih, Fahnia Chairawaty, Mia Novitasari, Deta Andina, Muhammad Faatihul Haaq, Rusdian Hafiz, Ifda Hanum, Maemunah Lubis, R. Wahyuningrat, Muhammad Ibnu Sina, Diah Setiawaty, Nanda Fajar Aditya, Teuku Andhika Mulya, Siti Chaerani Dewanti, Monica Dian Adelina, Tiwi Asfianty.
- (11) Pihak-pihak yang turut membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 22 Juni 2012



Rizki Andono Prakoso

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Andono Prakoso
NPM : 1006745442
Program Studi : S2 Pascasarjana Ilmu Politik
Departemen : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya saya yang berjudul : “Politik Kekuasaan Vladimir Putin di Rusia tahun 2003-2007” beserta perangkat yang ada jika diperlukan.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan



(Rizki Andono Prakoso)

ABSTRAK

Nama : Rizki Andono Prakoso
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Judul : Politik Kekuasaan Vladimir Putin di Rusia
tahun 2003-2007

Tesis ini membahas mengenai politik kekuasaan Presiden Vladimir Putin di Rusia dalam mengelola pemerintahannya pada periode tahun 2003-2007. Transisi demokrasi telah membawa perubahan di Rusia semenjak tahun 1991. Transisi ini diharapkan akan membawa negara ini menuju ke sistem demokrasi yang lebih dalam (*deepening democracy*). Namun, ketika Vladimir Putin menjabat sebagai presiden, terjadi pembalikan ke arah otoritarian. Dengan strategi politik *managed democracy*, Putin berusaha untuk memenangkan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Strategi pertama Vladimir Putin adalah memanfaatkan aparatur negara dan birokrasi, memanfaatkan media, dan juga mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Pemanfaatan aparatur negara atau birokrasi dimulai ketika dilakukan reformasi institusi daerah melalui perubahan undang-undang pemilihan Gubernur di Rusia. Gubernur atau kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat tetapi ditunjuk oleh presiden. Hasilnya 80% kepala daerah di Rusia menjadi anggota Partai United Russia pada tahun 2007. Selain itu, patrimonial di birokrasi semakin menguat seiring dengan penguatan kembali kekuasaan Presiden. Dengan menggunakan sistem daftar kader cadangan, Putin mengembalikan sistem Soviet Nomenklatura untuk mengontrol birokrasi. Strategi kedua yang dilakukan oleh Vladimir Putin adalah dengan memanfaatkan media-media nasional terutama media elektronik seperti televisi. Diawali dengan pengambilalihan stasiun televisi oleh negara hingga pemanfaatan stasiun televisi untuk kampanye partai United Russia. Hasilnya pemberitaan mengenai Partai United Russia pada kampanye Pemilihan Duma lebih besar dibandingkan partai lain. Strategi ketiga adalah dengan mengubah undang-undang sistem pemilihan umum dan partai politik. Terdapat beberapa syarat minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk bisa bertahan, namun syarat tersebut sulit dipenuhi oleh partai kecil. Selain itu, perubahan sistem pemilihan umum juga berdampak pada sulitnya partai-partai kecil untuk mendudukan wakilnya di parlemen. Untuk menjelaskan mengenai strategi Putin, digunakan beberapa teori, teori transisi demokrasi oleh Juan J. Linz dan Alfred Stephan, teori klasifikasi pemerintahan oleh Alan Ball dan Guy B. Peter. Selain itu dalam menganalisa strategi Putin digunakan teori Strategi Politik oleh Hanspeter Kriesi, teori *managed democracy* dari McFaul serta teori partai politik oleh Alan Ware. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu kajian literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku, jurnal, dan media internet.

Kata Kunci: Transisi Demokrasi, Strategi Politik, *Managed Democracy*, Otoritarian, Partai Politik, Rusia.

ABSTRACT

Name : Rizki Andono Prakoso
Study Program: Graduate School of Political Science, Universitas Indonesia
Title : Power Politics of Vladimir Putin in Russia in 2003-2007

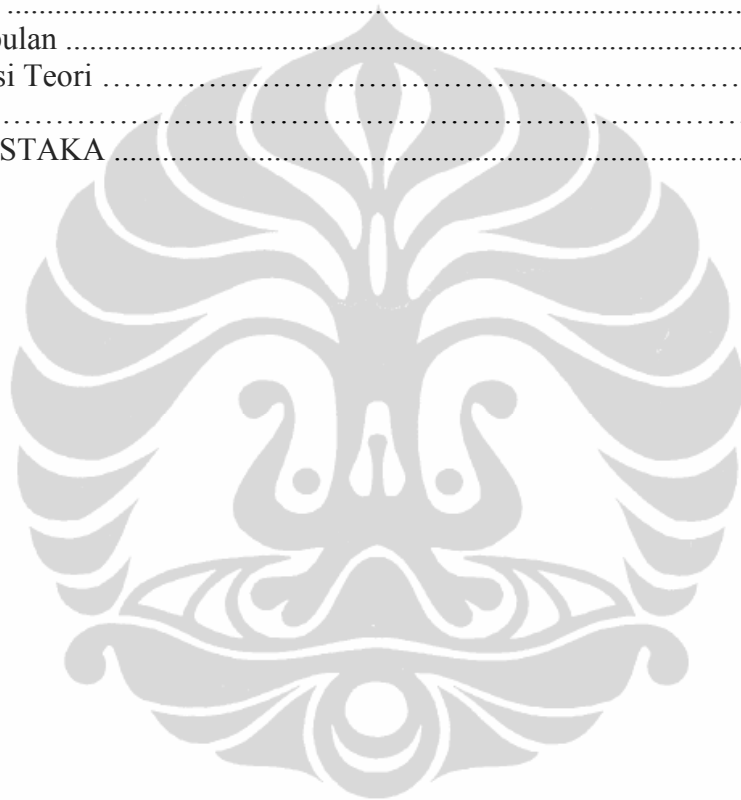
This thesis discusses the politics of President Vladimir Putin in Russia in managing the government period 2003-2007. Transition to democracy has brought changes in Russia since 1991. This transition is expected to bring the country towards a more democratic system to the deepening of democracy. However, when Vladimir Putin was president, there was a reversion to authoritarian direction. With the political strategy of *managed democracy*, Putin sought to win the United Russia Party in the Duma election in 2003 and 2007. Vladimir Putin's first strategy is to utilize the state apparatus and bureaucracy, utilizing the media, and also to change the law system of elections and political parties. Utilization of the state apparatus or bureaucracy began through a change in the institutional reform of the electoral law in the Russian governor. Governor or the head of the region are no longer elected by the people but appointed by the president. The result is 80% of the regional head of Russia became a member of United Russia Party in 2007. In addition, the patrimonial bureaucracy is getting stronger as the reinforcement of the power of the President. By using a list of the cadre system, Putin restore Nomenklatura Soviet system to control the bureaucracy. The second strategy is conducted by Vladimir Putin is to utilize the national media, especially electronic media like television. With the beginning of takeover by the state television station, Putin use the television station for United Russia party's campaign. The result is the election campaign of United Russia bigger than the other party. The third strategy is to change the law of election system and political parties. There are some minimum requirements that must be met by political parties in order to survive, but conditions were difficult to be met by a small party. In addition, there are some changes in the electoral system also leads to the difficulties of smaller parties to put their representatives in parliament. To explain the political strategy of Putin, the writer use some theory, they are: the theory of democratic transition by Juan J. Linz and Alfred Stephan, classification of government by Alan Ball and Guy B. Peter. In addition, in analyzing the strategy of Putin, the writer use the theory of political strategy by Hanspeter Kriesi, McFaul's theory of managed democracy and political party theory by Alan Ware. The research method is using a qualitative method and method of data collection by gathering information from various books, journals, and internet media.

Keywords: Transition to Democracy, Political Strategy, *Managed Democracy*, Authoritarian, Political Party, Russia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	7
1.3. Kerangka Teori	9
1.3.1. Strategi Politik	9
1.3.2. Klasifikasi Pemerintahan	11
1.3.3. Transisi Demokrasi	14
1.3.4. <i>Managed Democracy</i>	17
1.3.5. Partai Politik	19
1.4. Kerangka Alur Berfikir	22
1.5. Asumsi	23
1.6. Signifikansi Penelitian	23
1.7. Tujuan Penelitian	23
1.7. Metode Penelitian	24
1.8. Sistematika Penulisan	25
2. TRANSISI DEMOKRASI DI RUSIA (1991-2008)	29
2.1. Uni Soviet pada Masa Pemerintahan Mikhail Gorbachev	29
2.2. Demokrasi Liberal Pada Masa Boris Yeltsin	34
2.3. Partai United Russia	38
2.3.1. Pendirian Partai Unity dan Pemilihan Duma Tahun 1999	38
2.3.2. Terbentuknya Partai United Russia	51
2.4. Transisi Demokrasi di Rusia pada Masa Pemerintahan Vladimir Putin	55
3. REFORMASI INSTITUSI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMANFAATAN BIROKRASI	62
3.1. Reformasi Institusi Pemerintahan Daerah oleh Vladimir Putin	45
3.2. Neo-Patrimonialisme Birokrasi pada Pemerintahan Vladimir Putin	70
4. PEMBATASAN MEDIA DAN PEMANFAATAN MEDIA UNTUK PARTAI UNITED RUSSIA	84
4.1. Tahapan Transformasi Media di Rusia	84
4.2. Media Massa pada masa Pemerintahan Vladimir Putin	90
4.3. Media dan Pemilihan Umum	95

5. PERUBAHAN UU SISTEM PEMILIHAN UMUM DAN ATURAN PEMILU	105
5.1. Perubahan Undang-Undang Sistem Pemilihan Umum	105
5.2. Perubahan Aturan Partai Politik	112
6. DOMINASI PARTAI UNITED RUSSIA PADA PEMILIHAN DUMA TAHUN 2003 - 2007	119
6.1. Penerapan Strategi Politik Vladimir Putin pada Pemilihan Duma tahun 2003 - 2007	119
6.2. Implikasi Strategi Politik Vladimir Putin dan Dominasi Partai United Russia terhadap Transisi Demokrasi di Rusia	136
7. PENUTUP	150
7.1. Kesimpulan	150
7.2 Implikasi Teori	154
8. Epilog	157
DAFTAR PUSTAKA	158



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Strategi Politik	10
Gambar 1.2 Tahapan Transisi Demokrasi	14
Gambar 2.1 Perbandingan <i>Gross Domestic Product</i> antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat 1960-1985	29
Gambar 3.1 Persentase Jumlah Kepala Daerah Anggota Partai United Russia tahun 2005-2010.....	68
Gambar 4.1. Kepemilikan Media di Rusia Masa Pemerintahan Vladimir Putin	81



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Hasil Pemilihan Duma tahun 1995	3
Tabel 1.2 Tabel Hasil Pemilihan Duma tahun 1999	5
Tabel 4.1 Tabel Kepemilikan Media Massa di Rusia Pada Masa Masa Pemerintahan Vladimir Putin	87
Tabel 4.2 Tabel Persentase Pemberitaan Televisi Mengenai Subjek Politik dalam Program Berita TV Rusia pada Pemilihan Duma tahun 2003.....	101
Tabel 4.3 Tabel Persentase Pemberitaan Media Cetak Mengenai Subjek Politik pada Pemilihan Duma tahun 2003 ...	102
Tabel 5.1 Tabel Perubahan Sistem Pemilihan Umum Dan Aturan Partai Politik 1993-2005	124
Tabel 6.1 Tabel Hasil Pemilihan Duma tahun 2003	127
Tabel 6.2 Tabel Hasil Pemilihan Duma tahun 2007	128



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena penting dari gelombang demokratisasi ketiga adalah runtuhnya rezim totalitarian Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur. Kehancuran ekonomi melanda negara-negara komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet. Kegagalan pemerintah komunis dalam mensejahterakan masyarakat serta terjadinya korupsi membuat masyarakat tidak puas dengan pemerintahan yang ada. Kegagalan juga terjadi ketika Presiden Mikhail Gorbachev membuat suatu kebijakan keterbukaan, liberalisasi terbatas di Soviet. Namun, hal tersebut justru membawa negara tersebut ke jurang perpecahan.¹

Ketika pemerintah Uni Soviet dibawah Mikhail Gorbachev tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya maka legitimasi pemerintahannya jatuh. Adanya desakan dari kelompok progresif dibawah Boris Yeltsin untuk demokrasi di Rusia semakin mempercepat runtuhnya Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur ditandai dengan pengumuman secara resmi pada tahun 1991. Uni Soviet terpecah dalam beberapa negara dan Eropa Timur mulai melaksanakan suatu transisi demokrasi. Negara-negara pecahan Uni Soviet, terutama Rusia, dibawah pimpinan Boris Yeltsin mengadakan liberalisasi besar-besaran di negara ini semisal swastanisasi perusahaan-perusahaan milik negara, kebebasan berbicara dan berpendapat, dibentuknya *Duma* (majelis rendah Rusia), dan juga kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik.

Boris Yeltsin sebagai presiden pertama Federasi Rusia melakukan reformasi reformasi politik dan ekonomi untuk dapat merubah pemerintahannya ke arah demokratisasi. Reformasi politik yang dilakukan oleh Yeltsin adalah memberikan hak-hak politik bagi masyarakat dalam Pemilihan *Duma* dan Pemilihan Presiden, perlindungan terhadap hak-hak sipil, dan kebebasan media. Reformasi yang dilakukan di bidang ekonomi adalah melakukan liberalisasi ekonomi. Salah satu metode yang diterapkan adalah model terapi kejut, yaitu dengan melakukan privatisasi terhadap Badan-Badan Usaha Milik Negara yang

¹ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga (terj.)* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2001), hlm. 55-56.

menekankan pembangunan ekonomi secara perlahan dan melalui tahapan agar masyarakat dapat beradaptasi dan mengikutinya.²

Namun reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Yeltsin tidak membawa hasil sesuai dengan harapan. Masyarakat Rusia yang selama beberapa dekade hidup dalam sebuah sistem yang membatasi kehidupan masyarakat, kreativitas, serta kemandirian masyarakat, dalam seketika sistem tersebut berubah sehingga masyarakat diberikan kebebasan untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat mengakibatkan tidak semua masyarakat dapat bersaing dan berusaha. Pada masa pemerintahan Boris Yeltsin terjadi peningkatan tingkat pengangguran dan menurunnya tingkat taraf hidup masyarakat.³

Budaya politik memiliki peranan yang penting karena menggambarkan orientasi politik dari masyarakat Rusia.⁴ Budaya politik tersebut memberikan karakteristiknya dalam institusi negara.⁵ Karakteristik dari budaya politik masyarakat Rusia mengarah kepada sistem pemerintahan yang terpusat dengan kepemimpinan yang kuat. Selain itu, budaya politik yang berkembang di Rusia cenderung lebih bergerak menjauhi demokrasi, seperti tradisi otoritarian, mencari sosok kepemimpinan yang kuat, dengan sistem politik yang cenderung tertutup.⁶ Dengan karakteristik budaya politik yang terbentuk, penerapan demokrasi yang mengutamakan kebebasan masyarakat untuk berkompetisi, tidak akan membawa masyarakat pada sebuah keadaan yang lebih baik. Masyarakat lebih memilih kemakmuran daripada kebebasan dan hak asasi manusia. Demokrasi dan kebebasan berekspresi bukanlah prioritas utama.⁷ Kondisi ini sulit bagi perkembangan demokrasi di Rusia.

Keengganan masyarakat pada sistem demokrasi liberal ditunjukkan pada pemilihan parlemen (*Duma*) tahun 1995. Partai Komunis Rusia (CPRF) yang

² Zeffry Alkatiri, *Transisi Demokrasi di Negara Federasi Rusia: Analisa Perlindungan HAM 1991-2000* (Depok: Fakultas Ilmu Budaya UI, 2007), hlm 89-90.

³ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁴ Stephen White, Alex Pravda, dan Zvi Gitelman (ed.), *Development in Russian Politics* (Dunham: Duke University Press, 1997), hlm. 269.

⁵ *Ibid.*, hlm. 270

⁶ David Tatom (ed.), *Comparative Politics in Transition: Fourth Edition* (Canada: Thomson Wadsworth, 2004), hlm.195-196.

⁷ Simon Saragih, *Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm.131.

didukung kelompok elit konservatif berhasil memperoleh suara terbanyak sebesar 22% dari jumlah total suara. Sedangkan partai yang didukung oleh Kremlin dan Yeltsin yaitu Partai Rusia Rumah Kami hanya memperoleh 10,13 persen suara.⁸ Dukungan masyarakat yang besar terhadap Partai Komunis Rusia pada Pemilihan Parlemen tahun 1995 disebabkan kegagalan pemerintahan Yeltsin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menganggap keadaan sosial, politik dan ekonomi yang tidak stabil pada masa Yeltsin menyebabkan banyak yang berpikir jika sistem komunis masih jauh lebih baik.

Tabel 1.1. Hasil Pemilihan Parlemen (Duma) Tahun 1995

Partai Politik	Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi di Parlemen
Partai Komunis Rusia (CPRF)	15.432.963	22,30	99 Kursi
Partai Liberal - Demokrat (LDPR)	7,737,431	11,80	50 Kursi
Partai Rusia Rumah Kami (NDR)	7,009,291	10,13	45 Kursi
Partai Yabloko	4,767,384	6,89	31 Kursi
Jumlah			225 Kursi

Sumber: A. Fajarurodji, *Russia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 196.

Setelah kemenangan Yeltsin pada Pemilihan Presiden tahun 1996, keadaan politik Rusia semakin tidak stabil. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda Rusia di tahun 1998. Kegagalan Yeltsin dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dikecam oleh Partai Komunis Rusia sebagai partai oposisi yang menguasai *Duma*. Meskipun *Duma* tidak dapat memakzulkan presiden, tetapi Yeltsin merasa tertekan dengan kondisi ekonomi yang semakin memburuk, untuk itu ia mengangkat dan mengganti beberapa kali perdana menteri di tahun 1998 dan 1999.

⁸ Henry E. Hale, "The Origins of United Russia and The Putin's Presidency: The Role of Contingency in Party System Development" dalam Jurnal *Demokratizatsiya*, Vol. 12, No. 2, April 2004, hlm. 169, bersumber dari situs <http://www.demokratizatsiya.org/bin/pdf/DEM%2012-2%20Hale.pdf> yang dikutip pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 12.54 WIB.

Tercatat terdapat tiga kali pergantian perdana menteri antara tahun 1998 hingga 1999.⁹ Diantaranya, pada Agustus 1998 diangkat Viktor Chernomyrdin, namun kurang dari sebulan ia memerintah, diganti oleh Yevgeny Primakov. Primakov bertahan selama 6 bulan hingga pada bulan Mei 1999 dan kemudian digantikan oleh Sergei Stepashin. Stepashin tidak berkuasa lama karena pada Agustus 1999 ia diganti oleh seorang mantan anggota badan intelejen Rusia–KGB (*Komitet Gosudartvennoy Bezopasnosti*) Vladimir Putin. Putin bertindak sebagai *acting*-presiden Rusia ketika Boris Yeltsin secara tiba-tiba mengundurkan diri Desember 1999.

Pada Pemilihan Duma selanjutnya tahun 1999 muncul beberapa partai baru, salah satunya adalah Partai *The Interregional Movement Unity*. Partai ini didirikan oleh Sergei Shoigu (Menteri Urusan Pertahanan Sipil, Keadaan Darurat dan Penanggulangan Dampak Bencana Kabinet Boris Yeltsin I dan II), Aleksandr Karelin (mantan juara dunia gulat sembilan kali), dan Aleksandr Gurov (mantan kepala departemen *organized crime* di Kementerian Dalam Negeri) pada bulan September 1999.

Pendirian partai ini didukung oleh Boris Yeltsin, Vladimir Putin, dan gubernur-gubernur daerah. Partai ini pada awalnya bertujuan menjadi penghalang ambisi mantan Perdana Menteri Yevgeny Primakov untuk maju dalam Pemilihan Presiden tahun 2000 melalui partai baru *Fatherland-All Russia*. Bagi Kremlin, *Unity* dapat menjadi penghalang dukungan masyarakat terhadap partai *Fatherland-All Russia*. Tujuan kedua adalah membentuk suatu blok partai yang mendukung Kremlin, sehingga presiden yang didukung oleh Kremlin dapat maju dalam Pemilihan Presiden di tahun 2000. Selain itu, Kremlin juga mengharapkan terbentuknya *Duma* yang lebih loyal terhadap eksekutif.¹⁰

Pada Desember 1999, partai baru *Unity* secara mengejutkan berhasil memperoleh dukungan suara sebesar 23,32%. Meskipun demikian, Partai Komunis Rusia tetap memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Duma. CPRF memperoleh 24,29%. Tingginya suara *Unity* dalam Pemilihan *Duma* menurut

⁹ David M. Kotz, dan Fred Weir, *Russia's Path From Gorbachev to Putin: The Demise of Soviet System and The New Russia* (New York: Routledge, 2007), hlm. 267.

¹⁰ Derek S. Hutcheson, *Political Parties in the Russia Regions* (London: RoutledgeCurzon, 2003), hlm. 25.

David M. Kotz disebabkan harapan besar masyarakat terhadap *acting*-presiden Vladimir Putin.¹¹ Putin yang beberapa bulan sebelum Pemilihan *Duma* memenangkan pertempuran melawan kelompok separatis Chechen di Chechnya dianggap oleh masyarakat dapat mengembalikan Rusia menjadi negara kuat seperti masa Uni Soviet.

Tabel 1.2. Hasil Pemilihan Parlemen (Duma) Tahun 1999

Partai Politik	Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi di Parlemen
Communist Party of Russia Federation (CPRF)	16.196.024	24,29	67 Kursi
Interregional Movement "Unity"	15.549.182	23,32	64 Kursi
Fatherland-All Russia	8.886.753	13,33	37 Kursi
Union of Right Forces	5.677.247	8,52	24 Kursi
Zhirinovskiy Bloc (LDPR)	3.990.038	5,98	17 Kursi
Yabloko	3.955.611	5,93	16 Kursi
Jumlah			225 Kursi

Sumber: Derek S. Hutcheson, *Political Parties in the Russia Regions* (London: RoutledgeCurzon, 2003), hlm. 17.

Pada pemilihan presiden tahun 2000, Partai *Unity* mendukung Vladimir Putin sebagai calon Presiden Rusia. Meskipun pada bulan September 1999, dalam sebuah polling Gennady Zyuganov menjadi calon presiden terkuat dengan dibawahnya berturut-turut Primakov, Grigory Yavlinsky (pemimpin Partai *Yabloko*), Yuri Luzhkov (Walikota Moskwa), setelah kemenangan Rusia terhadap pemberontak Chechen dalam Perang Chechen II Desember 1999, dukungan terhadap Putin meningkat tajam hingga berada diatas 40 persen atau dua kali lipat dibanding kandidat lain.¹² Masyarakat menganggap Putin sebagai pemimpin yang kuat sehingga akan mampu mensejahterakan masyarakat dan mengembalikan posisi Rusia sebagai negara kuat. Selain itu, dukungan masyarakat juga meningkat karena partai pendukung pemerintah *Unity* berhasil meraih 23 persen suara pada Pemilihan *Duma*.

¹¹ Kotz dan Weir, *Op. cit.*, hlm. 272.

¹² *Ibid.*, hlm. 275.

Pemilihan Presiden yang diadakan pada bulan Maret 2000 berhasil dimenangkan Vladimir Putin dengan mengungguli jauh saingan terberatnya Gennady Zyuganov. Putin memperoleh 52,9 persen suara yang berarti tidak diperlukan lagi pemilihan ulang karena Zyuganov hanya memperoleh 29,2 persen suara.¹³ Kemenangan Putin dalam Pemilihan Presiden Rusia menjadikan Vladimir Putin sebagai Presiden ke-2 Republik Federasi Rusia.

Setelah terpilihnya Putin menjadi Presiden Rusia, *Unity* berusaha untuk memperkuat diri dalam menghadapi partai oposisi yang dipimpin oleh CPRF. Pada kongres pertamanya pada bulan Mei 2000, mereka melakukan konsolidasi dengan partai lain. Hasil konsolidasi tersebut menghasilkan satu partai baru yang bernama United Russia (*Yedinaya Rossiya*). United Russia merupakan gabungan dua partai baru yaitu *Unity* dengan *Fatherland-All Russia Movement*. Penggabungan kedua partai ini menyebabkan *Duma* menjadi lebih pro-presiden dibandingkan pada masa Yeltsin yang selalu bertentangan dengan presiden.¹⁴

Partai *United Russia* sebagai partai baru yang mendukung pemerintahan Putin bersiap untuk menghadapi Pemilihan Parlemen (*Duma*) di tahun 2003. Dengan dukungan dari partai-partai yang menyatu dalam partai ini, mereka berharap dapat mengalahkan CPRF yang pada pemilihan sebelumnya unggul tipis atas *Unity*. Tugas dari partai baru ini seperti yang dideklarasikan Sergei Shoigu untuk menyatukan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh presiden dan sekeliling pemimpin negara. Dukungan secara tidak langsung diberikan oleh Presiden Putin.¹⁵ Putin sendiri menyatakan independen, meskipun pada kenyataannya ia melakukan berbagai cara agar *United Russia* dapat memenangkan Pemilihan Parlemen (*Duma*) tahun 2003 dan 2007.

Keberadaan partai pendukung pemerintah di dalam *Duma* memberikan Kremlin kekuatan yang besar dalam mengatur segala aktivitas yang dilakukan oleh *Duma*, Kremlin juga memiliki kuasa dalam menghentikan segala aktivitas yang dilakukan oleh *Duma*.

¹³ *Ibid.*, hlm. 273.

¹⁴ Hutcheson, *Op. cit.*, hlm. 25.

¹⁵ Richard Sakwa, *Putin: Russia's Choice* (London: Routledge, 2004), hlm. 78.

1.2 Permasalahan

Perpindahan kekuasaan dari Boris Yeltsin kepada Vladimir Putin membawa perubahan bagi politik Rusia terutama bagi transisi demokrasi di Rusia. Perubahan tersebut tampak pada elit politik, partai politik, aparatur negara, institusi pemerintahan daerah, serta media massa. Kebijakan Putin dalam mengatur pemerintahannya dibentuk dalam *managed democracy*. *Managed Democracy* muncul sebagai kekecewaan terhadap demokrasi yang dianggap gagal pada masa Yeltsin dan tidak sesuai dengan masyarakat Rusia.

Pada masa Putin terdapat berbagai kebijakan dalam memperbaiki keadaan Rusia. Perbaikan yang dilakukan yaitu dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, Putin berupaya untuk menarik kembali perusahaan-perusahaan negara yang telah dijual kepada swasta untuk kembali berada di bawah kontrol pemerintah. Dalam bidang politik, Putin mencoba untuk menerapkan sistem demokrasi. Namun demokrasi yang diterapkan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan model demokrasi yang berkembang di Barat. Hal ini dikarenakan Putin memiliki pemikirannya sendiri dalam menerapkan demokrasi di Rusia.

Dalam menerapkan *managed democracy*, beberapa pengamat seperti M. Steven Fish menganggap bahwa transisi demokrasi di Rusia telah mengalami proses pembalikan dan menuju kembali ke arah otoritarian. Pendapat Fish ini dengan melihat beberapa unsur demokrasi yang dilanggar oleh Putin seperti kebebasan berpendapat termasuk kekerasan terhadap jurnalis dan terbatasnya media massa karena dikuasai oleh negara. Selain itu, Fish juga melihat pada aparatur negara yang tidak netral dan mendukung partai pro-pemerintah United Russia.¹⁶

Kebijakan-kebijakan yang dibuat Putin membawa pengaruh positif terhadap partai pro-pemerintah utama, United Russia. Pemilihan Parlemen Duma tahun 2003 secara mengejutkan berhasil dimenangkan oleh partai United Russia. United Russia mendominasi perolehan suara dengan memperoleh 37,1% suara. Sedangkan CPRF yang pada pemilihan sebelumnya unggul tipis atas Unity, kalah telak dengan hanya memperoleh 12,7% suara. Peningkatan sedikit suara terjadi

¹⁶ M. Steven Fish, *Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 78.

pada LDPR dan Rodina (Motherland) dengan memperoleh 11,6% dan 9,1% suara. Sementara dari kelompok liberal Partai Yabloko dan Union of Right Forces yang sebelumnya dapat melewati batas *parliament threshold* 5%, pada Pemilihan Duma kali ini harus berada dibawah batas 5%.¹⁷

Pemilihan Duma tahun 2003 mempunyai arti penting bagi demokrasi di Rusia karena terjadi perubahan besar dalam politik Rusia. Partai Komunis Rusia (CPRF) mengalami penurunan suara secara drastis pada Pemilihan Duma tahun ini. Perolehan suara yang didapat oleh CPRF tidak lebih dari 50% jumlah suara pada Pemilihan Duma tahun 1999. Selain itu, muncul partai pendukung pemerintah yang sebelumnya bernama Unity, Partai United Russia (UR) yang memperoleh sepertiga dari seluruh jumlah suara. Sedangkan bagi Partai Yabloko, Pemilihan Duma tahun 2003 merupakan bencana.

Kekalahan ini cukup mengejutkan bagi partai-partai yang sebelumnya masih dapat lolos *parliamentary threshold* sebesar 5%. Menurut Gregory Yavlinsky, Ketua Partai Yabloko, kekalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini ia kaitkan dengan terpilihnya Vladimir Putin sebagai presiden di tahun 2000. Kekalahan ini menurutnya, akibat strategi yang dibuat oleh Putin sehingga menyulitkan bagi partai-partai oposisi terutama dari kelompok liberal untuk bersaing dengan partai pemerintah seperti United Russia. Yavlinsky juga menuduh bahwa media tidak imbang dan cenderung lebih banyak memberitakan kampanye negatif bagi partai oposisi. Hal ini mengurangi kemampuan kampanye secara efektif dan terutama berdampak besar bagi hasil pemilihan umum.¹⁸

Pada pemilihan Duma tahun 2007, partai United Russia kembali berhasil memenangkan pemilu dengan suara mayoritas 64,30 persen suara dan merebut 315 dari 450 kursi di Duma. Partai-partai oposisi hampir hilang dari Duma, hanya CPRF yang masih bertahan dalam legislatif. Sedangkan partai lain seperti Yabloko tidak mendapatkan kursi di parlemen karena tidak mencapai ambang batas *parliamentary threshold* sebesar 7%. Oposisi hampir tidak dapat bergerak ketika kampanye, melalui pembatasan media dan juga dukungan aparat birokrasi.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ David White, "Victims of Managed Democracy? Explaining the Electoral Declined of The Yabloko Party" dalam Jurnal *Demokratizatsiya*, Vol. 15 Number 2 (Spring 2007), hlm. 219, bersumber dari situs <http://www.demokratizatsiya.org/bin/pdf/DEM%2015-2%20White.pdf>

Sedangkan aspek lain seperti perubahan sistem pemilu dan aturan partai membatasi munculnya partai baru dan melemahkan partai oposisi.

Dari penjelasan yang diberikan diatas pertanyaan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah

1. Bagaimana Strategi Politik Vladimir Putin Dalam Memenangkan Partai *United Russia* pada Pemilihan Parlemen (*Duma*) tahun 2003-2007?

2. Bagaimana Implikasi Strategi Vladimir Putin Terhadap Transisi Demokrasi di Rusia tahun 2003-2007?

1.3 Kerangka Teori

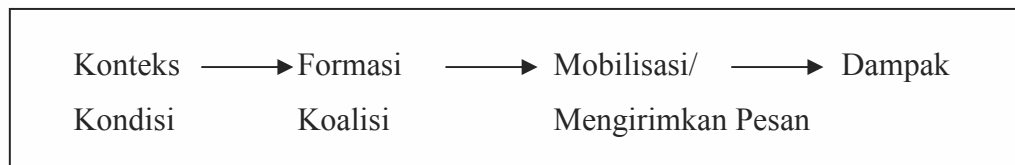
1.3.1 Strategi Politik

Pengertian dari strategi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika dilihat dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa manajemen strategi adalah proses pengambilan keputusan. Selain itu, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang menyeluruh dan mendasar. Kemudian, pembuatan keputusan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sebagai penanggung jawab utama dalam keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah organisasi. Pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi. Terakhir keputusan tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan/pelaksanaan pekerjaan yang terarah. Sehingga strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan mengimplementasikannya dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan.¹⁹

¹⁹ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2005), hlm. 149.

Menurut Hanspeter Kriesi, Laurent Bernhard, Regula Hänggli dalam “Political Strategies in Direct-Democratic Campaigns” menyebutkan ada empat tahapan strategi politik:²⁰

Gambar 1.1
Tahapan Strategi Politik



Sumber: Hanspeter Kriesi, Laurent Bernhard, Regula Hänggli, “Political Strategies in Direct-Democratic Campaigns” yang bersumber dari situs <http://www.nccr-democracy.uzh.ch/publications/workingpaper/pdf/WP8.pdf>

Faktor awal yaitu terkait dengan kondisi atau konteks. Hal ini terkait dengan institusi-institusi yang telah ada, isu-isu yang dapat mendukung, faktor-faktor dari luar, dan juga sifat atau budaya dari masyarakat. Sedangkan yang termasuk dalam formasi dan koalisi adalah konfigurasi dari aktor-aktor, tujuan atau kepercayaan, dan sumber daya. Tahapan Selanjutnya yaitu mobilisasi terkait dengan komunikasi. Komunikasi terkait dengan media, baik media elektronik maupun cetak. Untuk itu hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya waktu, target yang ingin dicapai, repertoar komunikasi, agenda-building, dan strategi-strategi yang mendukung mobilisasi massa. Ketiga tahapan ini akan menghasilkan suatu dampak yang terdiri atas reaksi, visibility (kelayakan), dukungan, perilaku pemilih dan evaluasi. Keempat tahapan ini dilakukan untuk mencapai tujuan kemenangan bagi suatu partai atau kandidat.

Tahapan strategi politik Hanspeter Kriesi, Laurent Bernhard, Regula Hänggli digunakan dalam melihat tahapan strategi politik yang diterapkan oleh Presiden Vladimir Putin dalam memenangkan partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Tahapan pertama yaitu konteks merupakan kondisi yang sudah ada di Rusia, misalnya saja institusi pemerintahan, budaya politik masyarakat Rusia, dan isu-isu yang mendukung. Tahapan selanjutnya yaitu formasi, yaitu konfigurasi dari aktor-aktor politik di lapangan,

²⁰ Hanspeter Kriesi, Laurent Bernhard, Regula Hänggli, “Political Strategies in Direct-Democratic Campaigns” yang bersumber dari situs <http://www.nccr-democracy.uzh.ch/publications/workingpaper/pdf/WP8.pdf> diakses pada tanggal 19 Juni 2012 pukul 11.32 WIB.

seperti anggota partai United Russia. Sedang tahapan ketiga, mobilisasi, setelah formasi aktor yang ada telah terbentuk, maka selanjutnya tahap mobilisasi. Mobilisasi dapat dilakukan melalui media massa terutama media elektronik yang telah dikuasai oleh negara. Tahapan strategi-strategi politik yang dilakukan oleh Putin berbentuk dalam *managed democracy*.

1.3.2 Klasifikasi Pemerintahan

Dalam, menentukan sistem pemerintahan yang digunakan di Rusia, maka menggunakan empat tipologi sistem politik menurut Alan Ball dan Guy B. Peters. Rusia telah mengalami beberapa bentuk sistem politik di negaranya semenjak tahun 1991. Setelah runtuhnya sistem komunis, Rusia mengalami proses transisi dari sistem komunis menuju ke sistem liberal demokrat. Pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin, sistem politik liberal demokrat diterapkan. Namun penerapan sistem demokrasi liberal ternyata menimbulkan kegagalan. Untuk itu perubahan sistem politik dilakukan oleh Vladimir Putin, penerapan *managed democracy* dianggap sebagai salah satu bentuk dari sistem otoritarian. Hal ini juga terkait dengan strategi politik yang diterapkan oleh Vladimir Putin, yaitu institusi negara. Untuk itu, menurut Alan Ball dan Guy B. Peters, terdapat empat tipologi dari sistem politik yang digunakan oleh suatu negara diantaranya:

1. Sistem Demokrasi Liberal
2. Sistem Komunis
3. Sistem Post-Komunis
4. Sistem Otoritarian

1. Sistem Demokrasi Liberal

Liberal Democratic System, could be characterised as follows: (1) There is more than one political party competing for political power; (2) The competition for power is open, not secretive, and is based on established and accepted procedures, including elections; (3) Entry and recruitment to positions of political power are relatively open; (4) There are periodic elections based on universal franchise; (5) Pressure groups are able to operate to influence government decisions, associations such as trade unions and other voluntary organisations are not subject to close government control; (6) Civil liberties, such as freedom of speech, freedom of religion, and freedom from arbitrary arrest, are recognised and protected within the political system, this assumes that there is a substantial amount of independence and freedom from

*government control of the mass media, i.e. radio, television, newspaper (even though government may own and operate some components of the media); (7) There is some form of separation of power – i.e a representative assembly has some form of control over the executive, and the judiciary is independent of both executive and legislature.*²¹

Sistem ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) Terdapat lebih dari satu partai politik yang berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan politik. (2) Kompetisi perebutan kekuasaan terbuka, tidak tertutup, dan berdasarkan pada prosedur yang telah ada dan telah diterima, termasuk pemilihan umum (3) Rekrutmen posisi dalam kekuasaan politik relatif terbuka (4) Terdapat pemilihan yang periodik dengan hak pilih yang universal (5) Kelompok penekan dapat bekerja untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Organisasi seperti unit usaha tidak mendapat kontrol yang ketat dari pemerintah. (6) Kebebasan sipil, seperti kebebasan berbicara, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan dari penangkapan yang sewenang-wenang, dilindungi dalam sistem politik. Hal ini mengasumsikan adanya kemerdekaan, dan kebebasan dari kontrol pemerintah terhadap media massa, seperti radio, televisi, dan media cetak (walaupun pemerintah dapat mempunyai dan beroperasi dalam beberapa komponen dari media). (7) Terdapat pemisahan kekuasaan seperti lembaga legislatif mengontrol terhadap eksekutif, dan yudisial independen terhadap eksekutif dan legislatif.

2. Sistem Politik Komunis

*The term ‘communist political system’ also certain disadvantages, not least that it reflects an aspiration to communism rather than its achievement. Yet it is widely understood and can be characterised in the following manner: (1) There is an official ideology linked in some fashion to the writings of Karl Marx; (2) The political system is dominated by one political party; (3) There is central planning of the economy and a relative absence of private ownership; (4) Freedom of association and expression are limited by control of organisations and the censorship of state-owned press; (5) There is no concept of the separation of powers and consequently, limited judicial independence.*²²

Sistem ini memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Memiliki ideologi negara yang terkait dengan tulisan-tulisan Karl Marx. (2) Sistem politik didominasi oleh

²¹ Alan. R. Ball dan B. Guy Peters, *Modern Politics and Government: Sixth Edition* (London: Macmillan Press Ltd., 2000), hlm. 54-55.

²² *Ibid.*, hlm. 57.

satu partai politik. (3) Sistem perencanaan ekonomi dan absennya kepemilikan pribadi. (4) Kebebasan dalam berorganisasi dan berekspresi terbatas dengan kontrol dari organisasi dan sensor dilakukan oleh pers yang dimiliki oleh negara. (5) Tidak terdapat konsep pemisahan kekuasaan, dan terbatasnya independensi lembaga yudisial.

3. Sistem Politik Post-Komunis

The post-communist states appeared to share particular characteristics dividing them from other types of political system. These characteristics could include: (1) The state is weak and viewed with suspicion; (2) Party system are weak, with numerous parties competing for power with thinly articulated programmes and reluctance to compromise; (3) Civil liberties generally enjoy little regard, especially concerning the protection of minorities; (4) There is extensive state ownership, but the aim to move toward a capitalist economic system; (5) There is a 'low civic culture' and a relatively small number of the civic organisations that would support liberal democracy.²³

Sistem ini memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Negara lemah dan disangsikan oleh masyarakatnya. (2) Sistem kepartaian lemah, dengan jumlah partai yang banyak dan sedikitnya program-program yang terartikulasi serta keengganan untuk berkompromi. (3) Kebebasan sipil umumnya masih terbatas, terutama terkait perlindungan bagi kelompok minoritas. (5) Adanya perluasan kepemilikan negara, tetapi tujuannya untuk mencapai sistem ekonomi kapitalis. (6) Rendahnya budaya sipil, serta relatif sedikitnya organisasi masyarakat yang mendukung demokrasi liberal.

4. Sistem Otoritarian

Characteristics such as (1) Limitations on open political competition; (2) The role of ideology; (3) The overt deployment of coercion; (4) Weakly supported civil liberties; (5) Lack of judicial independence; (6) The role of traditional or military elites are important and perhaps would allow a way forward.²⁴

Sistem ini memiliki karakteristik seperti: (1) Terbatasnya dan tertutupnya kompetisi politik. (2) Peran dari suatu ideologi yang besar. (3) Penggunaan kekerasan oleh negara. (4) Rendahnya dukungan terhadap kebebasan sipil. (5)

²³ *Ibid.*, hlm. 59

²⁴ *Ibid.*

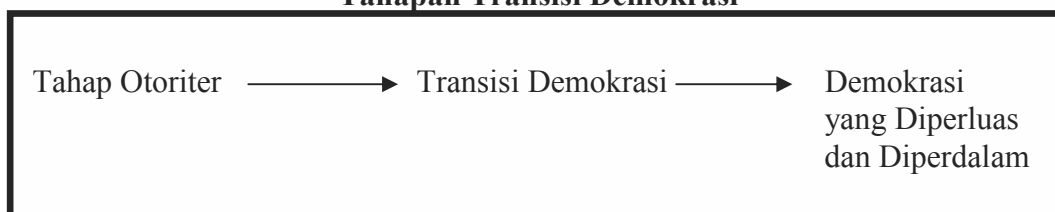
Rendahnya independensi lembaga yudisial. (6) Peran yang besar dari elit tradisional atau militer yang menentukan arah kebijakan negara.

1.3.3 Transisi Demokrasi

Perubahan Rusia dari sistem Otoritarian ke sistem demokrasi merupakan suatu proses transisi demokrasi. Semenjak runtuhnya rezim totalitarian Uni Soviet, Rusia dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menuju sistem demokrasi atautkah mengalami pembalikan ke rezim otoritarian. Pada masa Boris Yeltsin transisi diarahkan kepada tahap sistem demokrasi yang diperluas dan diperdalam. Namun semenjak masa pemeritahan Vladimir Putin, muncul karakteristik menuju sistem otoritarian.

Proses perubahan dari komunisme menuju demokrasi yang terjadi di Uni Soviet disebut oleh Guillermo O'Donnel sebagai transisi menuju demokrasi. Menurut O'Donnel, transisi merupakan interval atau selang waktu antara satu rezim dengan rezim yang lainnya. Transisi dibatasi, disatu sisi, oleh dimulainya proses perpecahan sebuah rezim authoritarian dan disisi lain oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan authoritarian, atau kemunculan suatu alternatif revolusioner.²⁵ Runtuhnya rezim authoritarian akan semakin cepat ketika adanya alternatif atau pilihan sistem pemerintahan yang lain. Dalam hal ini demokrasi dapat menjadi alternatif pengganti dari rezim authoritarian yang mulai ditinggalkan. Runtuhnya suatu rezim otoritarian dijelaskan oleh O'Donnel disebabkan ketika penguasa kurang mendapat legitimasi dari masyarakat.

Gambar 1.2
Tahapan Transisi Demokrasi



Juan Jose Linz dan Alfred Stephan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1996), hlm. 3.

²⁵ Guillermo O'Donnell, et. al (ed.), *Transisi Menuju Demokrasi (terj.)* (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 6.

Menurut Juan J. Linz dan Alfred Stephan, tahapan politik demokrasi yaitu; Pertama, tahap otoriter-totaliter yang anti-demokrasi; Kedua, tahap transisi demokrasi; Ketiga, tahap sistem demokrasi yang diperluas dan diperdalam (*widening and deepening democracy system*). Setiap tahapan memiliki elemen: individu, lembaga, dan nilai yang khas, termasuk strategi penanganan yang khas. Tahap transisi demokrasi mensyaratkan diskontinuitas terhadap tahap otoriter-totaliter yang antidemokrasi, sedangkan tahap sistem demokrasi yang diperluas dan diperdalam mensyaratkan kontinuitas dengan transisi demokrasi.

Dibanyak kasus dalam transisi demokrasi telah terpenuhi, masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, situasi yang harus dibangun, dan kondisi kondusif yang harus diciptakan sebelum demokrasi dapat dikonsolidasikan. Yang mereka maksudkan dengan konsolidasi demokrasi adalah situasi politik dimana demokrasi telah menjadi "*the only game in town*".²⁶

Menurut Juan J. Linz dan Alfred Stepan tentang konsolidasi demokrasi secara tingkah laku rezim demokratis dapat terkonsolidasi bila tidak ada aktor-aktor yang secara signifikan mencoba untuk menciptakan rezim non-demokratis atau mencoba untuk melakukan kejahatan terhadap negara. Rezim yang demokratis dapat pula terkonsolidasi ketika mayoritas masyarakat percaya bahwa prosedur yang demokrasi dan institusi adalah cara yang paling tepat untuk mengatur kehidupan masyarakat secara kolektif. Secara konstitusional, rezim demokrasi dapat terkonsolidasi bila baik pemerintah maupun non-pemerintah menjadi subjek bagi hukum.

Dalam bab *Democracy and Its Arenas*, Linz dan Stepan berpendapat bahwa pada transisi demokrasi menuju tahap konsolidasi, terdapat lima pilar utama yang harus terbangun dengan baik agar konsolidasi demokrasi berhasil tercapai. Yaitu, masyarakat sipil (*civil society*), masyarakat politik (*political society*), penegakan hukum (*rule of law*), aparatur negara (*state apparatus*), dan masyarakat ekonomi (*economic society*).²⁷

²⁶ Juan Jose Linz dan Alfred Stephan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1996), hlm. 5.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 7-15.

Konsolidasi demokrasi dapat diperkuat melalui lima kondisi yang saling terkait. Pertama tumbuhnya kebebasan dan *civil society*. *Civil society* mengacu kepada adanya arena rakyat untuk ikut serta dalam kegiatan bernegara atau pemerintahan yang ditunjukkan oleh kebebasan berserikat atau berorganisasi dan kemandirian kelompok serta kebebasan individu untuk membentuk asosiasi dan membangun solidaritas dalam menyalurkan kepentingannya. Kedua, adanya *political society*, yaitu aktor-aktor politik yang berkompetisi untuk mendapatkan hak-hak yang diakui guna mengontrol kekuasaan publik. Pada tatanan ini setiap warga negara diharapkan mengembangkan institusi-institusi demokrasi seperti partai politik, pemilihan umum, undang-undang Pemilu, kepemimpinan politik dan sebagainya. Ketiga, adanya *rule of law* yang dapat menjamin kebebasan warga negara untuk berkespresi dan berserikat. *Rule of law* tersebut mendukung pentingnya kemandirian *civil society* dan masyarakat politik. Begitupun dalam pemerintahan demokratis para aparatur negara harus menjalankan akuntabilitas melalui *rule of law*. Keempat adanya *state bureaucracy* yang digunakan oleh pemerintah baru. Konsolidasi demokrasi memerlukan keefektifan sebuah pengaturan yaitu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demokratis. Kelima, adanya institusionalisasi *economic society* yaitu seperangkat norma, institusi, regulasi yang dapat diterima pasar. Peran *economic society* menjembatani antara negara dengan pasar.²⁸

Masyarakat sipil terdiri dari banyak kelompok dan organisasi, dimana mereka memiliki kemampuan untuk melakukan mobilisasi berupa gerakan sosial yang berposisi terhadap rezim non demokrasi. Sehingga dengan pengaruhnya yang luas mampu menumbangkan rezim otoriter yang berkuasa.

Masyarakat Politik terdiri dari partai politik, sistem pemilihan, kepemimpinan politik, aliansi partai dan para legislatur. Masyarakat Politik mempunyai peranan ketika masyarakat sipil telah berhasil menumbangkan rezim yang berkuasa. Setelah rezim otoriter tumbang dibutuhkan elite-elite politik untuk mengisi kekosongan pemerintahan atau melakukan suksesi atas rezim yang

²⁸ Henny Warsilah, "Gerakan Prodemokrasi dan Transformasi Sosial menuju Masyarakat Demokratis" yang bersumber dari situs <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/6474/6475.pdf> yang diakses pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 09.27 WIB.

berkuasa sebelumnya. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, masyarakat sipil dan masyarakat politik terjalin hubungan yang komplementer. Masyarakat politik membutuhkan masyarakat sipil untuk menumbangkan rezim yang berkuasa sedangkan masyarakat sipil membutuhkan masyarakat politik untuk mengisi kekosongan pemerintahan.

Menurut Linz dan Stepan dalam konsolidasi demokrasi memerlukan penegakan hukum yang tegas. Dalam artian konstitusinya juga harus memiliki pengaruh yang kuat dimasyarakat dan dihormati oleh masyarakat politik, serta aparatur negara. Aparatur negara harus mendapat dukungan dari masyarakat untuk pengakuan atas kewenangannya yang bersifat legal-rasional. Aparatur negara juga mendapatkan dukungan dana yang dikumpulkan secara legal dari masyarakat politik dan mendayagunakan pajak untuk kepentingan negara.

Dan terakhir, Linz dan Stepan menganggap bahwa konsolidasi demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak disertai dengan adanya masyarakat ekonomi. Konsolidasi demokrasi memerlukan masyarakat ekonomi untuk dijadikan mediasi antara peran negara dan mekanisme pasar. Hal ini disebabkan karena konsolidasi demokrasi bisa berjalan baik didalam negara yang menganut sistem ekonomi campuran, bukan negara yang menganut sistem ekonomi yang murni terpusat ataupun negara penganut sistem pasar murni. Secara empiris, sistem ekonomi pasar kurang cocok bagi konsolidasi demokrasi karena diperlukan intervensi pemerintah dan institusi sosial dan politik untuk menyukseskan konsolidasi demokrasi tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur pasar.

1.3.4 *Managed Democracy*

Managed Democracy merupakan suatu penerapan dari strategi politik Vladimir Putin. Keadaan Rusia yang terpuruk pada akhir masa pemerintahan Yeltsin, memberikan pemikiran kepada Putin untuk melakukan sebuah pembaharuan yang dapat memberikan jalan keluar kepada Rusia untuk mengatasi permasalahan yang ada. Untuk itu, Putin melakukan sebuah inovasi terhadap sistem demokrasi dalam masyarakat kontemporer saat ini, dengan menerapkan

managed democracy.²⁹ Dalam masa Putin, Rusia berusaha untuk mempersempit sebuah aturan yang mengatur tentang modernisasi dalam bidang ekonomi dan sosial-ekonomi yang mengacu kepada Barat namun tetap harus didasarkan kepada keadaan realitas masyarakat Rusia.³⁰ Keadaan yang membedakan penerapan demokrasi di Rusia dengan di negara-negara lain, yaitu menekankan kepada realitas masyarakat Rusia dan kebutuhan masyarakat Rusia. Hal ini yang menjadi dasar dari terbentuknya *managed democracy* atau demokrasi terkelola.

Secara umum, terdapat beberapa karakter utama dari *managed democracy*, diantaranya:³¹

1. presiden yang kuat dan institusi negara lain yang lemah, Putin ingin kembali memusatkan kekuasaan negara pada pemerintahan pusat. Hal ini dilakukan karena Putin melihat dalam beberapa waktu lalu terjadi pertentangan diantara pemerintah regional dan lokal sehingga ingin melakukan resentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik di tangan Kremlin. Dengan pemusatan yang dilakukan, maka presiden memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan di tingkat regional dan lokal.
2. negara melakukan kontrol terhadap media, kebebasan media seringkali mengakibatkan terdapat pemberitaan-pemberitaan yang melemahkan legitimasi dari pemerintah, sehingga kontrol negara terhadap media diperlukan.
3. kontrol terhadap pemilihan umum dan kompetisi politik dalam rangka mendapatkan legitimasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, misalnya saja perubahan dalam undang-undang sistem pemilihan umum dan aturan partai politik.

Kestabilan negara berdasarkan kepada kemampuan presiden dan ia merupakan pengatur dari sistem tersebut.

Dalam sistem ini, Putin memiliki pengaturan dan kontrol terhadap aset-aset negara yang memegang hajat hidup masyarakat banyak. Hal tersebut

²⁹ Timothy J. Colton dan Michael Mc Faul, *Popular Choice and Managed Democracy: The Russian Elections of 1999 and 2000* (Washington D.C : The Brooking Institution, 2003), hlm. 207.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Sakwa, *Op. cit.*, hlm. 78.

terwujud dalam pemilik dari aset-aset tersebut merupakan “orang-orang di sekitar” Putin yang juga terlibat dalam pemerintahan.

Managed democracy merupakan sebuah sistem demokrasi yang telah diatur oleh pemimpin politik atau penguasa pemerintahan pada saat itu. *Managed democracy* memiliki sebuah karakteristik yang berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di negara lain. Selain itu, *Managed democracy* merupakan sebuah sistem yang melaksanakan pemilihan umum namun telah diketahui hasil dari pemilihan umum tersebut, lembaga pers banyak tumbuh namun dalam prakteknya lembaga tersebut tidak memiliki lembaga sensor yang mandiri karena telah dikontrol oleh pemerintah dan memiliki ketergantungan kepada pemerintah, dan lembaga pemerintah mendengarkan permasalahan yang diajukan oleh masyarakat, namun dalam penyelesaiannya solusi yang dikeluarkan harus sesuai dengan kepentingan dari pemerintah.³²

Melalui keadaan tersebut dapat terlihat bahwa memang pemerintah memegang kontrol yang sangat kuat dalam pemerintahan Rusia. Aspek ini menjelaskan bahwa demokrasi yang ada di Rusia memang tidak mengarah kepada demokrasi yang diterapkan di barat. Rusia memiliki bentuk demokrasi sendiri yang telah disesuaikan dengan keadaan Rusia. Pada dasarnya, *managed democracy* merupakan upaya Putin untuk membawa Rusia keluar dari permasalahan yang ada. Dengan demikian, diharapkan sistem ini dapat memperbaiki keadaan Rusia dan menjadikan Rusia sebagai sebuah negara yang kuat, maju, dan besar

1.3.5 Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo, definisi partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik –dengan cara yang konstitusional– untuk melaksanakan programnya. Definisi lain partai politik disampaikan oleh Giovanni Sartori, menurutnya partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti

³² *Ibid.*, hlm. 82.

pemilihan umum, melalui pemilihan umum tersebut partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk mengisi jabatan-jabatan publik.³³

Pada negara demokratis menurut Miriam Budiardjo terdapat tiga fungsi partai politik.³⁴ Fungsi pertama partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik mempunyai fungsi menampung pendapat dan aspirasi masyarakat. Pendapat-pendapat masyarakat digabungkan, diolah serta dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Selanjutnya partai politik merumuskannya dalam usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan dalam platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui lembaga legislatif kepada pemerintah agar dibuat suatu kebijakan publik. Fungsi kedua adalah sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik menurut Miriam Budiardjo adalah proses seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap suatu fenomena politik. Sosialisasi politik merupakan bagian yang menentukan dalam membentuk sikap politik seseorang dalam memandang berbagai fenomena sosial (nasionalisme, ideologi, dan hak asasi manusia). Fungsi selanjutnya dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan, kepemimpinan nasional dan kepemimpinan internal. Fungsi terakhir dari partai politik adalah sarana pengatur konflik. Perbedaan yang ada di dalam masyarakat (etnis, suku bangsa, bahasa dan sosial ekonomi) dapat menimbulkan konflik. Untuk itu, partai politik diperlukan untuk mengatasinya atau manajemen konflik (membuat dampak negatif dari konflik berkurang).

Partai politik mempunyai fungsi penting dalam merekrut pemimpin-pemimpin politik. Rekrutmen memiliki peran penting pada rezim sosialis dimana partai sebagai institusi satu-satunya yang memberikan kekuasaan politik, tetapi partai juga signifikan pada sistem partai yang kompetitif (melalui pemilihan umum) yaitu sebagai sumber utama rekrutmen politik adalah melalui partai politik. Dalam sistem politik dimana partai politik absen atau sangat lemah, elit politik direkrut dari elit tradisional seperti keluarga penguasa, atau melalui organisasi militer atau religius. Rekrutmen elit politik tanpa adanya keberadaan pemimpin partai yang populer dapat memberikan efek negatif bagi stabilitas

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 403-404.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 405

rezim. Partai politik harus dapat membentuk *'political opportunity structures'* untuk pemimpin saat ini dan yang akan datang, dan membantu sistem politik dengan memberikan pelatihan bagi calon pemimpin selanjutnya.³⁵

Suatu organisasi partai politik akan melaksanakan tiga bentuk kegiatan yaitu; pertama, menyiapkan dan membantu bagi kampanye untuk pemilihan umum. Beberapa aktivitas dalam pemilihan umum diantaranya adalah pengumpulan dan atau kegiatan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. Partai Politik tidak hanya aktor yang berpartisipasi dalam hal ini. Kedua, mempertahankan organisasi kepartaian, keanggotaan dan sumber daya lainnya. Ketika partai sudah membangun basis sumber daya, mereka harus menjaganya misalnya koran partai yang harus disubsidi, konferensi partai untuk memberikan semangat bagi aktivis yang loyal, metode baru dalam pendanaan partai. Ketiga, mengatur kebijakan publik dan strategi bagi anggota partai yang terpilih dalam lembaga negara.³⁶

Sedangkan Katz dan Mair memandang ada dua faktor yang krusial terkait dukungan negara dengan partai yaitu: pertama, pertumbuhan pendanaan negara bagi partai; kedua, peningkatan penggunaan media elektronik dalam kampanye, biasanya diatur oleh aturan yang dibuat oleh negara.³⁷ Terkait dengan strategi yang dilakukan oleh Vladimir Putin, pendanaan negara bagi partai diatur sepenuhnya melalui undang-undang dan partai politik pemenang pemilu atau yang lolos treshold pada pemilihan sebelumnya diberikan sejumlah dana menjelang pemilihan umum. Sedangkan penggunaan media elektronik dimanfaatkan oleh Putin untuk mendukung Partai United Russia. Besarnya pemberitaan terkait Partai United Russia dan Presiden Vladimir Putin pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007 menunjukkan pemanfaatan media.

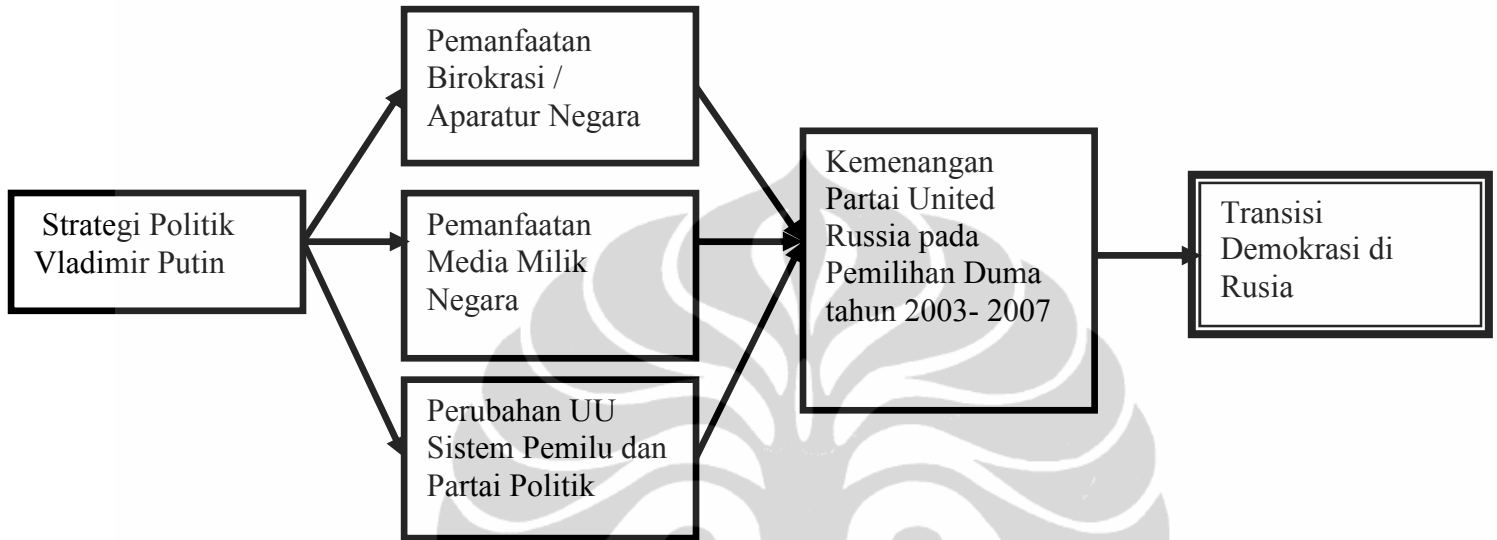
³⁵ Ball dan Peters, *Op. cit.*, hlm. 100.

³⁶ Alan Ware, *Political Parties and Party Systems* (Oxford: Oxford University Press, 1996), hlm. 111.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

1.4 Kerangka Alur Berfikir

Dalam menjelaskan mengenai strategi-strategi politik Vladimir Putin dalam memenangkan partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007 serta transisi demokrasi di Rusia pada masa Vladimir Putin maka digunakanlah bagan dibawah ini:



Keterangan:

Dalam bagan diatas digambarkan bahwa strategi politik yang dilakukan oleh Vladimir Putin, Presiden Rusia periode tahun 2000-2008, memenangkan Partai United Russia pada pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Strategi politik yang diterapkan oleh Putin dengan menggunakan pejabat/ aparaturnya yang mendukung partai United Russia. Selain itu, Putin membatasi media cetak dan televisi. Putin mengambil alih sebagian besar saham dari media elektronik dan cetak. Media elektronik dan cetak di Rusia secara keseluruhan hampir dikuasai seluruhnya oleh negara. Strategi Putin lainnya adalah dengan melakukan perubahan sistem pemilihan umum dan aturan partai politik. Dampaknya yaitu bagi kemenangan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Implementasi strategi Vladimir Putin yang termasuk di dalamnya membantu kemenangan Partai United Russia berdampak kepada transisi demokrasi di Rusia

1.5 Asumsi

Asumsi Kemenangan Partai United Russia pada pemilihan umum parlemen (Duma) tahun 2003 dan 2007 melalui strategi politik yang dibuat oleh Vladimir Putin yaitu:

- (1) Memanfaatkan unsur birokrasi pemerintahan untuk mendukung partai United Russia.
- (2) Membatasi terhadap media dan pemanfaatan media untuk kepentingan kemenangan Partai United Russia.
- (3) Merubah UU sistem pemilihan umum dan aturan partai politik.

1.6 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah studi demokratisasi di negara-negara pasca komunisme, demokrasi dan masalah yang dihadapi dalam demokratisasi. Proses transisi demokrasi di Rusia masih belum mencapai demokrasi yang terkonsolidasi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai fenomena yang terjadi di Rusia termasuk mendominasinya partai Pro-Kremlin, United Russia. Dengan dukungan yang diberikan oleh Presiden Vladimir Putin melalui strateginya, partai United Russia memenangkan dua pemilihan umum yaitu tahun 2003 dan 2007. Strategi politik Vladimir Putin tersebut diantaranya; pemanfaatan kepala daerah, birokrasi, media untuk kemenangan Partai United Russia serta perubahan sistem pemilihan umum memudahkan Partai United Russia memenangkan Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Penelitian ini penting dalam melihat fenomena demokratisasi di negara-negara termasuk berbagai strategi yang digunakan oleh pemimpin politik dalam memperbesar dan memperluas kekuasaan.

1.7 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan melakukan tinjauan kesejarahan dari transisi demokrasi, praktek *managed democracy* Vladimir Putin, dan implikasinya terhadap kemenangan partai United Russia dalam Pemilihan Duma tahun 2003. Dengan demikian, maka akan diperoleh hubungan antara setiap variabel yang telah disebutkan. Hubungan dari tiap variabel tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa untuk melihat

keterkaitan penerapan *managed democracy* oleh Vladimir Putin dengan kemenangan Partai United Russia dalam Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang dapat memberikan penjelasan alasan, hubungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah fenomena yang terjadi. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang memberikan penjelasan alasan, hubungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah fenomena yang terjadi. Secara definisi, tidak ada definisi tunggal mengenai penelitian kualitatif. Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat membantu memahami penelitian kualitatif yakni yang pertama tujuan yang ingin dicapai adalah untuk dapat memberikan penjelasan mendalam tentang dunia sosial dari pendukung penelitian dengan mempelajari kehidupan sosial dan material mereka, pengalaman mereka, perspektif dan sejarah. Kedua, pemilihan sampel berskala kecil dan dipilih berdasarkan oleh kriteria tertentu. Ketiga, metode penelitian data yang biasanya termasuk mempunyai hubungan dekat antara peneliti dengan pendukung penelitian yang interaktif dan bersifat membangun dan dapat dieksplor mengenai isu-isu yang muncul. Ketiga, data yang sangat detail dan kaya informasi. Keempat, analisa yang terbuka atas konsep-konsep baru yang dapat memberikan penjelasan lebih mengenai penggambaran dan klasifikasi atau mengembangkan penjelasan atau tipologi. Kelima, hasil yang dicapai cenderung fokus kepada interpretasi arti sosial melalui pemetaan dan pemaparan kembali dunia sosial dari pendukung penelitian.³⁸ Menurut Neuwman, melalui metode kualitatif maka akan dapat disajikan sebuah gambaran dari sebuah situasi yang diteliti secara terperinci.³⁹

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian studi literatur (data primer). Penelitian studi literatur dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan data sekunder, seperti literatur buku, sumber dari berbagai artikel

³⁸ Jane Ritchie dan Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Sciences Students and Researchers* (London: Sage Publications, 2003), hlm. 32.

³⁹ W. Laurence Neuwman, *Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approaches*, 5th ed, (Boston: Allyn and Bacon, 2003), hlm. 14.

seperti jurnal, artikel internet, majalah, maupun surat kabar yang membahas mengenai politik Rusia pada masa pemerintahan Vladimir Putin terutama pada Pemilihan Duma tahun 2003-2007.

Penelitian dilakukan dengan melakukan pengolahan data-data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan analisa dari fenomena Partai United Russia di Federasi Rusia. Dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah karya yang memberikan manfaat bagi yang membacanya.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan.

Bab ini berisi rancangan penelitian. Bagian ini terdiri dari; latar belakang, permasalahan, kerangka teori, kerangka alur berpikir, asumsi, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini pula digambarkan mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kemenangan dan dominasi Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003-2007.

Bab 2 Transisi Demokrasi Rusia

Bab ini akan memaparkan mengenai transisi demokrasi yang terjadi di Rusia. Bab ini dibagi dalam 3 sub-bab yaitu sub-bab pertama yaitu mengenai kejatuhan sistem komunis pada masa Mikhail Gorbachev, sub-bab kedua akan membahas transisi demokrasi pada masa Boris Yeltsin. Sub-bab ketiga mengenai partai United Russia. Pada Sub-bab keempat membahas mengenai kepemimpinan Presiden Vladimir Putin pada periode 2000-2008. Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai *managed democracy* yang diterapkan pada masa pemerintahan Putin.

Bab 3 Reformasi Insititusi Pemerintahanan Daerah dan Pemanfaatan Birokrasi

Bab ini akan memaparkan mengenai rekrutmen dan pola patrimonial yang terjadi pada aparatur negara atau birokrasi pada masa Vladimir Putin. Pada Subbab pertama yaitu dijelaskan bagaimana Vladimir Putin mengubah aturan

pemilihan Gubernur di daerah dan menggantinya dengan penentuan oleh Presiden. Hal ini membawa pengaruh terhadap semakin banyaknya Gubernur dan kepala daerah yang masuk dalam Partai United Russia dan berakibat juga semakin bertambahnya birokrasi daerah yang masuk ke dalam partai ini. Pada Subbab kedua yaitu sistem patrimonial yang terjadi pada aparat negara atau birokrasi di Rusia.

Bab 4 Pembatasan Media dan Pemanfaatan Media untuk Partai United Russia

Bab ini akan dibagi ke dalam tiga subbab. Subbab pertama menjelaskan mengenai transformasi media di Rusia. Semenjak jatuhnya Uni Soviet di tahun 1991, Rusia mulai mengalami kebebasan pers. Namun seiring dengan perubahan yang terjadi di Rusia, media diambil alih oleh para pemilik modal yang mempunyai berbagai kepentingan bagi penguasa. Hingga pada akhirnya, media diambil alih oleh negara pada masa Vladimir Putin. Selain itu dalam subbab ini dijelaskan juga mengenai pengambilalihan salah satu media swasta besar oleh negara. Pada Subbab kedua menjelaskan media di masa pemerintahan Vladimir Putin. Hal ini terkait pembatasan yang dilakukan oleh Putin melalui media cetak dan elektronik. Termasuk di dalamnya kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap pada jurnalis yang memberitakan hal-hal yang tidak disukai Kremlin. Pada subbab ketiga yaitu media dan pemilihan umum. Subbab ini menjelaskan mengenai transformasi peran media dalam pemilihan umum. Semenjak terjadi perubahan struktur kepemilikan saham media elektronik dan cetak, membuat negara dapat mengontrol sepenuhnya media di Rusia terutama stasiun televisi. Penguasaan negara dalam media juga digunakan dalam kampanye United Russia. Sedangkan bagi partai-partai lain terjadi ketimpangan pemberitaan di media, baik media elektronik maupun media cetak.

Bab 5 Perubahan Sistem Pemilihan Umum dan Aturan Partai Politik

Bab ini akan menjelaskan mengenai perubahan Sistem Pemilihan Umum dan aturan Partai Politik yang dilakukan oleh Vladimir Putin dan mendapat persetujuan dari legislatif.

Bab ini terdiri dari dua subbab. Pada Subbab pertama berisi perubahan sistem pemilihan umum. Perubahan sistem pemilihan umum dari sebelumnya dengan menggunakan sistem paralel campuran (*the parallel mixed system*) berubah menjadi sistem proporsional. Subbab kedua yaitu perubahan aturan partai politik. Perubahan aturan tersebut termasuk jumlah anggota dan pendanaan partai.

Bab 6 Dominasi Partai United Russia Pada Pemilihan Duma tahun 2003-2007

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai strategi-strategi yang dilakukan oleh Vladimir Putin dalam mendukung dominasi partai United Russia dan juga implikasinya terhadap transisi demokrasi di Rusia. Pada sub-bab pertama akan dibahas mengenai penerapan strategi politik Vladimir Putin dalam Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Subbab ini akan menjelaskan kembali mengenai strategi-strategi yang dilakukan oleh Vladimir Putin dalam membantu dominasi partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Pada sub-bab ini juga dibahas alasan Vladimir Putin mendukung Partai United Russia.

Pada Sub-bab kedua dibahas mengenai implikasi penerapan strategi politik Vladimir Putin tersebut terhadap proses transisi demokrasi di Rusia. Dengan menggunakan kerangka teori dari Juan J. Linz dan Alfred Stephan, transisi demokrasi di Rusia akan dilihat dalam tiga dimensi yaitu; dimensi masyarakat politik (*political society*), dimensi civil society, dan dimensi aparatur negara (*state apparatus*). Dalam dimensi masyarakat politik, akan melihat struktur kekuasaan yang elitis sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Alan Ball dan Guy B. Peters. Sedangkan dari dimensi *civil society* akan melihat bagaimana pembatasan media melalui pengambilalihan media oleh negara. Dimensi aparatur negara, dengan melihat dukungan para pejabat pemerintahan daerah dan birokrasi terhadap partai United Russia.

Bab 7 Kesimpulan

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang memberikan penegasan kembali permasalahan yang telah dibahas dan dalam tesis ini. Selain itu, juga memberikan jawaban atas pertanyaan permasalahan yang sebelumnya telah diajukan pada bagian awal.

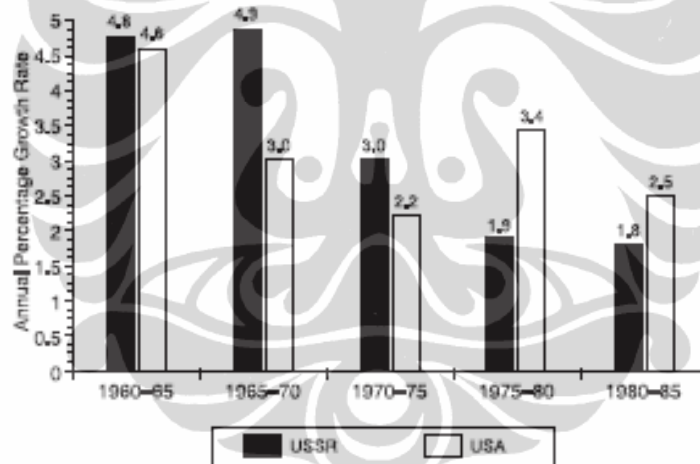


BAB 2 TRANSISI DEMOKRASI DI RUSIA (1991-2008)

2.1 Uni Soviet Pada Masa Pemerintahan Mikhail Gorbachev

Diawali pada Maret 1985, Majelis Tinggi Uni Soviet memilih seorang tokoh muda yang membawa pengaruh bagi warga Soviet dan bagi seluruh dunia yaitu Mikhail Gorbachev. Gorbachev merupakan tokoh paling muda yang pernah memimpin Partai Komunis dalam sejarah Uni Soviet. Namun pada awal masa kepemimpinan Gorbachev, Uni Soviet sedang mengalami stagnasi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Stagnasi yang terjadi membawa Uni Soviet dalam keterpurukan.⁴⁰

Grafik 2.1
Perbandingan *Gross National Product* antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat tahun 1960-1985



Sumber: David M. Kotz dan Fred Weir, *Russia's Path From Gorbachev to Putin: The Demise of Soviet System and The New Russia* (London: Routledge, 2007), hlm. 42.

Dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat. Bahkan dalam lima belas tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi Soviet telah menurun hampir setengahnya dan pada awal tahun 1980-an mencapai tingkat yang hampir menyamai stagnasi ekonomi.⁴¹

Keadaan Rusia yang semakin terpuruk membutuhkan perbaikan secepatnya. Oleh karena itu, Gorbachev berupaya untuk mencari solusi dan

⁴⁰ A. Faharurodji, *Russia Baru Menuju demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 168.

⁴¹ Abraham Ascher, *Russia: A Short Story* (Oxford: OneWorld Publication, 2002), hlm. 224.

alternatif dari permasalahan yang sedang melanda Uni Soviet. Gorbachev telah melakukan diskusi dengan beberapa tokoh penting Uni Soviet dan hal tersebut dilakukan jauh sebelum ia terpilih menjadi pemimpin Partai Komunis. Dalam rapat paripurna pertama dalam kepemimpinannya, ia mengumumkan untuk menetapkan *perestroika* (atau restrukturisasi) dalam pemerintahan Soviet. *Perestroika* merupakan sebuah program yang sangat mendesak yang harus dilakukan. *Perestroika* adalah sebuah restrukturisasi untuk mengantisipasi proses stagnasi dan kelumpuhan total dengan menciptakan mekanisme percepatan yang efektif bertumpu pada kinerja dan karya nyata masyarakat, pada perkembangan demokrasi dan keterbukaan.⁴²

Penerapan *perestroika* tidak dapat dipisahkan dari penerapan demokratisasi dalam masyarakat dan pemerintahan Uni Soviet. Menurut Lenin, sesungguhnya sosialisme dan demokrasi tidak dapat dipisahkan.⁴³ Dalam prinsip sosialisme ditekankan bahwa dari masing-masing sesuai kemampuannya, kepada masing-masing sesuai pekerjaannya dan berupaya untuk menegaskan keadilan sosial bagi semua, hak yang sama bagi semua, hukum yang sama bagi semua, jenis disiplin yang sama bagi semua, dan tanggung jawab bagi masing-masing.⁴⁴

Selain itu, Gorbachev mengeluarkan kebijakan *glasnost* (keterbukaan) dalam program *perestroika*-nya. *Glasnost* dianggap penting untuk dilakukan karena pada pemerintahan Uni Soviet, negara memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap masyarakat dan pemerintahan. Selain itu, masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan. Keadaan negara yang sangat tertutup terhadap kritik dan tekanan dari masyarakat menjadikan negara menjadi lemah.⁴⁵ *Glasnost* telah mendorong pemerintahan untuk lebih transparan dalam informasi kepada masyarakat, terkait kebijakan yang diambil, dan tindakan yang dilakukan. Kebijakan *glasnost* telah mendorong masyarakat untuk mengkritik dan memberikan suara atas ketidakpuasan di berbagai bidang,

⁴² Fahrurudji, *Op. cit.*, hlm. 173.

⁴³ Mikhail Gorbachev, *Gorbachev: On My Country and the World* (New York: Columbia University Press, 2000), hlm. 15.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 14

⁴⁵ Michael McFaul, *Russia's Unfinished Revolution* (New York: Cornell University Press, 2001), hlm. 36.

seperti ekonomi, sosial, dan politik.⁴⁶ Dengan demikian, kritik dan saran dari masyarakat akan memberikan masukan dan akan semakin memperbaiki keadaan Uni Soviet.

Dalam menerapkan reformasi ekonomi, Gorbachev menekankan kepada dua poin penting, yaitu *uskronie* (percepatan atau akselerasi) dan *khozaeschet* (otonomi kepada perusahaan).⁴⁷ *Uskronie* merupakan percepatan dalam bidang ekonomi, masyarakat diharapkan untuk bekerja keras agar produksi ekonomi semakin meningkat. Sedangkan pemberian otonomi kepada perusahaan untuk mengatur dan mengoperasikan kegiatan ekonomi sendiri, seperti menentukan harga, upah, dan target produksi yang dihasilkan. Sehingga tidak lagi sepenuhnya diatur oleh negara. Dengan kata lain, negara memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengatur perusahaan sendiri.

Sedangkan reformasi politik yang dilakukan Gorbachev, ia melakukan perubahan dalam beberapa bidang, antara lain membangun masyarakat sipil dari bawah terkait dengan konsep keterbukaan yang dilakukan oleh Gorbachev. Masyarakat diberikan kebebasan dalam bidang media dan organisasi untuk memberikan saran, kritik, dan pendapatnya mengenai negara. Sehingga dapat menjadi masukan kepada negara untuk menjadi lebih baik lagi. Selain itu, Gorbachev melakukan pemisahan Partai dan Negara. Gorbachev menginginkan agar negara menjadi merdeka tanpa dikontrol kekuatan dari partai. Kebijakan lain yang dibuat Gorbachev adalah memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini dilakukan agar presiden lebih memiliki kekuasaan dan kebebasan untuk menentukan pemerintahannya. Selama ini presiden berada dalam posisi yang lemah, sebagai pihak yang diberi mandat oleh rakyat, presiden sebenarnya memiliki legitimasi untuk dapat memerintah dengan kekuasaan yang lebih besar.⁴⁸

Mikhail Gorbachev dan kelompoknya berhasil mentransformasi sistem negara sosialis yang tidak demokratis, tersentral ke sistem sosialisme demokratik. Dengan melakukan hal tersebut mereka berharap akan memunculkan potensi yang terpendam dari sistem sosialis. Namun untuk mendemokratisasi suatu sistem yang tidak demokratis harus menghadapi suatu pertarungan politik. Perubahan sistem

⁴⁶ Alkatiri, *Op. cit.*, hlm. 67.

⁴⁷ McFaul, *Op. cit.*, hlm. 41.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 46-53.

ini harus mendapat dukungan dari publik yang selama beberapa generasi telah dikontrol oleh negara. Proses politik yang dihasilkan dapat berbeda arah dari yang diinginkan oleh pemimpin kelompok reformis.⁴⁹

Semenjak tahun 1985 hingga 1991 terjadi pertarungan politik di Uni Soviet. Hal ini diakhiri dengan kekalahan dan kehancuran Partai Komunis, runtuhnya sistem negara sosialis, dan runtuhnya negara Uni Soviet itu sendiri. Pertarungan ini semakin kompleks dengan sistem satu partai Soviet. Pertarungan terjadi di dalam Partai Komunis. Pertarungan ini terjadi juga di media massa untuk mempengaruhi opini publik. Fenomena ini juga menjadi perdebatan pada jurnal akademik dan konferensi, para intelektual mendebatkan arah reformasi politik dan ekonomi. Juga terjadi pada kampanye pemilihan umum dimana sejumlah kandidat adalah anggota Partai Komunis dan sedikit kandidat memiliki program yang jelas. Pertarungan juga terjadi di jalanan saat demonstrasi massa dan boikot menjadi hal yang biasa pada masa Gorbachev.

Saat tahun-tahun Perestroika, gerakan oposisi secara gradual berkembang di Uni Soviet, dan Boris Yeltsin muncul sebagai pemimpin yang tidak sulit ditandingi. Gerakan oposisi ini muncul tahun 1989 ketika pemilihan umum pertama dilaksanakan. Gerakan ini melahirkan sejumlah organisasi penting, seperti *Interregional Group of Deputies* dan *Democratic Russia*, tetapi tidak ada satupun organisasi besar yang muncul saat Uni Soviet.⁵⁰

Tepatnya, gerakan oposisi yang dipimpin oleh Yeltsin tidak dapat ditentukan sebagai babak awal pertarungan politik. Tema yang dimunculkan antara lain adalah demokrasi, kebebasan individu, dan reformasi ekonomi. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan pro-demokrasi. Namun, mereka gagal dalam memisahkan diri dari arah kebijakan yang dibuat oleh Gorbachev. Dibawah kepemimpinan Gorbachev, suatu demokratisasi yang signifikan terjadi di Soviet. Seperti yang terjadi pada Oktober 1990, Uni Soviet telah menciptakan institusi keterwakilan legislatif, menghilangkan hak konstitusi Partai Komunis untuk berkuasa, mengadopsi aturan yang memberikan status yang sama bagi semua partai politik, dan mengakhiri monopoli Partai Komunis pada media berita.

⁴⁹ David M. Kotz dan Fred Weir, *Russia's Path From Gorbachev to Putin: The Demise of Soviet System and The New Russia* (London: Routledge, 2007), hlm. 42.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

Gerakan oposisi memainkan peran dalam menekan reformasi tersebut, tetapi mereka melanjutkan untuk tetap beroposisi terhadap Gorbachev.⁵¹

Hal yang menjadi ketidaksetujuan Yeltsin dan pendukungnya beroposisi terhadap Gorbachev hingga terakhir adalah komitmen Gorbachev untuk mereformasi dan demokratisasi sosialisme, daripada menggantinya dengan kapitalisme. Setelah Yeltsin dan pendukungnya mengambil alih kekuasaan di Federasi Rusia pada akhir 1991, tidak terdapat perubahan dramatis dalam pembangunan institusi demokrasi atau menjamin kebebasan individu, karena hal tersebut sudah dilakukan pada akhir periode Soviet. Perubahan signifikan yang terjadi setelah Desember 1991 adalah pemerintahan, dibawah kepemimpinan Yeltsin dan gerakannya ia membuat program yang bertujuan untuk mentransformasi sistem sosial-ekonomi Rusia secara cepat dan radikal.

Pemerintahan Yeltsin berusaha untuk secepatnya mengeliminasi elemen tersisa dari sistem sosialis dan menciptakan basis bagi sistem kapitalis. Sementara Yeltsin dan pendukungnya mendukung demokrasi dan kebebasan individu, pada akhirnya hal yang mereka perjuangkan adalah keinginan untuk mengganti sistem Soviet dengan sistem kapitalis yang sama dengan negara barat. Tujuan ini yang membedakan mereka dengan keinginan Gorbachev untuk membangun demokrasi sosialisme dan sistem sosialis yang dapat dibangun dengan sejumlah perubahan kecil. Dalam pandangan ini, tampak bahwa gerakan Yeltsin menuju pada koalisi pro-kapitalis karena keinginan kuat untuk membawa kapitalisme sebagai ideologi yang menentukan, dan koalisi karena gerakan sangat dinamis dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Soviet. Tidak semua suporter aktif dari gerakan ini memahami tujuan dari kapitalisme. Namun pada akhir 1980an gerakan ini lebih menekankan pada program privatisasi bisnis dan pasar bebas, dan ketika Yeltsin berkuasa ia segera membangun sistem sosial ekonomi yang dipandang orang sebagai sistem kapitalis.⁵²

Program reformasi Mikhail Gorbachev perestroika menciptakan kondisi yang menumbuhkan koalisi pro-kapitalis, yang akhirnya dianggap sebagai pemenang dari pertarungan bagi arah masa depan bagi masyarakat Soviet. Mereka memenangkan pertarungan karena ia dapat menyatukan, terutama dalam

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 58.

⁵² *Ibid.*, hlm. 59.

perubahan realitas institusi pada sistem Soviet, mendapat dukungan dari masyarakat yang aktif dalam perjuangan bagi perubahan sosial.⁵³

2.2 Demokrasi Liberal di Rusia Masa Kepresidenan Boris Yeltsin

Pada awal kepemimpinan sebagai persiden selepas dari Uni Soviet, Boris Yeltsin berupaya untuk melakukan perubahan dari sistem yang digunakan. Sistem yang semula berbasis kepada komunis dan kini akan diganti dengan basis demokrasi. Pada tahapan inilah Yeltsin berupaya untuk melakukan transisi demokrasi di Rusia. Dalam upaya untuk melakukan transisi demokrasi di Rusia, Yeltsin menekankan kepada reformasi ekonomi dan politik.⁵⁴

Untuk memperbaiki keadaan perekonomian Rusia, Yegor Gaidar-menjabat sebagai Deputy Pertama Presiden, menyarankan untuk melakukan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi yang dilakukan dengan menerapkan model Terapi Kejut. Penyebutan Terapi Kejut disebabkan pemerintah Rusia dipaksa untuk menyelesaikan privatisasi dalam periode waktu 500 hari.

Model Terapi Kejut dan privatisasi merupakan sebuah model yang diadaptasi dari upaya Polandia untuk memperbaiki perekonomiannya ditahun 1990 dan kemudian juga diterapkan di Ceko. Di kedua negara tersebut, program ini dapat dikatakan cukup memberikan hasil yang baik. Model Terapi Kejut ini menekankan kepada beberapa hal penting, seperti (1) pengurangan drastis anggaran belanja, termasuk subsidi konsumsi, (2) kenaikan suku bunga untuk membatasi kenaikan kredit, (3) tingkat pertumbuhan yang tetap terhadap dollar AS, (4) liberalisasi perdagangan luar negeri, (5) stabilisasi makro ekonomi, melakukan tindakan untuk membatasi nilai defisit anggaran, mengurangi jumlah persediaan uang, membangun nilai tukar uang yang seragam untuk mengembangkan sistem moneter yang baru berdasarkan kepada mata uang yang konvertibel, serta menstabilkan harga-harga, dan (6) melakukan swastanisasi.⁵⁵

Penerapan kedua model tersebut dapat dikatakan mengalami kendala. Dalam upaya untuk melakukan liberalisasi harga, pemerintah menghilangkan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Marshall I. Goldman, "The Russian Transition to the Market: Success or Failure?" dalam Yizhak Brundy, Jonathan Frankel, Stefani Hoffman (ed.), *Restructuring Post-Communist Russia* (Cambridge, Cambridge University Press, 2004), hlm. 119.

⁵⁵ Alkatiri, *Op. cit.*, hlm. 89-90.

kontrolnya atas harga barang-barang kebutuhan dasar masyarakat dan akibatnya harga meningkat dengan drastis.⁵⁶ Peningkatan harga yang drastis diiringi dengan kemampuan daya beli masyarakat, akibatnya kebutuhan hidup masyarakat yang mendasar kurang dapat terpenuhi.

Selain itu, merubah kebiasaan masyarakat tidak bisa dilakukan dengan cepat atau terburu-buru. Masyarakat Rusia yang selama beberapa dekade hidup dalam sebuah sistem yang membatasi kehidupan masyarakat, kreativitas, serta kemandirian masyarakat, dalam seketika sistem tersebut berubah sehingga masyarakat diberikan kebebasan untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat mengakibatkan tidak semua masyarakat dapat bersaing dan berusaha. Pada masa pemerintahan Boris Yeltsin terjadi peningkatan tingkat pengangguran dan menurunnya tingkat taraf hidup masyarakat.⁵⁷

Masalah lain yang muncul dari liberalisasi yang dilakukan oleh Presiden Yeltsin adalah munculnya kelompok oligarkh.⁵⁸ Sebagai pendukung finansial kampanye Yeltsin dalam pencalonannya sebagai kandidat presiden yang kedua kalinya, posisi *oligarkh* semakin kuat.⁵⁹ Bahkan pemerintah pada umumnya tidak bisa lagi mengontrol *oligarkh*. Negara menjadi lemah dan kehilangan kontrol atas perusahaan swasta yang menguasai kekayaan alam. Di sisi lain, *oligarkh* hanya sedikit membayar pajak. Bahkan banyak pebisnis yang tidak membayar pajak sama sekali. *Oligarkh* Rusia memiliki bisnis dari kekayaan negara yang justru membuat negara mengalami kebangkrutan. Mereka semakin ditakuti karena tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan bagi siapa saja yang menghalangi bisnis mereka. Pada negara dengan kelangkaan sistem hukum dan disaat reformasi

⁵⁶ G.D.G Murrell, *Russia's Transition Democracy: An Internal Political History, 1989-1996*, (Brington : Sussex Academic Press, 1997), hlm. 95.

⁵⁷ Alkatiri, *Op. cit.*, hlm. 16-17.

⁵⁸ *Oligarkh* adalah sebutan untuk kelompok konglomerat yang diuntungkan akibat privatisasi di Rusia pada masa pemerintahan Boris Yeltsin. Mereka berkuasa atas aset-aset strategis negara, seperti minyak, gas, dan sumber-sumber vital lainnya. Keistimewaan yang didapat *oligarkh* pada masa pemerintahan Yeltsin membuat negara hampir kehilangan kontrol atas kegiatan para *oligarkh*. Kelompok ini mengalami kemunduran pada masa Putin seiring dengan reformasi ekonomi yang dilakukannya; bersumber dari Vladimir Shlapentokh dan Joshua Woods, *Contemporary Russia as a Feudal Society: A New Perspective on the Post-Soviet Era* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hlm. 12.

⁵⁹ Lilia Shevtsova, *Yeltsin's Russia: Challenges and Constraint* (Moscow: CEIP Moscow Centre, 1997), hlm. 20.

sedang terjadi, perlindungan kepemilikan rapuh, negara lemah dan tak mampu memberi perlindungan, maka cara lain seperti praktik mafia bermunculan.⁶⁰

Pada akhirnya kebijakan liberalisasi ekonomi ini mengakibatkan krisis ekonomi Rusia. Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Rusia menurun drastis hingga mencapai -5%.⁶¹ Krisis yang terjadi di Rusia di awal kelahirannya disebabkan oleh kesalahan dalam penataan ekonomi di bawah Yeltsin. Perekonomian Rusia selama masa transisi masih terlalu rentan untuk penerapan sistem kapitalisme, apalagi penerapan tersebut dalam waktu yang begitu cepat dan tidak dilakukan dengan bertahap. Kegagalan yang terjadi ini juga disebabkan karena adanya kebebasan individu yang terbuka sehingga negara tidak dapat mengontrol individu karena mereka punya hak yang sama. Hal inilah yang memunculkan kelompok *oligarkh* yang mendapat keuntungan dengan penjualan perusahaan-perusahaan milik negara. Kegagalan ini selain disebabkan oleh liberalisasi yang dilakukan oleh Yeltsin juga disebabkan oleh peran masyarakat yang pasif dalam menanggapi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para elit politik. Sejarah bangsa Rusia yang akrab dengan sistem otoritarian menyebabkan keterkejutan masyarakat terhadap sistem ekonomi liberal yang baru. Selain itu, tidak adanya kekompakan antara kelompok elit pada saat itu dalam membangun suatu sistem yang membawa kemajuan negara turut mempersulit pembangunan ekonomi.

Sedangkan reformasi politik yang ingin dilakukan Yeltsin adalah dengan memperbesar kekuatan dan kekuasaan dari eksekutif sehingga dengan demikian akan lebih mudah untuk menjalankan reformasi ekonomi seperti yang direncanakan.⁶² Dengan kekuasaan besar yang dimiliki oleh Yeltsin sebagai seorang presiden maka ia akan lebih leluasa untuk menjalankan pemerintahan tanpa harus mendapat campur tangan dari parlemen yang seringkali berseberangan dengan Yeltsin.

Dari beberapa hal yang akan direformasi oleh Yeltsin, pada intinya adalah berupaya untuk menghilangkan sistem pemerintahan komunis yang diterapkan

⁶⁰ Saragih, *Op. cit.*, hlm. 47-48.

⁶¹ Marshall I. Goldman, *The Privatization of Russia: Russian Reform Goes Awry* (London: Routledge, 2003), hlm.13.

⁶² McFaul, *Op.cit.*, hlm. 147.

pada masa Uni Soviet. Yeltsin akan melakukan hal itu dengan menggantikan personel dari anggota parlemen yang sebagian besar diduduki oleh anggota dari Partai Komunis Uni Soviet. Setelah Yeltsin berhasil memperbesar kekuasaan eksekutif dan mengganti orang-orang lama dengan orang-orang baru yang lebih reformis maka ia akan mendapat dukungan penuh dan kemudahan untuk menjalankan tujuan utama dari reformasi yang dilakukan.

Pada awal masa pemerintahan Boris Yeltsin, terjadi pertentangan antara kubu reformis dan konservatif. Permasalahan ini kemudian membawa keadaan politik Rusia menjadi tidak menentu. Padahal keadaan politik yang stabil sangat dibutuhkan pada awal berjalannya pemerintahan di sebuah negara yang baru saja mengalami transisi. Permasalahan yang terjadi yaitu terjadi konflik dan pertentangan antara lembaga eksekutif dan legislatif Rusia, terkait dengan perebutan kekuasaan.

Fenomena konflik eksekutif-legislatif yang terjadi pada tahun 1993, membawa Yeltsin untuk menghilangkan posisi wakil presiden dan menggantinya dengan perdana menteri.⁶³ Presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri.⁶⁴ Perdana menteri tidak dapat bertindak diluar jangkauan presiden seperti yang terjadi pada masa sebelumnya, wakil presiden yang seharusnya mendukungnya justru berbalik menyerangnya. Presiden juga memiliki otoritas untuk mengatur mengenai kebijakan dalam dan luar negeri.⁶⁵ Hal itu memperlihatkan bahwa presiden dalam sistem pemerintahan Rusia memang sangat berpengaruh dan memiliki kewenangan serta otoritas yang sangat besar.

Situasi politik Rusia semakin tidak stabil semenjak Yeltsin terpilih menjadi presiden pada Pemilihan Presiden tahun 1996. Tercatat terdapat tiga kali pergantian perdana menteri antara tahun 1998 hingga 1999.⁶⁶ Diantaranya, pada Agustus 1998 diangkat Viktor Chernomyrdin, namun kurang dari sebulan ia memerintah, diganti oleh Yevgeny Primakov. Primakov bertahan selama 6 bulan hingga pada bulan Mei 1999 dan kemudian digantikan oleh Sergei Stepashin.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 213.

⁶⁴ Stephen White, Alex Pravda, dan Zvi Gitelman (ed.), *Development in Russian Politics* (Dunham: Duke University Press, 1997), hlm. 46.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

⁶⁶ Kotz dan Weir, *Op. cit.*, hlm. 267.

Stephasin tidak berkuasa lama karena pada Agustus 1999 ia diganti oleh seorang mantan anggota badan intelejen Rusia–KGB (*Komitet Gosudartvennoy Bezopasnosti*) Vladimir Putin. Putin bertindak sebagai *acting*-presiden Rusia ketika Boris Yeltsin secara tiba-tiba mengundurkan diri Desember 1999. Hingga pada tahun 2000, Putin menjadi presiden Rusia secara resmi melalui pemilihan presiden.

2.3 Partai United Russia

2.3.1 Pendirian Partai Unity dan Pemilihan Duma tahun 1999

Pembentukan United Russia dimulai dengan penggabungan pada tahun 2001, dari dua partai yang sebelumnya bernama Unity (atau dikenal sebagai 'Medved'-Beruang), partai kanan-tengah yang dipimpin oleh Sergey Shoigu, dan Fatherland-All Russia, partai blok kiri-tengah yang dipimpin oleh Yevgeny Primakov dan Yuri Luzhkov. Kedua partai ini pada tahun 2003 bergabung dan bernama Partai United Russia. Pada pemilihan Duma tahun 2003, Partai United Russia berkampanye dengan slogan "Bersama dengan Presiden!" yang mengindikasikan hubungan dekat dengan pemerintahan Vladimir Putin.⁶⁷

Partai United Russia yang sebelumnya bernama Unity, muncul ke politik dengan berada di posisi di nomor urut dua pada Pemilu Duma tahun 1999 dan secara mengejutkan memenangkan Pemilihan Duma tahun 2003. Beberapa pengamat memandang United Russia sebagai partai Kremlin seperti pendahulunya Russia's Choice (1993) dan Our Home is Russia (1995) yang tidak mampu memberikan sejumlah delegasi pada pemilihan Duma sebelumnya sehingga dapat dapat mendukung presiden dalam meloloskan berbagai undang-undang.⁶⁸

Namun menurut analisa Henry E. Hale, Partai United Russia yang berasal dari blok *Unity* memiliki banyak perbedaan dari partai-partai yang didukung oleh Kremlin sebelumnya. Tidak seperti pendahulunya, pada awalnya blok *Unity* tidak untuk memberikan keterwakilan bagi presiden di parlemen tetapi sebagai perangkap bagi partai anti-Kremlin Fatherland-All Russia Party, agar partai ini

⁶⁷ Alexander Kynev, "United Russia: Party of Power" dalam Sabine Fischer (ed.), *Russia Insight from a Changing Country* (Paris: Institute for Security Studies, 2012), hlm. 14-15.

⁶⁸ Cameron Ross, *Local Politics and Democratization in Russia* (New York: Routledge, 2009), hlm. 21.

mendapat suara yang lebih rendah daripada yang diharapkan. Untuk itu, Unity merupakan taktik dalam pemilihan presiden, tidak sebagai proyek partai di parlemen. Kesuksesannya dalam pemilihan Duma, cukup mengejutkan para pendirinya. Kesuksesan partai Unity dalam mengalahkan rival Kremlin Fatherland-All Russia, membuat Kremlin kemudian mengubah Unity menjadi partai yang bertahan lama, dan lebih maju untuk merepresentasikan kepentingan presiden di seluruh wilayah Rusia yang bernama Partai United Russia. Dengan melalui suatu taktik kampanye didukung birokrasi dan timbunan peristiwa yang tidak biasa tanpa diduga menciptakan satu dari dua partai utama di Rusia yang menentukan sistem kepartaian Rusia dari tahun 1999 hingga dekade selanjutnya.⁶⁹

Pendirian partai Unity diawali dari munculnya seorang anti-Kremlin yang bernama Yury Luzhkov. Ketika tahun 1998, Yury Luzhkov merupakan Walikota Moscow dan berusaha untuk membangun partai oposisi yang didasarkan pada sisa-sisa koalisi pemimpin-pemimpin regional, Chernomydin; dan partai politik yang bernama *Our Home is Russia*. Diantara semua pemimpin provinsi, Luzhkov memiliki posisi yang terbaik dan mempunyai kuasa dalam mengendalikan modal-modal administrasi di ibukota. Posisinya sebagai walikota Moscow, menguntungkan Luzhkov, posisinya sebuah posisi yang memiliki visibilitas tinggi dan akses kekuasaan tingkat nasional, bahkan sejak era Soviet.⁷⁰

Semenjak menjadi walikota di tahun 1992, Luzhkov tidak membuang waktu untuk mengkonsolidasikan sumber daya ekonomi terpenting di kota Moscow. Ia terbukti mampu mengatur transisi pasca Soviet, secara efektif mengubah ekonomi kota yang kompleks menjadi suatu *'single-company town'* yang didominasi oleh kelompok *Sistema* yang didirikan sejak berdirinya kota Moscow. Melalui proses privatisasi dan manuver lain, Sistema berhasil menguasai ratusan perusahaan pada tahun 1990an, termasuk sejumlah bank, perusahaan elektronik, outlet media, sistem telepon kota Moscow, kelompok asuransi Rosnao, dan industri pariwisata Moscow. Kelompok Sistema berafiliasi dengan berbagai

⁶⁹ Henry E. Hale, "The Origins of United Russia and Putin's Presidency: The Role of Contingency in Party-System Development" yang bersumber dari situs http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4760/21686_122354.pdf diakses pada tanggal 25 Februari 2012 pukul 13.12 WIB.

⁷⁰ Ora John Reuter dan Thomas F. Remington, "Dominant Party Regimes and Commitment Problems" yang bersumber dari Jurnal *Comparative Political Studies*, Volume 42, Number 4, April 2009, hlm. 515.

bank termasuk Bank of Moscow, bank resmi kota Moscow. Bank ini memiliki 30-40 persen pendapatan kota dan bekerjasama dengan bank lain termasuk Most Bank. Luzhkov secara kreatif menggunakan kewenangannya dalam mengontrol ekonomi kota untuk membangun hubungan dan pengaruh dengan pemimpin-pemimpin sejumlah provinsi di Rusia.⁷¹

Sejak Uni Soviet mengatur wilayah terpusat di Moscow, hampir seluruh komunikasi, transportasi dan infrastruktur ekonomi tidak menjangkau wilayah Rusia lain selain Moscow. Salah satu kemampuan Luzhkov adalah hubungan dekatnya dengan bank terkuat di Rusia, yang hampir semuanya berpusat di kota Moscow, banyak dari bank ini mempunyai hubungan yang penting baik secara langsung maupun tidak langsung dengan wilayah lain di Rusia. Bank Sistema berhasil meraih dukungan nasional setelah krisis ekonomi Rusia tahun 1998. Ketika beberapa bank besar Rusia seperti Menatep dan Inkomband terkena dampak dari krisis ini, Bank milik Sistema, Guta Bank, dan Moscow Bank for Reconstruction and Development, Promradtechbank, dan Sverdlovsky Gubernsky Bank tidak mengikuti pada sistem bank negara. CEO Bank Guta, Artem Kuznetsov menyatakan bahwa banknya tidak berani masuk pasar karena terlalu beresiko. Sumber-sumber ini memudahkan Luzhkov untuk menjadi sumber penting patronase bagi wilayah Rusia yang miskin.⁷²

Penempatan Luzhkov sebagai walikota ibukota juga menguntungkan ia dalam menarik perhatian media massa. Kerjasamanya dengan Kelompok Most membuat ia mendapat pemberitaan positif di media melalui stasiun televisi milik Most, NTV dan publikasi harian Segodnia. Pada Juni 1997, stasiun televisi baru didirikan dibawah kontrol pemerintah kota Moscow. Stasiun televisi ini yang dikenal dengan nama TV Center yang dapat menjangkau sejumlah kota besar saat pemilihan Duma tahun 1999. Selain itu Luzhkov mendapat dukungan dari Moskovskii Komsomolets Rosiia (dibuat Maret 1998) dan Metro (didirikan tahun 1997, distribusikan mingguan dan gratis), serta majalah ilmiah Literaturnaia

⁷¹ Hale, *Loc. Cit.*,

⁷² *Ibid.*

Gazeta. Ia pun mendapatkan kontrol perusahaan percetakan Moskovkaia Pravda, yang memberikan pengaruh dalam percetakan di seluruh wilayah kota Moscow.⁷³

Di akhir 1990an, Luzhkov mulai menentang Kremlin, terutama isu-isu bertemakan nasionalisme. Ia maju menentang pemerintah Russia yang mengakui bahwa Sevastopol, pelabuhan kunci dari Armada Laut Hitam Soviet, merupakan bagian dari Ukraina. Dia meminta dukungan militer Rusia dalam membantu Serbia menghadapi serangan NATO di Kosovo pada awal 1999. Ia mendeklarasikan bahwa reunifikasi perlu antara masyarakat etnis Rusia dan masyarakat ber-bahasa Rusia (rossiiane) di *'near abroad'* dan menjadi tujuan nasional. Ia pun meminta adanya konsolidasi 89 wilayah di Rusia menjadi 10 hingga 13 provinsi, dan meminta agar wilayah-wilayah federal tidak didesain untuk kelompok etnik minoritas seperti Tatars. Luzhkov juga mengkritik Yeltsin, kegagalannya dalam melakukan "shock-therapy" ekonomi dan ia menyatakan privatisasi adalah proses korupsi yang mentransfer aset-aset penting negara kepada kontrol oligarki. Media Pro-Luzhkov, terutama NTV, mempopulerkan kata baru seperti "the Family" dalam menyebut kelompok lingkaran dalam Yeltsin, yang dianggap seperti sindikat mafia. Di tahun 1998, ia mulai mengubah investasinya dalam suatu partai politik yang ia namakan Fatherland.⁷⁴

Pada awalnya, para pejabat Kremlin tidak merasa peduli dan takut dengan kemunculan Luzhkov, semenjak kebanyakan gubernur enggan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seseorang yang mereka lihat sebagai saingan utama dalam mendapatkan pendapatan dan investasi. Keadaan berubah ketika tanggal 17 Agustus 1999, ketika Luzhkov membuat aliansi dengan dua pemain penting lainnya. Tokoh terpenting adalah mantan Perdana Menteri Yevgeny Primakov yang dianggap sebagai politisi Russia paling populer saat itu semenjak ia telah berhasil mengatasi krisis ekonomi tahun 1998, dan perekonomian Rusia semakin membaik tahun 1999. Dipecat secara mengejutkan oleh Yeltsin pada Musim Semi tahun 1999 ia juga diejek oleh partai Komunis. Dengan adanya Primakov, gubernur-gubernur Rusia lainnya semakin ingin bergabung dengan organisasi Luzhkov. Hal ini mengindikasikan aliansi "All Russia" yang terdiri

⁷³ Theodore H. Friedgut, "Potholes on the Road to a Flourishing Russia: Structural Problems in the Second Decade" dalam Brundy, Frankel, dan Hoffman (ed.), *Op. cit.*, hlm. 152.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 184.

dari sejumlah gubernur terkuat Rusia, termasuk Gubernur Tatarstan Shamiev dan Bakhorkortostan Rakhimov, yang memberikan sejumlah dana bagi partai.⁷⁵

Keadaan ini membuat Kremlin waspada. Fakta bahwa semua politisi yang berbeda pendapat bersatu menjadi ancaman bagi seluruh struktur Kremlin. Meskipun Partai Komunis gagal dalam membawa Primakov ke dalam partainya, bahkan Primakov sendiri cukup sendiri yakin mampu memenangkan baik pemilihan Duma melalui partainya maupun pemilihan presiden. Kelompok Yeltsin cukup ketakutan akan peningkatan dukungan terhadap Primakov, apalagi ketika Primakov mengatakan bahwa presiden dapat diadili atas kesalahan yang ia lakukan selama menjabat. Pengadilan terhadap Yeltsin menjadi ancaman nyata bagi The Family dan Kremlin. Kelompok pendukung Yeltsin mulai mengadakan konsolidasi diantaranya, anak perempuan dari Yeltsin, Tatyana Dyachenko, pemilik perusahaan minyak Roman Abramovich, oligarkh Boris Berezovsky, dan kepala administrasi presiden Aleksandr Voloshin, serta menteri kereta api dan deputi pertama perdana menteri Nikolai Aksenenko, dan pejabat lainnya seperti Igor Shabdurasulov dan Valentin Yumashev. Setiap figur ini siap mengeluarkan sejumlah dana untuk mendukung Yeltsin daripada harus diadili oleh kelompok Primakov-Luzkhov jika mereka berkuasa.⁷⁶

Luzhkov merasakan bahaya menekan Kremlin, tetapi ia melihat keuntungan yang dapat didapat dengan menyerang korupsi yang dilakukan oleh Kremlin dan Yeltsin. Namun Luhkov sendiri berusaha untuk membantu Yeltsin agar tidak diadili dalam peradilan, misalnya saja ia mengusulkan agar semua mantan presiden harus menjadi anggota Federation Council seumur hidup, sebuah status yang membuat mereka imun terhadap segala tuduhan kriminal. Banyak dari anggota lingkaran dalam Yeltsin yaitu para pejabat dan penasehat berusaha berbagai cara untuk menjatuhkan dukungan masyarakat terhadap Fatherland-All Russia. Langkah pertama mereka adalah dengan mencoba melemahkan kerjasama dengan para gubernur dengan mengusulkan beberapa opsi kontra-koalisi untuk gubernur, namun gagal pada Agustus 1999. Usaha mereka lebih agresif di musim gugur 1999.⁷⁷

⁷⁵ Reuter dan Remington, *Loc. Cit.*, hlm. 515.

⁷⁶ Hale, *Loc. Cit.*,

⁷⁷ *Ibid.*

Selama musim panas 1999, para pejabat Kremlin memulai serangkaian langkah untuk perang media. Tujuannya bukan hanya untuk kampanye negatif bagi mengurangi popularitas dari Fatherland-All Russia pada para pemilih tapi untuk menghancurkan titik fokus partai ini. Target utama adalah Primakov, tetapi hal ini merupakan strategi Kremlin untuk Luzhkov sehingga mengubahnya menjadi seperti elang laut yang diberi pemberat berbau busuk di leher mantan perdana menteri itu. Primakov adalah target yang sulit dipahami mengingat reputasinya sebagai tokoh yang jujur dan statusnya sebagai "penyelamat nasional" menyusul krisis keuangan Agustus 1998. Kuncinya adalah pertama untuk membuat isu tidak baik bagi pihak asosiasi dekatnya, sang walikota Moskow, dan kemudian secara halus merongrong kewibawaan Primakov sendiri. Para pendukung setia Yeltsin akan membuat masalah dengan tindakan kolektif yang harus dihadapi oleh gubernur, yang pada gilirannya akan memfasilitasi strategi lain Kremlin untuk mencegah mereka bersatu untuk menguasai parlemen Rusia dan presiden.⁷⁸

Inti dari serangan Kremlin terbukti pada penciptaan acara "Sergei Dorenko Show" pada jaringan ORT yang dikuasai negara yang dibuat untuk program analisis terkenal jaringan NTV berita, Itogi. Untuk memahami bagaimana keberhasilan Sergei Dorenko Show adalah, harus dipahami dahulu dominasi acara Itogi yang sebelumnya dinikmati khalayak Rusia. Setiap malam Minggu di akhir 1990-an, masyarakat Rusia beralih ke program ini dari seluruh agama untuk berkomentar di berita, wawancara dengan pembuat kebijakan, dan pertunjukan wayang satir (*Kukly*) yang menampilkan karikatur paling terkenal politisi-politisi Rusia. Status ikonik Itogi begitu besar sehingga meskipun program lain di jaringan ORT, memiliki peringkat berita yang lebih tinggi dan dapat mencapai wilayah yang lebih NTV lakukan, keadaan baru berubah ketika masyarakat memberi perhatian kepada ORT ketika mengumumkan penjadwalan Sergei Dorenko Show. Semenjak Itogi terus melaporkan mengenai dugaan korupsi oleh lingkaran Kremlin dan semenjak pemilik NTV Vladimir Gusinsky merupakan partner dari Luzhkov sebagai kepala kelompok Most, para pengamat memandang

⁷⁸ *Ibid.*

pergerakan ORT merupakan cara yang dapat dilakukan oleh kelompok “Family” Yeltsin yang tidak populer dan dalam menghadapi hegemoni dari Itogi.⁷⁹

The Dorenko Show, langsung menyerang Luzhkov, dan ketika Itogi tidak mampu merespon dengan balasan dengan materi yang sesuai, rating Dorenko terus meningkat. Selama minggu-minggu ketika kampanye, Dorenko, menyerang Luzhkov dengan dugaan korupsi di birokrasi Moscow, hingga kemungkinan Luzhkov terlibat dalam pembunuhan pebisnis Amerika Serikat Paul Tatum.⁸⁰

Acara Dorenko secara mengejutkan sukses dan secara cepat berhasil mengalahkan Itogi dalam pertarungan merebut penonton pada acara analisis berita minggu malam. Para penonton Dorenko Show tidak hanya acara yang menghibur tetapi menjadi sumber informasi yang paling terpercaya. Menurut lembaga survey ROMIR menemukan bahwa acara Dorenko Show menjadi acara program analisa yang terpercaya di televisi Rusia, dipercayai 34% dari seluruh masyarakat Rusia. Hanya 23% yang menganggap komentator acara Itogi dapat dipercaya. Masyarakat pun percaya jika acara Dorenko Show bertindak adil dan netral terhadap semua kandidat.⁸¹

Pihak terdekat Yeltsin memainkan peran utama dalam pembentukan Unity. Sosok Golovkov telah ramai diperbincangkan. Selain juga menjabat sebagai ketua perusahaan asuransi terbesar di Rusia, Golovkov secara jelas mengetahui secara jelas ikatan-ikatan Kremlin, setelah mengepalai aparat pemerintahan Perdana Menteri Gaidar dan telah menjadi kunci dalam pembangunan upaya Rusia sebelumnya baik untuk mendirikan partai kekuasaan sesungguhnya, Russia Choice pada tahun 1993 dan Our Home is Russia tahun 1995 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.⁸²

Sebagian besar upaya pemikiran dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Boris Berezovsky, yang secara konsisten bermain dengan pendekatan baru dalam politik Pemilu. Salah satu dari pendekatan baru ini adalah pembentukan Bloc

⁷⁹ Stephen White, Ian McAllister, dan Sarah Oates, “Media Effects and Russian Election, 1999-2000” yang bersumber dari situs <http://politicsir.cass.anu.edu.au/staff/mcallister/pubs/RussiaTV.pdf> diakses pada tanggal 27 Februari 2012 pukul 15.00 WIB.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Jeffrey B. Gayner, “The Retreat from Reform in Russia” yang bersumber dari situs <http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/12678.pdf> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 14.51 WIB.

pemerintahan yang terdiri dari beberapa penguasa regional Rusia yang paling kuat, misalnya veteran perang Afganistan Aleksandr Rutskoï dari Kursk. Berezovsky mulai menyebut koalisi ini sebagai Muzhiki, yang dapat diterjemahkan sebagai “Real Men” atau “Pemimpin Sesungguhnya”. Salah satu pendukung Berezovski yang paling dekat di pemerintahan, Menteri Perkeretaapian yang cukup berpengaruh, Nikolai Aksenenko, melanjutkan upaya ini dengan beberapa keberhasilan, menargetkan untuk menghapuskan ketua provinsi Fatherland – All Russia. Sementara itu, saat pemerintah selanjutnya memutuskan mereka dapat terus bergerak tanpa *moniker* utama, hasilnya tanpa diragukan lagi adalah Blok Unity.⁸³

Upaya resmi untuk mengatur upaya tersebut adalah Deputy Pertama Administrasi Kepresidenan Igor Shabdurasulov, yang memerintah pada kongres pertama dari gerakan, ia menyangkal adanya dukungan Kremlin atas hal tersebut. Shabdurasulov mengeluarkan keputusan strategis utama bagi Blok dan mengadakan negosiasi atas nama Blok berkaitan dengan kebergabungan dengan gerakan. Sergei Shoigu, yang menjadi pemimpin partai secara formal, juga mengklaim memiliki peran dalam mengarahkan Unity, secara terbuka mengakui dukungan administrasi sekaligus mengklaim dirinya sebagai penggagas. Seorang anggota dari Our Home is Russia, Shoigu telah berupaya untuk bergabung dengan Unity sebagai bagian dari koalisi yang lebih luas dengan partai lamanya, tetapi kemudian ditekan untuk bergabung tanpa Chernomyrdin dan rekan-rekannya. Para penggagas juga kemudian membawa variasi dari mikro-organisasi sebagai *founding partners* atau rekan pemrakarsa sehingga dapat memperendah hambatan birokrasi, tetapi hal ini tidak memiliki peran yang cukup signifikan dalam kampanye atau pengambil keputusan secara organisasional.⁸⁴

Kelompok ini kemudian diatur sedemikian rupa untuk memperoleh tanda tangan pernyataan dukungan dari 39 gubernur pada awal Oktober. Dewan koordinasi yang telah diumumkan pada kongres pembentukan yang diadakan pada 3 Oktober 1999, termasuk beberapa orang Gubernur misalnya Rutskoï dari Kursk, Nazdratenko dari Primorski Krai, Platov dari Tver, Polezhaev dari Omsk, Nazarov dari Chukotka, Gorbenko dari Kaliningrad, Iliumzhinov dari Kalmykia,

⁸³ Hale, *Loc. Cit.*,

⁸⁴ *Ibid.*

dan Nikolaev dari Sakha (Yakutiia). Pada akhirnya, bagaimanapun juga, dari keseluruhan pemimpin eksekutif regional ini, hanya Plativ yang menaruh namanya dalam daftar partai Unity.⁸⁵

Kampanye Unity. Dibentuk selama kurang dari tiga bulan sebelum Pemilu Duma dilaksanakan, para pembentuk Unity harus menempatkan daftar kandidat mereka sesegera mungkin, memberikan mereka suatu karakter yang cenderung tergesa-gesa. Menurut Shabdurasulov, pihak-pihak dipertimbangkan dalam proses inklusi hanya ketika mereka bukan merupakan politisi profesional, dan telah berada di luar pertempuran serta skandal politik utama di masa lalu dan berada dalam posisi yang memiliki kekuasaan tinggi. Ketika Putin tidak secara langsung mendukung Blok, Ia secara mengesankan merangkum pendekatan ini kepada rekrutmen kandidat dalam suatu upaya kepada ketua Pemilu regional: “Kita tidak membutuhkan patriot profesional, tetapi profesional yang patriotik.” Mereka secara agresif mendekati pihak-pihak yang terkenal, mengacu kepada sebuah *troika* yang hampir sepenuhnya baru dalam politik Pemilu.⁸⁶

Shoigu, salah satu menteri Yeltsin yang paling lama sejak 1999, merupakan menteri yang memiliki reputasi tinggi dalam situasi darurat, yang pencitraannya hampir selalu menjangkau para pemirsa televisi sebagai seorang pahlawan yang bekerja untuk megatasi atau berurusan dengan kejadian bencana yang diakibatkan oleh pihak-pihak lain. Ia juga sangat dipercaya dalam lingkaran Kremlin, dipercaya oleh Yeltsin dalam barikade politik selama upaya kudeta tahun 1991 di Uni Sovyet dan tetap menjaga citra politiknya tetap bersih sejak saat itu. Nama kedua dalam daftar adalah Aleksandr Karelin, pegulat Greco-Roman yang berhasil memenangkan berbagai rangkaian medali emas dan merupakan ikon budaya di Rusia. Nama ketiga adalah Aleksandr Gurov, yang dikenal sebagai seorang anti-korupsi dan struktur mafia. Kampanye televisi Unity dapat menyatukan slogan-slogan dan pencitraan kandidat berikut dalam suatu efek yang luar biasa: “Russia must be honest” (Gurov); “Russia must be strong” (Karelin); “Russia must be saved” (Shoigu). Upaya untuk mengerahkan segala upaya ini dilakukan dalam suatu permainan kata yang, dalam bahasa Rusia, menjadi sebuah akronim “MeDvEd” (BEAR). Kampanye tersebut secara utama

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Hale, *Loc. Cit.*,

menekankan pada simbolisme *ursine*, tidak hanya menggunakan *bears* atau beruang dalam iklan-iklan mereka tetapi juga mengirimkan aktivis untuk melakukan kampanye dengan menggunakan kostum seluruh badan atau bahkan menggunakan beruang sungguhan dalam kandang. Tidak satupun dari *troika* Blok, atau satupun dari Unity, yang sesungguhnya merupakan “Putin’s People” atau pendukung Putin, hal ini dikarenakan Putin masih sangat baru dalam Politik dimana Ia tidak memiliki tim intinya sendiri.⁸⁷

Seluruh kandidat lainnya kemudian didelegasikan kembali baik kepada 31 anggota distrik tunggal atau 181 slot dalam daftar partai regional dari perwakilan proporsional yang merupakan separuh dari suara dalam Duma. Kandidat-kandidat tersebut sebagian besar terdiri dari dua jenis pihak. Salah satunya mewakili kekuasaan gubernur. Karena sebagian besar pemimpin regional tidak cukup yakin dengan potensi kesuksesan partai baru, dan kemungkinan merasakan bahwa kemenangan hanya merupakan prioritas kedua, mereka cenderung untuk bergerak kepada fungsionaris dalam level yang lebih rendah atau sedikit pendukung lainnya untuk tempat-tempat dalam daftar tersebut. Tipe lainnya dalam kandidat Unity dapat dikategorikan sebagai “selebri acak” atau *random celebrity*, mulai dari seorang astronot sampai pembawa acara televisi.⁸⁸

Tema kampanye *Unity* memberikan keutamaan pada gaya tetapi juga memasukkan beberapa substansi, setidaknya, kepada suatu kondisi yang juga dilakukan oleh kampanye *Fatherland – All Russia*. Sebagaimana yang diamati oleh Colton and McFaul, “Unity dalam sebuah langkah mengerahkan sebuah sikap daripada program yang konkrit,” menempatkan tidak adanya keyakinan pada konsep abstrak seperti sosialisme atau kapitalisme. Merujuk kepada pernyataan tokoh penting Primorski Krai Yevgeny Nazdratenko, seorang pendukung Unity asli, “Ideologi dari Unity adalah kekurangan yang dimiliki oleh ideologi manapun.”⁸⁹

Di samping arogansi tersebut, pemimpin Unity menekankan beberapa permasalahan penting dalam masa kampanye, terutama yang ditekankan oleh

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Eileen Marie Kunkler, *The Political Club of United Russia: The Incubator of Ideology or Internal Dissent, Tesis* (Ohio: The Ohio State University, 2010), hlm. 31.

Fatherland – All Russia. Sebagian besar secara kritis, hal ini berarti advokasi Fatherland – All Russia atas otonomi regional, sebuah elemen kunci yang menyatukan koalisi gubernur Luzhkov – Primakov. Sekretaris dari Dewan Koordinasi Fatherland – All Russia, terang-terangan dongkol dengan strategi Unity, menyebut kebijakan regionalnya sebagai plagiarisme murni (*pure plagiarism*) dan mencela upaya mereka sebagai tindakan yang akan membingungkan pemilih dan mengalihkan dukungan suara dari partainya. Unity bahkan bergerak lebih jauh dalam mengadaptasi ambiguitas Fatherland – All Russia dalam isu federalisme. Dalam salah satu sambutannya, Shoigu menyatakan bahwa gubernur secara jelas butuh untuk mengimplementasikan kebijakan federal dengan lebih patuh tetapi memermanis pil pahit ini dengan menyerukan upaya penghapusan Pemilu dalam seluruh tingkatan di bawah gubernur. Landasan utama lainnya yang disebutkan secara publik oleh Shoigu selama kampanye mencakup tindakan keras di Chechnya, oposisi terhadap pembatasan aliran modal, dukungan atas sistem presidensialisme, dan penghapusan sistem pemberian daftar-partai dalam Duma.⁹⁰

Di antara keberadaan isu-isu tersebut, bagaimanapun juga, hanya sedikit penekanan pada ekonomi pasar bebas yang mana hal tersebut bertentangan dengan Fatherland – All Russia. Seiring dengan upaya untuk meningkatkan dukungan kepada gubernur yang pada dasarnya menandatangani surat dukungan kepada Unity, Shoigu mengunjungi banyak provinsi yang diperintah oleh pendukung All Russia, termasuk Ingushetiia, Tatarstan, Bashkortostan, dan St. Petersburg. Pemimpin formal Unity seringkali menghadirkan Presiden Tatarstan Shaimiev dengan suatu penghargaan yang berbeda dari kementriannya. Shoigu juga mengadakan upaya khusus untuk memenangkan dukungan gubernur-gubernur yang sebelumnya merupakan bagian dari partai Our Home is Russia baik melalui paket wisata maupun kampanye telepon.⁹¹

Hampir sepanjang musim gugur, upaya perekrutan gubernur menemui sedikit keberhasilan. Sebagaimana telah disnutkan diatas, hanya satu gubernur yang meminjamkan namanya kepada daftar Blok untuk kompetisi representasi-proporsional (*proportional-representation*) (PR), Tver's Platov, dan hanya satu

⁹⁰ Hale, *Loc. Cit.*,

⁹¹ Kunkler, *Op. cit.*, hlm. 59.

wilayah lainnya, Kursk, yang menginvestasikan jumlah perwakilan administrasi secara cukup signifikan. Bahkan tidak terdapat wakil gubernur diantaranya. Perwakilan dari wewenang negara bagian regional yang muncul dalam daftar PR partai Unity sebagian besar adalah pejabat pada *raion* sub-regional atau tingkat pedesaan. Hal ini menunjukkan volume ketika untuk bagaimana gubernur-gubernur di blok ini memiliki prospek politik dan cukup konsisten dengan interpretasi bahwa Bloc tidak dianggap oleh para gubernur memiliki tujuan utama untuk menang tetapi untuk menghambat kinerja Fatherland – All Russia.⁹²

Ketika karir politik Putin mulai meningkat pada bulan November, fondasi dari strategi kampanye Unity adalah dukungan Putin untuk maju sebagai Presiden Rusia yang baru. Shoigu menekankan bahwa tujuan utama adalah untuk memenangkan sejumlah kursi yang besar dalam fraksi Duma untuk mendukung Putin melalui Duma, meskipun dengan sangat hati-hati ditekankan bahwa Unity bersikap pro-pemerintah (menyiratkan Putin), dan tidak pro-Kremlin (menyiratkan Yeltsin). Putin, yang popularitasnya jauh melebihi Unity pada bulan Oktober dan November 1999, secara perlahan menjauhkan dirinya dari blok selama periode tersebut karena Putin tidak meyakini bahwa Unity akan mengalami kesuksesan.

Pada akhir Oktober 1999, presentase dari pemilih yang menyatakan akan memilih Unity menggantung pada angka sekitar 5 persen dari ambang batas untuk kompetisi daftar-partai. Secara jelas, Kremlin berharap dapat mencederai Luzhkov dan Primakov dengan menunjukkan kinerja buruk partai mereka. Para pendukung Putin justru mengalami kekhawatiran bahwa mereka akan dicerai juga ketika mendukung suatu partai, kemudian partai yang didukung memperlihatkan kinerja yang mengecewakan, sebagaimana kekuasaan partai di masa lalu melemahkan pemimpin-pemimpin mereka. Selain itu, Putin sangat disukai oleh masyarakat luas, dan para ahli strategi Kremlin yang memiliki reputasi tinggi meyakini bahwa dengan menempatkan posisinya di belakang salah satu partai, Putin akan mengalienasi beberapa pihak pendukungnya. Pada pertengahan November, hasil poling secara konsisten menunjukkan Unity hanya memperoleh sedikit di atas 5 persen, yang tidak cukup untuk meyakinkan para ahli strategi Putin bahwa partai

⁹² Hale, *Loc. Cit.*,

tersebut bukanlah pecundang. Penasihat-penasihat Putin juga meyakini saat itu bahwa Putin telah mengalami peningkatan yang memadai dalam ketatanegaraan untuk menjadikan Putin sebagai titik fokus yang layak pada pembentukan koalisi gubernur nasional dan jika Putin kembali ke Unity, banyak pemimpin regional akan mengikuti.⁹³

Coup de grace atau tindakan yang mengakhiri penderitaan hadir ketika Putin akhirnya mendukung Unity secara pasti pada televisi nasional pada akhir November 1999. Dengan Shoigu berada di sisinya, Putin menyatakan bahwa “Saya pribadi, sebagai seorang warga negara, akan memberikan suara saya untuk Unity.” Secara cepat Unity mengalami peningkatan, menerbitkan *press release* yang menyatakan bahwa “Unity mendukung Putin dan Putin bergantung pada Unity. Dan hal ini adalah ikatan kemenangan.” Hampir dalam waktu yang sangat cepat, peringkat Unity meningkat drastis, dari 9 persen minggu sebelumnya menjadi 18 persen sesaat setelah pernyataan dukungan tersebut. Ketika para pemilih akhirnya berhasil disatukan, Unity muncul dengan 23 persen, menempatkan Unity di posisi kedua dan hanya tertinggal 1 persentase di belakang Partai Komunis Federasi Rusia.⁹⁴

Hal ini merupakan keberhasilan yang mengejutkan, terutama ketika Shabdurasulov menyatakan fenomena ini sebagai “revolusi” dan “terobosan kolosal”, sekaligus menghadirkan suatu pukulan telak kepada Fatherland – All Russia, yang tertinggal dengan hanya memperoleh 13 persen dari penghitungan kertas suara setelah diproyeksikan akan suatu muncul persaingan yang kuat, jika bukan kemenangan mayoritas, jika mengacu pada musim panas 1999. Hasil 13 persen ini sesungguhnya cukup bagus jika mengacu pada standar dari upaya-upaya sebelumnya untuk memenangkan suara untuk pihak yang mengakui dirinya sebagai kelompok *statist* dan partai *centrist* (terpusat), yang sebelumnya bahkan tidak pernah mencapai ambang batas 5 persen dalam Pemilu Duma. Tetapi dengan ekspektasi sebelumnya, hal ini tidak lain merupakan bencana bagi partai. Ketika Luzhkov telah menyerahkan ambisi presidensialnya sebelumnya pada musim gugur, Primakov melihat tulisan di tembok sesaat setelah Pemilu dan menyetujui

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

untuk bekerja di Duma daripada mencari kantor politik yang lebih tinggi. Hal ini berarti kemenangan presidensial bagi Unity.⁹⁵

2.3.2 Terbentuknya Partai United Russia

Hadirnya *United Russia* sebagai sebuah struktur utama nasional pada periode pertama Putin, seringkali diasumsikan bahwa hal ini merupakan rencana Kremlin untuk membentuk suatu Bloc Persatuan (*Unity Bloc*) pada musim gugur tahun 1999 untuk menandingi Pemilihan Umum (Pemilu) Duma yang akan berlangsung pada tahun tersebut. Bagi sebagian besar pihak, Unity merupakan kelanjutan partai yang didukung oleh Kremlin seperti Partai Pilihan Rusia (*Russia's Choice*), Rusia adalah Rumah Kami (*Our Home is Russia*) dan upaya pendukung Kremlin lainnya untuk mempromosikan partai sebagai institusi pemberi dukungan kepada presiden.⁹⁶

Partai United Russia merupakan partai yang mendapat dukungan dari Kremlin. Didirikan sebagai kombinasi dari Unity dan blok partai Fatherland-All Russia. United Russia didirikan setelah terpilihnya Vladimir Putin sebagai presiden di tahun 2000. Partai United Russia dipandang oleh beberapa pengamat sebagai bukan partai politik yang sebenarnya atau gerakan massa tetapi tidak lebih dari partai yang berisi birokrat dan pembuat kebijakan dengan platform yang tidak jelas serta mempunyai kontrol yang besar dalam media massa. Dengan ambiguitas ideologi politik United Russia telah membawa posisi yang tidak jelas partai ini mendukung pasar bebas dan kontrol ketat negara. Karena kontradiksi tersebut dan ambiguitas posisi di berbagai isu, Seth R. Marshall menganggap partai ini berposisi *centrist*.⁹⁷

United Russia menjadi partai dominan semenjak tahun 2000, tidak terlalu jelas mengapa Kremlin memutuskan untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki untuk mengubah partai kecil, tersentralisasi menjadi partai besar dan dominan, United Russia. Untuk menjawab hal ini, bisa dilihat mengenai partai

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Colton dan McFaul, *Op. cit.*, hlm. 48.

⁹⁷ Seth R. Marshall, "The Peculiarity of Russian Politics: an Authoritarianism, Civic Culture, and the Issue of Election Falsification" yang bersumber dari situs http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/16154/Marshall_Seth.pdf yang diakses pada tanggal 5 Juli 2012 pukul 18.42 WIB.

dominan. Partai dominan berusaha dan bertujuan untuk rezim; partai dominan membantu rezim memenangkan pemilihan umum, mengontrol legislatif dan mengatur konflik elit. Dalam arti lain, keuntungan memiliki partai dominan adalah mengkoordinasi hasil pemilihan umum, memastikan legislatif yang mayoritas dan dapat dibutuhkan, kerjasama dalam menghadapi lawan yang potensial dan mengatur rekrutmen politik. Namun, agar rezim dapat membangun partai dominan, ia harus menghadapi permasalahan komitmen antara pemimpin rezim dengan elit lainnya. Pada satu sisi pemimpin rezim ingin agar elit lainnya masuk ke dalam partai agar memastikan loyalitasnya. Sedangkan elit, tidak mau diikat ke dalam partai tanpa adanya jaminan jika mereka akan mendapat akses yang lebih besar terhadap karier dan sumber daya. Pemimpin dan elit harus membuat konsensus dan kesepakatan untuk membentuk partai dominan untuk menyelesaikan masalah komitmen dan membuat partai kuat. Partai dominan dalam arti lain adalah mekanisme bagi pemimpin untuk mengontrol elit dalam sistem politik.⁹⁸

Dalam konteks Rusia, hal ini penting karena struktur pemerintahan Rusia. Presiden Rusia memiliki kekuasaan untuk memberikan inisiatif undang-undang di Duma atau untuk menjatuhkan legislatif, namun kekuasaan presiden terbatas karena presiden tidak mempunyai kekuasaan untuk mengontrol agenda legislatif. Dalam prakteknya, hal ini berarti bahwa presiden membutuhkan parlemen yang loyal agar undang-undang yang diinginkan bisa lolos. Sehingga jelas, partai dominan dapat menjadi alat yang penting bagi pemimpin di Rusia pada situasi dimana presiden memiliki kekuasaan mengontrol kekuasaan legislatif. Meskipun demikian, keinginan untuk menciptakan partai dominan di Rusia seperti United Russia belum sukses. Terutama pada partai sebelumnya Our Home is Russia yang gagal untuk berkembang menjadi partai dominan karena Yeltsin tidak mau elit lain meningkat posisinya dalam partai. Selain itu, karena Yeltsin gagal menguatkan partai dan mendukungnya, elit menolak untuk bergabung karena mereka tidak ingin karir politiknya melemah dalam partai. Sehingga partai

⁹⁸ Kunkler, *Op. cit.*, hlm. 16.

dominan di Rusia gagal berkembang karena persepsi jika mereka dapat menjadi elit lain atau menciptakan rival tokoh politik baru.⁹⁹

Pada tahun 1999, persepsi ini berubah secara signifikan. Dengan mundurnya Yeltsin dari politik Rusia, elit berusaha untuk mencari pengganti presiden. Kurangnya partai dominan berarti tidak ada orang atau tokoh politik yang jelas untuk mengisi kekosongan. Pemimpin regional mulain mendesak untuk menciptakan partai atau koalisi disekitar figur baru. Seperti yang telah dijelaskan, mereka menciptakan partai baru Fatherland-All Russia dan Unity. Primakov dan Putin menjadi dua figur rival disekeliling kelompok elit. Setelah menjadi presiden di tahun 2000, Putin menciptakan suatu pemerintahan yang stabil sebagai prioritas utama kebijakan sebagai cara untuk mencegah ambiguitas transisi kepemimpinan masa depan. Pembangunan partai politik menjadi keputusan yang strategis. Untuk menghindari personalisasi politik seperti pada masa Yeltsin dengan strategi memecah dan berkuasa, Putin ingin untuk membangun suatu rezim yang stabil dan kuat tidak berdasarkan pada personalitas. Langkah pertama adalah mengembalikan kekuasaan kontrol federal terhadap elit, terutama pada tingkat regional. Memastikan loyalitas elit terhadap pemerintah menjadi salah satu pertanyaan penting pada periode pertama kepresidenan Putin. Namun, hal ini bukan suatu proses yang cepat dan mudah. Setidaknya butuh waktu enam tahun bagi United Russia untuk menjadi partai yang dominan.¹⁰⁰

Cara pertama United Russia dapat menjadi partai yang dominan adalah dengan mengambil keuntungan dari kebijakan dan reformasi sistem pemilihan umum yang diimplementasikan oleh Putin. Mengembalikan sentralisasi kekuasaan, memunculkan diskursus politik baru yang tidak berfokus pada pertanyaan mengenai identitas Rusia, mengembalikan kontrol negara terhadap media, dan merestrukturisasi kompetisi politik dimana empat batu loncatan Putin untuk mencapai rezim yang stabil. Partai politik dapat bermain pada peran penting dalam tiga hal yaitu: mengembalikan sentralisasi kekuasaan, diskursus baru politik, dan kompetisi politik. Terkait fakta ini Putin meminta agar partai bekerja untuk merekrut lebih banyak anggota dari berbagai lapisan masyarakat agar dapat lebih responsif terhadap pemilih. Membangun partai politik nasional penting bagi

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

Putin untuk mencapai prioritas mengembalikan sentralisasi kekuasaan dan menciptakan lingkungan baru bagi politik Rusia, semua untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu penciptaan stabilitas rezim.¹⁰¹

Cara kedua agar United Russia dapat menjadi partai dominan adalah bergabung dengan partai-partai kecil yang lain. United Russia berkembang pada tahun 2000an, meninggalkan akarnya sebagai partai kecil tersentralisasi, Unity. Dengan menyerap beberapa partai politik yang berbeda yang sebelumnya berposisi dan meskipun Kremlin belum memutuskan langkah selanjutnya terhadap Unity, anggota partai mengusulkan ide untuk bergabung dengan Fatherland All-Russia. Vladislav Surkov, elit Kremlin yang berposisi staf dalam administrasi kepresidenan Putin, berargumen bahwa penggabungan dengan Fatherland All-Russia dapat membawa lebih banyak elit dibawah kontrol Kremlin dan membantu partai memastikan kemenangannya pada pemilihan tahun 2003. Kedua partai secara resmi bersatu pada Desember 2001 dan setelah hampir satu tahun bernegosiasi menciptakan partai Unity dan Fatherland-All Russia. Dua partai lain yang bergabung adalah Russia's Region dan People's Deputy. Beberapa berargumen bahwa Unity mampu untuk menyatukan partai-partai ini karena adanya sumber daya; Unity, dengan hubungan dekatnya dengan Kremlin dapat memberikan kesempatan dan akses tidak seperti partai lain. Kekalahan partai Fatherland-All Russia pada pemilihan legislatif tahun 1999 membawa partai ini menakin terpecah, dan membantu Unity untuk mengambil sisa-sisa yang terdapat dalam partai. Kemudian pada tahun 2003, nama partai secara resmi diganti menjadi Partai United Russia (UR). Penggabungan ini membantu Unity memperluas pengaruhnya pada tingkat regional. Dengan bergabung dengan Fatherland-All Russia mengkombinasikan elemen baik dari partai sentral dan regional. Selama kurang dari satu tahun Unity dan Fatherland-All Russia memiliki 87 unit regional, memberikan partai keberadaan yang kuat baik di federal maupun regional.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁰² Jonathan Riggs dan Peter Schraeder, "Russia's Political Party System as a (Continued) Impediment to Democratization: The 2003 and 2004 Presidential Elections in Perspective," dalam Jurnal *Demokratizatsiya* Vol. 13, No. 1 (Winter 2005), hlm. 146.

Perluasan regional penting bagi inisiatif yang ingin diimplementasikan oleh Putin saat itu. Dengan reformasi sistem pemilihan umum yang berarti pengembalian sentralisasi kekuasaan dan untuk memecah independensi dari elit regional. United Russia kemudian menjadi partai pemerintah yang dominan. Ketika reformasi Putin, khususnya dengan mengeliminasi sistem mayoritarian dan penunjukan gubernur regional, menghilangkan kemampuan politisi independen untuk memiliki modal politik, kemampuan Unity saat ini adalah menjadi kendaraan mengontrol elit. Walaupun Unity tidak mengawali sebagai partai dominan, dengan waktu bermetamorfosis menjadi United Russia pada tahun 2003

memiliki tempat dalam tujuan politik Putin yang lebih luas. United Russia menjadi mekanisme utama tidak hanya untuk mendapat dukungan masyarakat, tetapi bagi Kremlin mengembalikan dominasi diantara elit politik. Hal ini penting ketika melihat konteks Rusia dimana presiden memiliki kemampuan terbatas dalam mengontrol agenda legislatif; menciptakan mayoritas dalam legislatif yang loyal terhadap presiden agar kebijakan dapat diloloskan.¹⁰³

United Russia telah menjadi partai dominan sebagai cara bagi Kremlin untuk mengontrol elit politik. Sementara partai telah sukses dalam pemilihan umum, bukti-bukti justru menyarankan bahwa tujuan Kremlin adalah mengontrol elit melalui partai yang juga telah sukses dalam Duma. Kemampuan dalam mengontrol elit adalah hal penting dalam Rusia, dimana konflik antara legislatif dengan eksekutif terkadang terjadi. Partai menjadi instrumen utama untuk mengkoordinasikan kebijakan dalam pembuatan kebijakan. Terkait hal ini Unity dari tahun 1999 hingga 2003 cukup berhasil dan semenjak tahun 2004 United Russia telah melanjutkan untuk memberikan dukungan eksekutif di regional.¹⁰⁴

2.4 Transisi Demokrasi di Rusia pada Pemerintahan Vladimir Putin

Pada pemilihan umum presiden yang diadakan bulan Maret 2000, Vladimir Putin bersaing dengan Genady Zyuganov dari Partai Komunis Federasi Rusia. Mereka berusaha menarik banyak dukungan dengan berbagai cara, salah satunya melalui program kerja. Vladimir Putin menekankan program kerjanya kepada membentuk negara yang lebih kuat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan

¹⁰³ Kunkler, *Op. cit.*, hlm. 29.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

memberantas korupsi, sementara itu, Genady Zyuganov menekankan kepada kenaikan gaji pegawai dan pemotongan pajak.¹⁰⁵ Pada hasil pemilu, Putin dinyatakan memenangkan pemilihan umum tahun 2000 dan terpilih menjadi Presiden Rusia. Putin memenangkan pemilihan dengan memperoleh dukungan sebesar 52.94% dan diposisi kedua diduduki oleh Genady Zyugavov dengan perolehan dukungan sebesar 21.92%.¹⁰⁶ Dengan demikian, sesuai dengan aturan dalam pemilihan umum di Rusia, maka Putin memenangkan pemilihan umum tanpa harus mengadakan pemilihan putaran kedua karena Putin memperoleh dukungan lebih dari 50%. Berdasarkan hasil tersebut, maka Putin terpilih menjadi Presiden Rusia periode 2000-2004.

Putin sukses memenangkan pemilihan umum di tahun 2000 dan menjadi Presiden Rusia selama satu periode pemerintahan (selama 4 tahun). Putin masih memiliki tingkat popularitas yang tinggi di masyarakat. Hal ini terbukti dengan dimenangkannya kembali pemilihan umum presiden pada tahun 2004. Pada pemilihan kali ini, Putin bersaing dengan Nikolai Kharitonov. Putin memenangkan pemilihan umum dengan memperoleh dukungan sebesar 71.31%, sementara itu, diposisi kedua disusul oleh Nikolai Kharitonov dengan perolehan sebesar 13.69%.¹⁰⁷ Kemenangan Putin terjadi karena keberhasilan Putin untuk kembali membangun Rusia menjadi negara yang kuat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Putin juga memperoleh dukungan yang kuat dari Kremlin.

Setelah Putin terpilih sebagai presiden, tidak hanya kekuasaan formal maupun informal dari kepala negara yang diperluas, tetapi yang terpenting adalah, diimplementasikan. Sebagai akibat dari partisipasi dalam politik maka zona kontrol presiden meningkat. Selain itu, komponen tradisional dari pemerintah seperti dewan keamanan dan sekretariat presiden, didukung oleh pemimpin daerah, elit bisnis, Duma dan Dewan Federasi, mayoritas stasiun televisi, Mahkamah Konstitusi, dan sejumlah partai politik: United Russia, People's Party, Party of Life, Fatherland. Presiden mengembalikan kontrol dari wilayah dan menciptakan eksekutif yang tersentralisasi. Biasanya, pengaruh presiden dalam

¹⁰⁵ "Pemilu Rusia dan Para Kandidat", Harian Umum *Kompas*, Minggu, 26 Maret 2000, hlm.1.

¹⁰⁶ Sakwa, *Op. cit.*, hlm.179

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm.182.

sejumlah kelompok dan struktur berbeda-beda, tetapi saat ini terjadi penguatan yang signifikan terhadap kekuasaan presiden jika dibandingkan periode Yeltsin. Hal ini terbukti pada sejumlah kebijakan:¹⁰⁸

1. Pembentukan tujuh federal distrik baru, penunjukan utusan presiden di sejumlah distrik dan dalam struktur kekuasaan presiden yang vertikal, presiden – sekretariat presiden – perwakilan presiden – inspektur federal, yang telah mengubah titik keseimbangan hubungan antara federal dengan regional.
2. Prosedur perekrutan dalam Dewan Federasi (Majelis Tinggi) telah diubah. Perubahan berbentuk pada penunjukan langsung Dewan Federasi yang berasal dari gubernur suatu wilayah. Menurut Midkhat Farukhsin, hal ini membuat federasi (pusat) mengontrol kekuasaan pemimpin regional. Sebagai kompensasi, gubernur diberikan kesempatan lobby baru dalam Dewan Negara. Namun semenjak dewan ini hanya lembaga konsultasi, maka ia tidak mempunyai keseimbangan terhadap kekuasaan presiden.
3. Perubahan hubungan ekonomi antara pusat federal dengan daerah yang menguntungkan federal. Daerah memiliki keterbatasan dan elit politik regional harus meminta bantuan dukungan dari federal untuk mendapatkan tambahan dana dari pusat.
4. Presiden Rusia memiliki hak untuk memecat lembaga legislatif di daerah, dan jika lembaga legislatif menolak nominasi calon gubernur tiga kali atau menolak membuat keputusan segera terhadap permasalahan ini, Presiden Rusia dapat memecat gubernur jika mereka kehilangan kredibilitas, gagal dalam menampilkan tugasnya, sesuai dengan hukum federal. Hal ini menyebabkan elit politik regional dikesampingkan tetapi sebenarnya menjadi bawahan dari Presiden Rusia.
5. Aturan dalam pemilihan gubernur diubah. Saat ini, Presiden Rusia dapat secara langsung ikut campur dalam proses nominasi posisi gubernur yang hanya bisa ditolak oleh parlemen lokal. Langkah ini tidak hanya merusak demokrasi di Rusia tetapi juga mengurangi kekuasaan pimpinan regional yang ditunjuk, hingga saat ini semua langsung tergantung pada loyalitas

¹⁰⁸Stephen White (ed.), *Politics and Ruling Groups in Putin's Russia* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 34-36.

kepada Kremlin. Pembatalan seorang calon gubernur populer oleh Presiden Rusia memodifikasi hubungan kekuasaan di daerah. Sulit untuk mendefinisikan bentuk pemerintahan di Rusia karena pengurangan otonomi daerah dan penambahan kekuasaan federal, sebagai suatu negara kesatuan.

6. Setelah pemilihan Duma tahun 2003, presiden mengamankan Duma dengan keunggulan konstitusional (306 dari 450 kursi), sementara oposisi tidak berdaya. Hal ini membuat majelis rendah parlemen berada dibawah kontrol penuh presiden.
7. Keadaan politik telah dibentuk untuk menyediakan kemenangan bagi partai United Russia pada pemilihan mendatang. Peraturan partai telah diadopsi dengan persyaratan yang lebih keras, ditambah perubahan sistem pemilihan umum yang menghapus sistem mayoritarian.
8. Kasus Yukos bersama dengan sejumlah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Rusia, terutama berhubungan dengan pemilihan gubernur, mengindikasikan bahwa peradilan lebih setuju dengan argumen dari Kremlin. Tidak mengejutkan jika penyebutan Keadilan *Basman*, terefleksi dalam sistem peradilan yang condong mendukung eksekutif. Menurut catatan Lilia Shevtsova, Rusia telah kembali ke rezim kebijaksanaan, segala aturan informal memperoleh yuridifikasi formal.

Pada awal pemerintahan, Putin dihadapkan pada keadaan Rusia yang cukup terpuruk, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian tindakan yang harus dilakukan yang diharapkan dapat membawa Rusia keluar dari keadaan tersebut. Untuk itu, Putin memiliki beberapa langkah untuk memperbaiki keadaan Rusia.

Dalam bidang ekonomi, Reformasi Ekonomi dilakukan oleh Putin. Putin berkeinginan untuk membuat Rusia mampu bersaing di pasar ekonomi dunia.¹⁰⁹ Hal ini dilakukan karena Putin melihat Rusia, dengan sumber daya yang dimiliki, memiliki peluang yang baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui melakukan ekonomi pasar. Dalam bidang ekonomi juga Putin juga melakukan nasionalisasi. Keadaan ekonomi Rusia semakin terpuruk setelah Rusia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Liberalisasi ekonomi dan bantuan pihak asing

¹⁰⁹ John McCormick, *Comparative Politics in Transition* (Canada: Wadsworth, 2004), hlm. 220.

ternyata bukan solusi yang tepat bagi Rusia untuk keluar dari permasalahan krisis. Hal ini terbukti pada masa pemerintahan Yeltsin, perekonomian Rusia tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Sebaliknya melalui liberalisasi dan swastanisasi, memunculkan kelompok *Oligarkh* yang mendominasi kepemilikan dari aset-aset negara yang telah diprivatisasi.

Terkait dengan privatisasi aset-aset vital negara, terutama perusahaan industri, hal ini tidak memberikan keuntungan kepada negara. Peningkatan harga minyak yang terjadi di dunia tentunya akan memberikan keuntungan kepada perusahaan industri minyak. Namun, karena perusahaan tersebut telah menjadi milik swasta maka negara tentunya tidak lagi memperoleh keuntungan yang banyak. Putin melihat bahwa perlu untuk dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan industri minyak dan gas tersebut. Putin menyatakan bahwa, pemerintah harus menjadi pengambil keputusan kepentingan negara bukan oleh mereka yang memiliki perusahaan industri.¹¹⁰ Dengan demikian, maka Putin mencoba untuk mengganti pola bisnis di Rusia dengan menciptakan ketergantungan dari para pebisnis dan pengusaha kepada negara dan pemimpin, melalui nasionalisme. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang memang memberikan keuntungan besar dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Beberapa perusahaan yang dinasionalisasi adalah Yukos, Sibneft, Gazprom, LukOil, dan yang lainnya.¹¹¹

Selain itu, Putin juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan lain, seperti media. Namun, Putin menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah mematuhi undang-undang mengenai penjualan harta kekayaan negara di tahun 1990-an dan mentoleransi perusahaan milik *Oligarkh* yang sejalan dengan kepentingan nasional.¹¹² Melalui hal tersebut, Putin ingin agar semua aspek dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan ekonomi Rusia.

Perbaikan lain yaitu perbaikan sistem pajak. Pajak merupakan pemasukan negara dan seringkali menjadi pemasukan negara yang terbesar, termasuk di

¹¹⁰ Peter Lavelle, "What Does Putin Want?" dalam Jurnal *Current History*, Vol. 103, No. 675, Oktober 2004, hlm. 316

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Peter Lavelle, *Loc.Cit.*, hlm.316

Rusia. Pajak dapat dikatakan sebagai pemasukan pasti yang akan mengisi kas negara. Pemasukan negara dari pajak, terutama perusahaan-perusahaan besar yang ada di Rusia, tentunya akan dapat menambah pemasukan pemerintah. Namun hal itu tidak berjalan dengan baik karena kelompok *Oligarkh* yang memiliki pendapatan dan keuntungan yang besar seringkali melakukan penunggakan dalam pembayaran. Mereka seringkali tidak membayar pajak dan tidak memperoleh tindakan yang tegas dari pemerintah, seperti pada masa Boris Yeltsin. Namun setelah Putin terpilih menjadi presiden, mulai terdapat tindakan yang tegas terhadap kelompok *Oligarkh* yang tidak melakukan pembayaran pajak.

Salah satu contohnya adalah pemerintah menangkap Mikhail Khodorkovsky, pemilik dari perusahaan minyak terbesar di Rusia, Yukos. Pemerintah mengangkat permasalahan penunggakan pembayaran pajak. Mikhail Khodorkovsky dituntut telah melakukan penggelapan pajak dan harus membayar pajak sebesar \$4.5 miliar.¹¹³ Karena ketidakmampuannya untuk membayar, maka perusahaan minyak tersebut diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan aturan pembayaran tarif pajak dari sebelumnya 12-30% menjadi 13%.¹¹⁴ Hal ini dilakukan agar terdapat peningkatan pembayaran pajak. Selanjutnya, pemerintah memonitor dengan ketat pembayaran pajak di Rusia. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi penggelapan pajak yang akan merugikan negara dan mengurangi pendapatan negara.

Dalam bidang politik, Vladimir Putin melakukan berbagai perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh Putin diantaranya, melakukan sentralisasi kekuasaan atau pemusatan birokrasi. Setelah Putin menjadi presiden, ia ingin melakukan sebuah reformasi dalam bidang politik dan birokrasi. Putin ingin kembali memusatkan kekuasaan negara pada pemerintahan pusat. Hal ini dilakukan karena Putin melihat dalam beberapa waktu lalu terjadi pertentangan antara pemerintah regional dan lokal sehingga ingin melakukan resentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik di tangan Kremlin.¹¹⁵ Dengan pemusatan yang dilakukan, maka presiden memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan di

¹¹³ Charles Hauss, *Op.Cit.*, hlm. 228

¹¹⁴ Lynch, *Op. cit.*, hlm. 161.

¹¹⁵ Cameron Ross, *Local Politics and Democratization in Russia*, (New York : Routledge, 2009), hlm. 20.

tingkat regional dan lokal. Putin melihat bahwa demokrasi lokal seringkali menimbulkan tindakan anarkhi sehingga untuk mencegah terjadinya hal tersebut, pemilihan Gubernur haruslah mendapat persetujuan dari presiden.¹¹⁶ Pemusatan kekuasaan dilakukan oleh Putin sebagai usahanya untuk dapat menghancurkan kelompok kepentingan yang independen yang dapat mensabotase kepentingan Kremlin.

Dalam sistem Putin yang baru, maka pemerintah pusat meniadakan pemilihan umum untuk kepala pemerintahan regional dan lokal karena hal ini ditentukan langsung oleh presiden.¹¹⁷ Maka, pemilihan kepala pemerintahan regional-lokal tidak lagi dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh masyarakat melainkan ditunjuk langsung oleh presiden. Setelah kepala pemerintahan dipilih langsung oleh presiden, maka presiden juga dapat mengontrol hal-hal lain yang ada di wilayah tersebut. Terlihat hubungan kekuasaan yang vertikal antara pemerintah pusat-regional, dan lokal. Dengan semakin terkontrolnya pemerintah regional-lokal oleh Pusat, dapat meminimalisir terjadi konflik atau pertentangan kepentingan yang akan mengganggu terciptanya stabilitas.

Kebijakan lainnya yang dibuat oleh Putin adalah pembatasan terhadap media. Media merupakan sarana komunikasi yang berpengaruh di Rusia. Penggunaan media sebagai alat propaganda memang telah berkembang sejak masa Uni Soviet. Sejak saat itu, media memiliki peranan yang penting, baik sebagai media informasi, propaganda, bahkan masuknya nilai-nilai demokrasi. Pada masa pemerintahan Uni Soviet, media berada di bawah kontrol dari pemerintah. Media tidak memiliki kebebasan. Pada masa Gorbachev dan Yeltsin, media mulai dapat mandiri dan memiliki kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan.¹¹⁸

¹¹⁶ “Vladimir Putin Penyelamat Rusia keluar Dari Krisis”, www.antara.co.id/arc/2006/II/28/vladimir-putin-penyelamat-rusia-keluar-dari-krisis/-19k- diakses pada hari Senin, 18 Mei 2012 pada pukul 14.50 WIB.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

¹¹⁸ www.pressreference.com/images/wpre_02_img0459.jpg diakses pada tanggal 14 Mei 2011 pukul 15.45 WIB

BAB 3

REFORMASI INSTITUSI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMANFAATAN BIROKRASI

3.1 Reformasi Institusi Pemerintahan Daerah oleh Vladimir Putin

Semenjak pemilihan Duma tahun 2003, Putin telah mengubah dan mereformasi institusi pemerintahan di Rusia. Misalnya saja pengurangan pemilihan langsung pada pemilihan kepala pemerintahan di daerah semenjak tahun 2004. Kebijakan ini memastikan jika kepala daerah membutuhkan persetujuan dari presiden dan partai pendukungnya (Partai United Russia) untuk menjadi kepala daerah daripada harus berusaha menjalankan mesin politiknya sendiri untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Partai United Russia mendapatkan banyak keuntungan dari sistem ini dan dapat mengontrol kepala-kepala daerah. Sistem baru yang disetujui pada tahun 2002, mengharuskan setidaknya setengah kursi legislatif di daerah ditentukan oleh sistem nomor urut partai di pusat, sehingga kepala daerah kehilangan sebagian kontrol mereka dalam pemilihan legislatif regional.¹¹⁹

Sebelum reformasi, dukungan dari kepala daerah dan birokrasi daerah menjadi sumber terpenting dalam pencalonan seorang kandidat kepala daerah. Dengan perubahan menjadi sistem campuran dalam pemilihan umum di tahun 2003, kepala daerah harus mendapatkan dukungan dari patronase yang berasal dari Partai United Russia. Hal yang menarik adalah menurut Kynev, para kepala daerah semenjak aturan ini diberlakukan berperan sentral dalam pembuatan keputusan mengenai komposisi daftar nomor urut Partai United Russia pada pemilihan regional tahun 2005 dan 2006. Kepala Daerah yang sebagian besar anggota Petinggi Partai United Russia, dapat mengontrol anggota legislatif karena untuk maju menjadi anggota legislatif harus didukung oleh Kepala Daerah.¹²⁰

Namun patronase politik telah berpengaruh terhadap konflik kepentingan pada Partai United Russia. Pada beberapa kesempatan, pemimpin United Russia di tingkat pusat mengintervensi proses kandidat dalam daftar nomor urut.

¹¹⁹ Ora John Reuter dan Thomas F. Remington, "Dominant Party Regimes and the Commitment Problem: The Case of United Russia" dalam Jurnal *Comparative Politics Studies*, Volume 42, Number 4, April 2009, hlm. 511, yang bersumber dari situs <http://rosphoenix.com/images/DominantPartyCommitment.pdf> diakses pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 10.32 WIB.

¹²⁰ *Ibid.*,

Pimpinan pusat Partai United Russia dapat memutuskan alokasi daftar nomor urut dan mendiktekan pilihan tersebut kepada kepala daerah. Dengan demikian pihak yang dominan menawarkan manfaat bagi elit politik namun juga membebankan biaya. Kedua pihak dapat menuai keuntungan dari koordinasi strategi pemilu, penjaminan legislatif stabil, kooptasi aliansi yang potensial, dan stabilitas perekrutan politik. Pada saat yang sama kedua belah pihak menanggung biaya hilangnya otonomi. Bagi pengurus pusat terdapat biaya delegasi yang cukup besar. Masing-masing pihak menghadapi resiko jika pihak lain mengabaikan tanggungjawabnya dan bila proyek gagal, maka akan lebih buruk daripada mereka harus memilih dengan mengandalkan kemampuan sendiri dari sumber daya pribadi. Sehingga masing-masing pihak dapat keuntungan dari pihak yang berkuasa, dan bersedia untuk mengikat sumber daya sendiri untuk proyek ini sebatas pihak lain juga melakukannya.¹²¹

Pada pendekatan ini, menunjukkan bahwa pihak dominan tidak akan muncul jika distribusi sumber daya politik condong ke penguasa sehingga ia tidak perlu mengkooptasi elit lainnya. Elit penguasa Rusia pada tahun 1990an, Gubernur dan elit regional mempunyai otonomi yang besar secara de facto dan de jure, hal ini menyebabkan banyak penguasa yang ingin mengkooptasi dan mengendalikan kekuatan-kekuatan ini. Elit lain tidak akan mau melepas otonomi mereka sendiri dan membuat komitmen yang kredibel, serta tanpa penguasa pusat dalam membuat fokus untuk koordinasi, elit yang kuat akan menemukan hampir tidak mungkin dapat mengatasi koordinasi. Dengan demikian tidak akan ada pihak yang berinvestasi dalam partai. Mereka baru berharap jika ada pihak dominan yang akan muncul ketika elit lainnya memegang sumber daya politik secara independen (relatif netral terhadap sumber daya politik penguasa) yang mengkooptasi (penetral). Namun sumber daya otonom tersebut membuat mereka tidak mau berkomitmen untuk partai.¹²²

Reformasi institusi pemerintah daerah, sudah ingin dilakukan oleh Kremlin semenjak tahun 1999. Kremlin menyadari bahwa ia harus

¹²¹ Henry E. Hale dan Timothy J. Colton, "Russian and the Putin-Medvedev "Tandemocracy": a Survey-Based Potrait of the 2007-2008 Election Season" yang bersumber dari situs http://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2009_823-03_2_Hale.pdf diakses pada tanggal 11 Maret 2012 pukul. 13.25, hlm. 14.

¹²² *Ibid.*,

mengumpulkan sumber daya politik yang besar dari para kepala daerah jika ingin memuluskan suksesi kepemimpinan dari Boris Yeltsin ke Vladimir Putin. Untuk itu, Kremlin harus bersedia dalam berinvestasi dalam suatu partai baru. Namun, hingga awal 2000 para elit politik masih memiliki alasan yang meragukan apakah komitmen untuk Unity akan bertahan pada pemilihan Presiden tahun 2000. Akibatnya sinyal dari Kremlin akan memperdalam investasinya di Unity menjadi terpengaruh perhitungan elit. Pada Juli 2001, Kremlin memprakarsai penggabungan antara Unity dan OVR, dengan penamaan partai baru United Russia. Presiden Vladimir Putin sendiri menghadiri kongres pertama partai ini pada tahun 2001. Hingga musim semi tahun 2002, partai ini mempunyai tugas memperluas jangkauannya ke daerah, dan pada awal berdirinya partai ini, mereka dapat mengandalkan dukungan aktif dari setidaknya 24 gubernur.¹²³

Pada awalnya, Kremlin bermaksud mencegah gubernur yang berkuasa menikmati banyak pengaruh di partai. Pada beberapa kasus, United Russia berusaha untuk merekrut lawan gubernur daripada memilih rekan gubernur. Mantai penasihat Putin, Alexandr Besspalov, didakwa karena memperluas jangkauan partai ke daerah, dengan mengorbankan kekuasaan gubernur. Bahkan ketika awal 2003, partai berusaha merekrut lawan gubernur dan memperluas pengaruh politik pusat ke daerah oleh gubernur yang menantang daripada gubernur yang sudah mendukung. Dalam pemilihan gubernur, beberapa utusan federal yang bahkan bukan anggota partai juga didukung oleh Partai United Russia.¹²⁴

Selama periode ini, para utusan, berperan utama untuk memperluas pengaruh pemerintah federal ke daerah, dengan memainkan strategi membagi-dan-mengatur berkenaan dengan elit daerah, melobi para partai dan kepala daerah independen sekaligus mendukung kandidat United Russia. Pada periode ini, belum ada pihak yang siap untuk berkomitmen untuk proyek partai dominan. Kremlin juga menyadari hal ini, mereka tahu bahwa setiap usaha untuk berinvestasi lebih banyak dalam partai hanya akan menghasilkan pada keputusan yang lebih pro elit daerah, sementara Kremlin dibiarkan menanggung biaya mempromosikan partai. Dengan kata lain, akan membuat konsesi bagi elit daerah

¹²³ Reuter dan Remington, *Loc. cit.*, hlm. 516.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 517.

(sewa, kebijakan, kelembagaan, dan kontrol), tetapi tidak akan menerima manfaat dari partai dominan karena elit daerah akan berani untuk lebih dominan. Selain itu, koalisi pada partai ketika pemilihan gubernur akan dapat berbahaya selama gubernur masih memiliki sumber daya substansial. Pada tahun 2002, Kremlin masih enggan untuk memberikan alat bagi para gubernur untuk mengatasi masalah koordinasi mereka karena tidak yakin mereka akan tetap loyal.

Keadaan ini berubah pada awal 2003, Alexandr Besspalov, Ketua Pelaksana Partai United Russia, yang tidak disukai oleh banyak pemimpin regional, dipecat sebagai Kepala Komite Pimpinan Pusat partai United Russia. Utusan federal mulai bekerja untuk merekrut kandidat untuk bekerja dibawah bendera Partai United Russia, mendorong pasukan pro presiden untuk bekerja melalui organisasi Rusia Bersatu, dan sumber daya penyaluran untuk kandidat partai. Selain itu, partai secara drastis merubah posisinya dalam kooptasi kepala daerah. Kremlin mulai mengakomodasi dengan mereka dan mendorong mereka untuk masuk dalam daftar kandidat partai United Russia. Dengan kata lain, Kremlin berusaha untuk memanfaatkan kekuasaan gubernur bukan untuk menumbangkan mereka.¹²⁵

Berbicara pada kongres Partai United Russia pada bulan September 2003, Putin mengumumkan bahwa meskipun ia tidak akan secara resmi bergabung dengan partai United Russia, dia akan, sebagai warga negara, akan memilih Partai United Russia. Dorongan untuk perubahan ini adalah ketika Pemilu Duma tahun 2003. Kremlin tahu bahwa Partai United Russia diperlukan untuk meminta sumber daya administratif dari elit daerah untuk kendaraan Putin dan juga dalam mengamankan mayoritas legislatif yang setia. Selain itu, ketidakseimbangan kekuasaan antara Kremlin dan elit daerah telah melebar sejak tahun 2000, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pendapatan dari minyak, dan kenaikan dukungan masyarakat terhadap Putin semakin memperkuat posisi tawar Kremlin. Selain itu, reformasi sentralisasi Presiden Putin, termasuk penghapusan *officio* mantan gubernur di Dewan Federasi dan penciptaan tujuh distrik federal, memperkuat kekuasaannya sebagai presiden *vis-a-vis* gubernur.¹²⁶

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ *Ibid.*

Oleh karena itu, Kremlin berada di posisi lebih baik untuk berkomitmen bagi masa depan elit daerah, dan elit daerah cenderung untuk menerima kesepakatan. Upaya ini terbayarkan pada Pemilihan Duma tahun 2003, Partai United Russia berhasil merebut 37,6% suara pada sistem proporsional daftar nomor urut dan 45% dari sistem distrik. Hal yang mengejutkan adalah keberhasilan partai United Russia dalam menarik deputi partai independen dan lainnya. Hasilnya Partai United Russia memperoleh kursi terbanyak 310 kursi pada Duma.¹²⁷

Setelah Pemilihan Duma tahun 2003, kedua belah pihak (Putin dengan Partai United Russia) lebih memperketat komitmen mereka terhadap partai. Putin sering bertemu dengan para pemimpin partai untuk membahas inisiatif legislatif, dan presiden terus menyuarakan dukungannya untuk ekspansi partai. Selain reformasi memperluas pertan partai dalam proses politik, Kremlin juga mendorong reformasi lain yaitu reformasi yang memungkinkan partai mayoritas mengusulkan calon presiden. Kremlin mendorong partai untuk melanjutkan strategi memilih elit regional dan disalurkan bagi kemenangan di badan legislatif daerah. Reformasi hukum, pemilihan umum, dan pemilihan gubernur secara tajam mengubah lingkungan kelembagaan untuk elit.

Pada tahun 2004, Kremlin membatalkan pemilihan langsung eksekutif daerah. Menurut undang-undang baru, presiden mencalonkan calon gubernur untuk dilanjutkan ke legislatif daerah. Jika parlemen menolak pencalonan presiden dua kali, presiden memiliki kekuasaan untuk mencalonkan seorang kepala sementara dan pemilu baru di daerah. Bahkan pada tahun 2005, aturan baru memungkinkan pihak yang telah memenangkan mayoritas di badan legislatif daerah untuk mencalonkan kandidat sebagai gubernur. Pada Maret 2007, 72 eksekutif daerah telah bergabung dengan partai.¹²⁸

Sejak 1 Januari 2005, sampai dengan 31 Maret 2006, Putin menominasikan 47 eksekutif daerah. Empat puluh dua orang eksekutif adalah anggota partai atau menjadi anggota segera setelah nominasi mereka Partai United

¹²⁷ Natalia Zubarevich, "Russian Elections and the Relations between the Centre and the Regions" dalam Sabine Fischer (ed.), *Russia Insight from a Changing Country* (Paris: Institute for Security Studies, 2012), hlm. 21.

¹²⁸ Reuter dan Remington, *Loc. cit.*, hlm. 518.

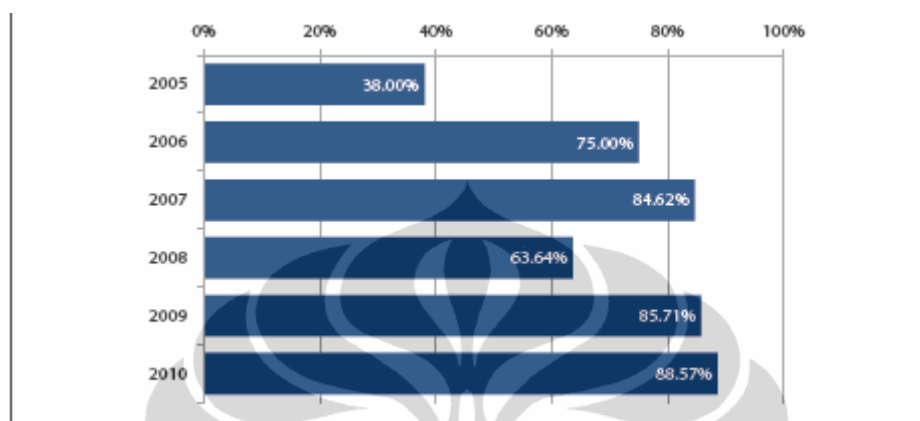
Russia. Dari 14 eksekutif daerah baru hanya 3 eksekutif yang bukan anggota United Russia. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa gubernur dapat tetap di luar partai, serta pemerintah tetap non-partisan (hanya tiga anggota dari pemerintah dan hampir tidak ada anggota lingkaran dalam Vladimir Putin merupakan anggota partai), tidak dapat disangkal bahwa Partai United Russia mulai memainkan peran sebagai lembaga untuk mengendalikan pendukungnya. Di Duma, United Russia telah menyatakan dengan jelas bahwa penyimpangan dari garis suara partai akan menghasilkan akibatnya. Persaingan untuk tempat di daftar partai nomor urut anggota legislatif dari United Rusia di daerah menjadi sengit. Kelompok lobi dan politisi telah datang dan mengakui bahwa mempunyai afiliasi dengan partai merupakan prasyarat untuk mendapatkan akses ke kebijakan. Chaisty tahun 2005 telah menghitung bahwa 109 dari 310 anggota United Russia di Duma adalah wakil langsung dari bisnis besar. Hal ini juga dipahami bahwa penyimpangan dari partai itu akan berarti kehilangan akses untuk akses di masa depan. Pada Maret 2007, hanya ada satu gubernur yang berasal dari luar partai (Stavropol).¹²⁹

Tetapi di daerah di mana partai telah dengan jelas berhasil dalam perannya sebagai lembaga otonom untuk mengendalikan dan memilih aktor elit. Bahkan setelah banyak publikasi reformasi sentralisasi Putin, elit daerah (termasuk walikota, gubernur, direktur perusahaan kuat, dan kepala pemerintahan setempat) masih bertanggung jawab atas hasil pemilu di setiap tingkatan, dan dalam kepentingan Kremlin untuk memastikan bahwa usaha para pelaku telah dikoordinasikan. Namun manajemen hubungan mikro diantara ribuan aktor elit adalah tugas yang sulit dilakukan oleh presiden sendiri. Pada 1990-an, Kremlin telah memberikan tugas ini kepada gubernur. Namun, sejak tahun 2003, Kremlin telah mendelegasikan tugas ini ke Partai United Russia, sebagai pihak yang telah menjadi titik fokus untuk konsolidasi elit dan sebuah forum untuk resolusi konflik. Dalam beberapa kasus, pimpinan partai pusat telah melaksanakan kewenangan untuk meredakan konflik elit di daerah, dengan menyediakan sebuah forum kelembagaan untuk para pemimpin regional untuk mengatasi perbedaan

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 519.

mereka dan dengan menerapkan solusi jika lawan dalam partai tidak dapat mencapai kesepakatan.¹³⁰

Gambar 3.1
Persentase Jumlah Kepala Daerah Anggota Partai United Russia tahun 2005-2010



Sumber: Ora John Reuter, "United Russia and the 2011 Election" yang bersumber pada Jurnal *Russian Analytical Digest*, No. 102, 26 September 2011, hlm. 6.

Di pertengahan 2007, partai United Russia telah mengontrol mayoritas kepala daerah di 76 dari 86 daerah. Di tahun 2006, 90% kepala daerah di Rusia telah bergabung di Partai United Russia, termasuk 7 walikota dari 10 kota besar di Rusia. Sejak tahun 2005, partai telah melakukan upaya dalam memperluas pengaruhnya pada 24.000 kepala daerah serta legislatif daerah. Secara tradisional sebuah kelompok non-partisan tradisional (90% adalah non-partisan pada tahun 1990an), 50% kepala Oblast adalah anggota partai United Russia tahun 2007. Dalam legislatif daerah, kelompok struktur bisnis yang kuat berupaya untuk melobi berbagai pihak dalam partai United Russia dan akses langsung ke gubernur. Salah satu anggota terkemuka dari faksi United Russia di provinsi Sverdlovsk berkomentar, "Beberapa sesi kami memberitahu pemimpin faksi kami, proyek dan inisiatif yang paling penting bagi kami. Setiap orang melakukan ini dan pembagian yang adil dan kemudian berhasil. Dengan cara ini kami semua tahu bahwa kami dapat memenuhi janji-janji tertentu untuk daerah kami dan pendukung kami. . . . Secara pribadi, pengaturan ini membuat saya tidur lebih baik di malam hari."¹³¹

¹³⁰ Hale dan Colton, *Loc. cit.*, hlm. 23.

¹³¹ *Ibid.*

Dengan kata lain, partai telah memberikan suatu mekanisme kelembagaan untuk membagi akses bisnis yang penting dan kepentingan politik. Dalam provinsi Chelyabinsk, seorang pejabat di komite eksekutif United Russia melaporkan bahwa cabang partai regional berusaha sangat keras untuk memastikan bahwa kesetiaan kepada partai dihargai baik di arena legislatif dan pada saat pemilu: Jika anggota bekerja untuk kepentingan partai, maka itu adalah kepentingan partai. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk mengisi tempat kosong dengan daftar pendukung partai yang belum memiliki kesempatan. Sehingga seorang aktor elit yang gagal mencapai karir di masa sekarang, ia memiliki beberapa alasan untuk percaya bahwa loyalitas dan dukungan untuk partai akan membawa pengaruh baik bagi masa depan.¹³²

Partai United Russia telah memiliki suatu sistem yang terstruktur bagi elit di daerah untuk mendorong komitmen mereka untuk mencapai keberhasilan. Jika mereka tidak terdorong untuk bergabung dengan partai, dengan tetap independen menimbulkan resiko serius dan ketidakpastian. Afiliasi, disisi lain, memecahkan sejumlah dilema bagi para pejabat daerah, seperti pengaturan untuk pembagian legislatif dan peluang karier. Dominasi partai bukan hanya tren umum dalam politik Rusia. Pemerintah telah memberikan partai pemenang pemilu untuk mengalokasikan dana “proyek nasional” di daerah.¹³³

Dalam keadaan ini, Kremlin memegang dominan sistem partai, tetapi tidak dapat memonopoli sumber daya politik. Dalam kondisi ini, Kremlin bersedia memberikan partai United Russia otonomi yang cukup untuk berfungsi sebagai mekanisme untuk memenangkan mayoritas pemilihan. Pada gilirannya, dalam pertukaran untuk melepaskan otonomi dan kebebasan manuver, elit daerah mendapatkan keuntungan dari aturan yang jelas yang mengatur rekrutmen politik, alokasi sumber daya dan manajemen pemilu.¹³⁴

Pada pidato bulan Februari 2006, salah seorang penasihat Putin, Vladislav Surkov, akan ada prospek sistem yang mendominasi politik untuk setidaknya 10-15 tahun. Pada pidato Juli 2006, Surkov dan aktivis lain dari partai pro-Kremlin menyebutkan bahwa sistem politik akan “dibangun di sekitar partai United

¹³² *Ibid.*, hlm. 25.

¹³³ Reuter dan Remington, *Loc. cit.*, hlm. 518.

¹³⁴ Shlapentokh dan Woods, *Op. cit.*, hlm. 123.

Russia” di masa yang akan datang. Sepanjang tahun 2006, Kremlin mendukung calon-calon Gubernur dari Partai United Russia. Kremlin juga mengisyaratkan jika calon-calon tersebut hanya mempunyai kesempatan jika mereka berafiliasi dengan Partai United Russia dan apakah mereka bisa memberikan suara bagi partai United Russia di daerah pemilihannya. Dalam aturan partai politik, seorang deputi tidak dapat mengubah afiliasi partai setelah mereka terpilih. Dalam semangat ini, dengan mayoritas kepala daerah berasal dari partai United Russia, maka pemilu regional akan menjadi stabil selama paling tidak 4 tahun mendatang.¹³⁵

Singkatnya, semenjak pertengahan tahun 2003, baik Kremlin dan elit daerah telah meningkatkan komitmen mereka dan mengubahnya menjadi pihak dominan yang besar. Elit-elit daerah masih harus membuat pengaruh politik agar Kremlin perlu untuk mengkooptasi mereka. Kremlin akan membutuhkan mereka karena berharap untuk mendominasi pemilihan umum dan legislatif dan memelihara stabilitas politik. Pengaturan ini tampaknya telah berhasil, elit daerah mengandalkan Kremlin untuk terus menyalurkan sumber daya melalui partai, dan karena mereka tahu bahwa Kremlin memiliki saham di partai tersebut. Kremlin mampu berkomitmen untuk partai karena mereka tahu kelemahan dari elit daerah. Tidak ada pihak yang berencana untuk keluar dari partai ini, mengingat kurangnya kesempatan di partai lain.¹³⁶

3.2 Neo-Patrimonialisme Birokrasi pada Pemerintahan Vladimir Putin

Salah satu penyebab kemenangan Partai United Russia pada pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007 adalah dengan menggunakan pejabat/aparatur pemerintahan yang mendukung partai United Russia. Keberhasilan Partai United Russia dalam pemilihan umum disebabkan kemampuan partai dalam merekrut elit ke dalam jajarannya. Koordinasi hampir semua elit politik regional Rusia dalam partai merupakan salah satu kekuatan terbesar partai ini. Di Rusia, seperti di banyak negara lain, elit politik, seperti gubernur daerah, legislator terkemuka, direktur perusahaan, dan walikota adalah pemimpin-pemimpin yang

¹³⁵ Reuter dan Remington, *Loc. cit.*, hlm. 521.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 522.

sumber suara yang besar. Selama awal pembentukannya, Partai United Russia mempunyai tugas merekrut elit-elit kuat di tingkat regional Rusia.¹³⁷

Dibawah kepresidenan Vladimir Putin, pendekatan baru patronase muncul kembali, meskipun tidak ada perubahan dalam dasar-dasar filosofis atau mekanisme pelaksanaannya seperti masa sebelumnya. Dasar dari kebijakan ini adalah kebangkitan dari sistem Soviet, *nomenklatura*, yang berusaha menggantikan ketidakpastian rekrutmen politik dalam demokrasi dengan sesuatu yang mungkin dapat disebut manajemen patronase. Kebangkitan sistem ini dapat dipandang positif ataupun negatif, pandangan positif terhadap sistem ini adalah untuk memastikan efisiensi dan kohesi dalam negara modern, tetapi pandangan negatif melihat sistem ini menjadi dasar bagi suatu tatanan neo-otoritarian.¹³⁸

Pola patronase yang dijalankan oleh Putin tidak hanya terbatas pada jabatan politik yang berfungsi untuk melayani keinginan dari pimpinan pusat, biasanya anggota staf senior atau kader utama dalam inti eksekutif. Pejabat terpilih, pegawai negeri permanen, dan pimpinan bisnis serta organisasi non-pemerintah menjadi sasaran dari kelompok patronase untuk dipengaruhi sehingga akan mengancam pluralisme politik.¹³⁹

Politik patronase telah muncul diawal periode kedua kepresidenan Yeltsin. Yeltsin tampak menggunakan sistem Soviet, *nomenklatura*, yang tersentralisasi dan terkontrol. Pada masa Soviet, penyeleksian personel kunci di institusi federal dilakukan oleh lembaga kepresidenan dengan arahan dari komite sentral Partai Komunis Uni Soviet. Usaha elit Rusia untuk menciptakan kader yang sejajar di kementerian tidak berhasil. Selain itu, walaupun administrasi kepresidenan telah membentuk suatu departemen tersendiri dalam pemilihan kader, departemen tersebut tidak mampu untuk mengkoordinasikan seleksi personel pemerintah di tingkat federal.¹⁴⁰

¹³⁷ Ora John Reuter, "United Russia and 2011 Elections" dalam Jurnal *Russian Analytical Digest*, No. 102, 26 September 2011, hlm. 1.

¹³⁸ Alex Pravda (ed.), *Leading Russia: Putin In Perspective, Essays in Honour of Archie Brown* (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 161.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Eugene Huskey, "*Pantouflage a la russe: The Recruitment of Russian Political and Business Elites*" dalam Stephen Fortescue (ed.), *Russian Politics from Lenin to Putin* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), hlm. 185.

Pada masa Yeltsin, tanggungjawab utama dalam permasalahan personel diserahkan kepada kementerian federal dan para pemimpin dari 89 daerah dan republik Rusia karena kekurangan personel kebijakan lembaga koordinasi. Pada paruh kedua tahun 1990an, desentralisasi kebijakan personel telah mengubah gubernur daerah dan presiden republik menjadi patron utama dalam politik Rusia. Mereka mampu merekrut klien tidak hanya dari lembaga-lembaga daerah dan republik tetapi juga dalam pemerintahan lokal dan badan-badan federal yang bekerja di daerah.¹⁴¹

Pusat mulai melakukan kebijakan rekrutmen yang lebih terpusat dan sistematis pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya keputusan presiden yang menyatakan bahwa adanya pelatihan-pelatihan di dalam maupun luarnegeri bagi kader-kader yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi kunci di lembaga pemerintahan dan perusahaan milik negara. Setelah keputusan presiden ini dibuat muncul penciptaan daftar kader di berbagai kota dan daerah di seluruh negara. Daftar ini mewakili kebangkitan administrasi negara yang merupakan unsur penting dari sistem *nomenklatura*. Namun keadaan ini sebenarnya digunakan oleh Yeltsin sebagai akses bagi Vladimir Putin untuk mendapat kekuasaan sebagai presiden menggantikan dirinya.¹⁴²

Dalam suatu rezim demokrasi, seseorang yang mengatur ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara kekuatan negara dengan sosial. Kekuatan pemilihan umum memberikan warga negara untuk berperan dalam rekrutmen pemimpin mereka, tetapi pilihan yang diberikan kepada pemilih umumnya dibuat, baik formal maupun informal, oleh elit-elit di pemerintahan atau oposisi. Hal yang tidak biasa ditampilkan pada pemilihan umum di Rusia, daftar calon anggota legislatif sebagian besar merupakan anggota dari *nomenklatura*. Partai politik tetap berfungsi sebagai perekrutan calon anggota legislatif, meskipun hanya sebagai kendaraan mereka. Tidak mengejutkan ketika Presiden Putin menyetujui pembentukan partai politik baru, *United Russia*, yang mendukung pemerintahannya serta menawarkan sejumlah personel yang dapat dimanfaatkan untuk menduduki jabatan kunci dalam pemerintahan.¹⁴³

¹⁴¹ Pravda, *Op. cit.*, hlm. 185.

¹⁴² *Ibid.* hlm. 187.

¹⁴³ *Ibid.* hlm. 193.

Kemunculan *United Russia* dianggap sebagai kekuatan bagi politik Rusia. Putin dan pendukungnya mengindikasikan adanya keinginan untuk bereksperimen dengan partai politik dan institusi negara. Melalui pemilihan yang demokratis, partai-partai berusaha untuk merebut kontrol dari lembaga pemerintahan, tetapi hal tersebut hanya sementara. Menurut catatan Adam Przeworski, pemilihan umum adalah suatu cara bagi partai atau politisi untuk menggunakan negara untuk memajukan kepentingan mereka.¹⁴⁴

Dimasa pemerintahan Putin, terdapat keinginan yang besar dari berbagai pihak untuk tidak menerima ketidakpastian yang tersirat dalam demokrasi. Perspektif ini menyebabkan pejabat lebih memilih mengusulkan kandidat personel dari daftar cadangan dan dipilih langsung oleh eksekutif dan legislatif. Presiden Putin menyatakan bahwa ia meminta perubahan sikap terhadap pemilihan tingkat kota, tidak diperlukan lagi adanya lembaga pengawasan yang ketat serta adanya daftar calon kader cadangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembentukan dan peringkat calon yang memenuhi syarat untuk menjadi kandidat menjadi tugas dari para politisi dalam peran mereka sebagai pemimpin partai bukan sebagai pejabat negara. Para pemimpin di Rusia tampak tidak dapat membedakan antara peran politik dan administrasi, oleh karena itu kekuasaan partai dipandang banyak orang sebagai perpanjangan yang sah dari administrasi negara.¹⁴⁵

Kecenderungan pejabat negara untuk menggunakan kekuatannya untuk memilih Putin dalam pemilihan umum lokal, pusat, dan regional dapat menyatukan politisi dari orientasi kebijakan yang sangat berbeda. Salah satu sayap reformis politik Rusia, Sergey Kirilenko, menyatakan bahwa ia datang untuk bekerja bagi Presiden Putin dan akan melakukan segalanya sehingga ia dapat terpilih kembali dalam kampanye presiden selanjutnya. Bagi Kirilenko calon kandidat Putin tidak dapat dipisahkan dari jabatannya sebagai presiden Rusia. Bagi pendukung Putin lainnya yang berasal dari Ural, Petr Latsyhev, seorang dengan pandangan tradisional telah menggunakan berbagai macam

¹⁴⁴ Hans-Henning Schroder, "What Kind of Political Regimes Does Russian Have?" dalam Stephen White (ed.), *Politics and The Ruling Group in Putin's Russia* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 1.

¹⁴⁵ *Ibid.* hlm. 4.

sumber dari kantornya untuk mendukung United Russia. Latyshev juga menjadi motor mobilisasi birokrasi agar mendukung setiap kampanye *United Russia* di wilayah Ural. Dukungan terhadap partai pro-pemerintah ini menurut Latyshev disebabkan berbagai pembangunan yang didanai oleh partai. Contohnya saja pembangunan jembatan di Volgograd yang melintasi sungai Volga ditandai dengan tulisan 'kontruksi jembatan ini berasal dari bantuan *United Russia*'.¹⁴⁶

Pengaruh kepresidenan terhadap kebijakan kader diantara pejabat yang terpilih tidak hanya terbatas pada kampanye pemilihan umum. Selama menjabat, seorang pejabat terpilih dapat dicopot oleh Putin jika ia tidak mencapai harapan. Dengan taktik ini Putin telah membangun salah satu tradisi sentral dari Soviet, nomenklatura, dimana elit disirkulasikan di dalam tanpa harus dikeluarkan dari elit penguasa. Contohnya terjadi pada pemimpin terpilih di Vladivostok dan St. Petersburg, Yevgeny Nazdratenko yang harus meninggalkan jabatannya di daerah untuk menjadi Menteri Perikanan pada Februari 2001. Ketidakmampuan ia dalam memenuhi kuota ekspor ikan membuat ia harus dipindahkan menjadi staf keamanan khusus. Semenjak Putin mengurangi staf keamanannya dari 7 menjadi hanya 1, Nazdratenko dijadikan Gubernur Jenderal Distrik Federal Selatan, salah satu wilayah administrasi Rusia yang tidak stabil akibat perang di Kaukasus Utara.¹⁴⁷

Dengan sistem kemampuan melakukan rekrutmen secara luas, Putin telah membuat suatu kebijakan patronase yang lebih sistematis dan lebih ambisius dibandingkan pendahulunya. Dengan memberikan dukungan secara pribadi kepada *United Russia*, contohnya; dengan mendorong bawahannya untuk memobilisasi sumber daya negara untuk mendukung kandidat *United Russia*, dan dengan menggunakan kekuatan administratif untuk menunda hasil pemilu jika tidak sesuai keinginannya, Putin telah mengkonsentrasikan kekuatan yang sangat besar sebagai presiden.¹⁴⁸

Contoh lainnya adalah pada saat pemilihan gubernur untuk wilayah Magadan, Maret 2003, salah seorang calon yang didukung Kremlin, Gubernur Magadan Nikolay Karpenko, gagal menjadi Gubernur kembali karena kalah

¹⁴⁶ Fish, *Op. cit.*, hlm. 33.

¹⁴⁷ Pravda, *Op. cit.*, hlm. 165.

¹⁴⁸ *Ibid.*

dalam pemilihan secara langsung. Namun, hasil pemilihan umum ini dibatalkan oleh pemerintah dengan menggunakan tragedi Beslan untuk meniadakan pemilihan langsung untuk jabatan gubernur dan presiden dari wilayah dan republik.¹⁴⁹

Salah satu subjek utama dari patronase pada rezim demokratis adalah adanya anggota patron yang bertugas melayani kepentingan penguasa, baik yang berada di lembaga atau pada pimpinan di kementerian dan departemen. Para anggota patron berfungsi dalam memberikan nasehat dan keahlian bagi pejabat terpilih dan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar dikerjakan oleh birokrasi negara. Ketika terjadi pergantian kekuasaan, terjadi pergantian aparatur negara dan pejabat pemerintahan; di Inggris kurang dari 100 pejabat baru memegang kunci lembaga-lembaga penting, sedangkan di Amerika lebih dari 3000 pejabat baru.¹⁵⁰

Di Rusia sendiri, skala patronase dapat melebihi yang terjadi di Amerika Serikat. Lebih dari 600 pejabat baru berada pada tingkat pusat (Moscow) untuk jabatan-jabatan staf khusus kepresidenan. Misalnya dibutuhkan seorang figur yang dapat memimpin banyak personel dari berbagai subdivisi lembaga kepresidenan seperti kepala kementerian federal, deputi kementerian –terkadang pada sepuluh kementerian- yang disebut kementerian presiden seperti kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, kementerian kehakiman, dan FSB.¹⁵¹

Pejabat-pejabat pilihan presiden tidak dapat diveto atau dipertanyakan oleh institusi lain, namun terdapat 200 pejabat Kota Moscow yang ditunjuk presiden harus disetujui dahulu oleh parlemen. Diantara pejabat-pejabat ini adalah perdana menteri, kepala badan pemeriksa keuangan dan gubernur bank sentral –semuanya harus didukung oleh Duma – dan juga kejaksaan; serta hampir 100 anggota Hakim Agung dan 19 anggota Hakim Mahkamah Konstitusi harus disetujui *Federation Council*. Selain itu, sejumlah personel tentara nasional secara formal atau informal dipilih oleh presiden. Jumlah ini semakin bertambah dengan tambahan anggota dari daerah dan republik, mulai dari gubernur jenderal dan

¹⁴⁹ *Ibid.* hlm. 165.

¹⁵⁰ Oleg Zaznaev, “The Presidentialization of a Semi-Presidential Regime: the case of Russia” dalam White, *Op. cit.*, hlm. 27.

¹⁵¹ *Ibid.*

deputi-deputi pertama di tujuh distrik federal, setiap deputi tersebut memiliki staf minimal 150 orang, hingga lebih dari 18.000 hakim dalam peradilan komersial, militer, dan umum di seluruh negara.¹⁵²

Politik patronase di Rusia berbeda dari negara-negara demokratik lainnya karena rekrutmen anggota patron/politik lebih kontinual daripada episodik serta karena angka *turnover* lebih rendah setelah pemilihan umum. Pada negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Perancis pergantian pejabat-pejabat baru dilakukan dengan cepat terutama bagi pemegang kekuasaan politik. Pergantian tersebut dapat dilakukan dalam beberapa jam saja atau paling lambat beberapa hari. Presiden Amerika Serikat membutuhkan waktu dua setengah bulan untuk mengganti seluruh staf kementerian dan kepresidenan sejak waktu terpilih dalam pemilihan umum hingga dilantik sebagai presiden.

Di Rusia sendiri, pergantian pejabat politik dilakukan secara meluas setelah terpilihnya presiden. Selain ditunjuknya menteri-menteri dan pejabat kementerian setelah terpilihnya tahun 2000, Putin melakukan pergantian 77 pejabat setingkat kementerian pada periode 4 tahun masa jabatannya (7 di tahun 2000, 20 di tahun 2001, serta 20 di tahun 2002 dan 2003). Selama 4 tahun masa jabatannya, pergantian pejabat kementerian tidak dilakukan di dua kementerian utama yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan karena Putin menginginkan suatu sirkulasi pengkaderan yang terus berlangsung di dua kementerian penting ini. Selain itu, pada masa Putin tidak ada pergantian Perdana Menteri, alasannya untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan. Bandingkan dengan masa Yeltsin yang melakukan pergantian terhadap 5 perdana menteri pada periode kedua pemerintahannya.¹⁵³

Keharusan Yeltsin untuk melakukan pergantian perdana menteri serta kabinetnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Yeltsin harus selalu melakukan rotasi kader sebagai eksekutif karena penolakan dari legislatif yang didominasi oleh oposisi. Putin belajar dari kesulitan Yeltsin, sehingga ia membuat parlemen yang kuat untuk mendukung pemerintah. Kedua, tidak adanya institusi dalam pemerintahan yang bertugas untuk mengidentifikasi dan berkoordinasi

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Anton Steen dan Vladimir Gel'man (ed.), *Elites and Democratic Development in Russia* (London: Routledge, 2003), hlm. 6.

dalam penyeleksian aparat pemerintahan (dan juga kader politik) membuat Yeltsin sulit untuk menentukan aparat yang dapat ia percaya. Ketiga kompleksitas politik dalam kementerian tersebut yang membuat sempit kandidat bagi pemilihan menteri atau deputi menteri.¹⁵⁴

Faktor terakhir, hingga saat ini masih terjadi, penunjukan posisi kepemimpinan di pemerintahan dan kementerian Rusia berasal dari seseorang yang datang secara tidak proporsional dipromosikan tidak sesuai dengan hierarki birokrasi, sebuah tradisi yang memperkuat departementalisme di politik Rusia dan kehidupan administrasi. Jika pada awal-awal tahun berdirinya Rusia, promosi untuk menjadi menteri berasal dari bawah, maka dibawah Putin terjadi peningkatan menteri federal yang berasal dari luar kementerian. Hingga tahun 2001, kurang dari satu per tiga menteri telah berada selama lebih dari 10 tahun di institusi yang sama, dan kurang dari 30 persen dipromosikan menjadi menteri dari posisi deputi menteri pada organisasi yang sama. Dengan menekankan pada loyalitas personal daripada pengalaman teknikal ketika memilih pejabat, Putin telah berhasil untuk menciptakan suatu pemerintahan yang menekankan pada Putin sebagai pemimpin politik daripada sebagai seorang pemimpin administratif, yang kurang mampu melobi untuk kepentingan institusinya daripada anggota tim politik.¹⁵⁵

Salah seorang pengamat Rusia melihat tidak ada orang di Rusia yang saat ini menyatakan bahwa pemerintahan Putin adalah kabinet teknokrat (*tekhnicheskii kabinet*). Kabinet Putin adalah kabinet politisi, yang posisi dan pandangannya telah diketahui. Mungkin untuk menggambarkan orientasi patronase dapat dilihat dari pemilihan personel dalam salah satu kementerian penting, pemilihan Sergey Ivanov sebagai Menteri Pertahanan pada Maret 2003. Ia merupakan menteri pertahanan pertama yang berasal dari luar kementerian semenjak pertengahan 1950-an. Selain itu Putin telah merekrut personil dari angkatan bersenjata dan badan pertahanan untuk mengisi sepertiga dari posisi deputi kementerian, dengan beberapa dipekerjakan pada Kementerian Pembangunan Ekonomi serta kementerian lain non-keamanan.¹⁵⁶

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm. 8.

¹⁵⁶ Shlapentokh dan Woods, *Op. cit.*, hlm. 166.

Menurut tulisan salah seorang sosiolog Rusia, Olga Kryshstanovskaya, para personil angkatan bersenjata ditaruh di pos-pos pemerintahan sebagai ‘anjing penjaga’ untuk memastikan pejabat berwenang tetap loyal terhadap pemerintah. Kebijakan patronase tersebut memiliki berbagai resiko, tidak hanya tidak efektifnya manajemen dari birokrasi-birokrasi kunci di negara, tetapi juga berpotensi masuknya militer dalam politik Rusia. Namun, hal ini juga menjadi sinyal bagi Putin untuk menghilangkan tradisi loyalitas terhadap departemen atau cabang tertentu, ia menekankan ‘mental Silo’ diantara birokrasi Rusia dan membuat suatu koordinasi yang kompleks dalam pembuatan kebijakan publik. Pada era Yeltsin, Rusia memiliki koalisi pemerintahan *de facto*, yang merekrut menteri-menteri dibawah tekanan konsesi politik dengan oposisi parlemen. Putin saat ini membentuk untuk pertama kalinya suatu partai pemerintah, dengan personel tidak hanya berasal dari ‘partai’ itu sendiri, tetapi juga loyalis Putin yang berasal dari tempat tinggalnya di St. Petersburg, serta berasal dari tentara dan personel keamanan.¹⁵⁷

Selain memilih pejabat-pejabat politik, Putin juga berusaha menanamkan pengaruhnya di lembaga yudisial. Semenjak perannya dalam berbagai kasus yang terkait dengan kepemilikan dan pemilihan umum, yang berarti sebagai gerbang bagi ekonomi dan politik, pengadilan juga memiliki kekuatan yang besar dalam politik di Rusia. Sebagai ilustrasi, semenjak adanya permasalahan hasil pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2000, peran lembaga yudisial besar dalam menentukan kehidupan politik dan ekonomi. Sedangkan di Rusia, masyarakat tidak puas dengan kinerja lembaga peradilan. Sehingga Putin mengambil alih rekrutmen hakim-hakim federal, sebuah pergerakan untuk memusatkan kontrol terhadap lembaga ini. Meskipun menurut konstitusi 1993 presiden memiliki kekuasaan untuk memilih hakim dari pengadilan tingkat lokal hingga provinsi, presiden harus berkonsultasi terlebih dahulu dalam memilih hakim untuk tingkat pusat. Sejak tahun 2002, hukum di Rusia telah mengatur pemilihan hakim di tingkat pusat, aturan tersebut berisi adanya dukungan dari komisi kualifikasi

¹⁵⁷ *Ibid.*

yudisial, legislatif regional, dan dukungan yang berasal dari pengadilan tingkat provinsi dan lokal.¹⁵⁸

Sebagai contoh, dalam pengadilan provinsi tertinggi atau yang dikenal dengan *charter courts* di daerah dan *supreme courts* di republik. Presiden dapat menunjuk hakim baru, tetapi setelah mereka dicalonkan oleh komisi kualifikasi yudisial tingkat polisi serta diperiksa oleh polisi, petugas bea-cukai, FSB, majelis regional atau republik, kepala *charter courts* dan *supreme courts*. Sebelum dicalonkan oleh presiden, seorang calon harus melewati penyeleksian oleh Gubernur Jenderal di distrik federal, kemudian terakhir seleksi dilakukan oleh Kremlin melalui suatu komisi khusus. Komisi khusus ini berisi 17 orang anggota yang didominasi oleh kekuatan konservatif dan merupakan pejabat penegak hukum dan anggota badan pertahanan. Dengan adanya komisi khusus ini menyulitkan calon yang berasal dari independen atau perwakilan dari kelompok oposisi.¹⁵⁹

Selain pejabat dalam politik dan yudikatif, terdapat pula pegawai negeri sipil yang bertugas melayani masyarakat. Menurut Huskey, terkadang perbedaan antara pejabat politik dengan pegawai negeri sipil tidak terlalu jelas, bahkan di rezim paling demokratis sekalipun. Menurut idealisme Weber, seorang pegawai/birokrasi dapat dipilih berdasarkan merit sistem dan non-merit sistem. Tetapi bagi mereka yang menginginkan kekuasaan politik sering mencari cara untuk mempengaruhi rekrutmen dan promosi pegawai negeri sipil, khususnya pegawai negeri sipil yang memiliki posisi tinggi di birokrasi. Fenomena di Rusia memperlihatkan pemerintahan Putin sering mengindahkan persyaratan formal yang dibutuhkan dalam peraturan pegawai negeri sipil. Peraturan tersebut memberikan desain hierarki birokrasi dari tingkatan terbawah hingga pada golongan V atau sekelas dengan deputi menteri, yang memperlihatkan signifikansi keanggotaan permanen pada birokrasi. Pegawai negeri Rusia yang menginginkan untuk menggantikan pejabat diatas tidak harus harus meminta maaf atau meminta arahan sesuai dengan aturan formal, perlakuan seperti ini telah meluas di Rusia tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi hingga pemerintahan daerah. Pegawai

¹⁵⁸ *Ibid.* hlm. 171.

¹⁵⁹ *Ibid.*

yang merasa khawatir akan keadaan ini biasanya akan dipindahkan ke departemen lain.¹⁶⁰

Praktek patronase di birokrasi Rusia dibawah Putin bukan terkait dengan ketidakjelasan hubungan antara politik dan administrasi tetapi mengenai kebangkitan alat rekrutmen pada era Soviet- kebijakan kader cadangan. Diawali secara terbatas pada era Yeltsin, kebijakan ini menjadi elemen sentral dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Putin. Reformasi birokrasi yang dilakukan Putin bertujuan untuk mengurangi jumlah birokrasi, kemudahan dalam pembuatan dokumen perijinan, mengeliminasi inspeksi administratif yang didesain untuk menghindari suap, dan peningkatan gaji dan prestise pegawai.¹⁶¹

Seperti pada masa Soviet, daftar kader cadangan berisi nama dari individu yang telah 'memenuhi syarat awal' untuk mengisi posisi di birokrasi. Pada setiap posisi di kepala departemen dan di atasnya –dan di semua lembaga yuridiksi, bahkan posisi rendah –memiliki daftar cadangan. Daftar tersebut berisi data sejumlah personel yang berasal dari lembaga administratif ataupun politik. Setelah masuk ke daftar cadangan, kepada eksekutif terpilih di setiap tingkat administrasi kemudian menyetujui kandidat-kandidat untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil tetap, seorang pegawai negeri sipil sendiri memilih bawahannya yang berasal dari daftar cadangan sesuai dengan departemen atau lembaga. Keanggotaan dalam daftar cadangan dapat berarti tidak hanya bagi promosi, tetapi harapan bahwa *rezervisty* akan secara aktif memberikan tugas yang lebih menantang, baik pelatihan secara formal atau seminar secara periodik hingga pelatihan khusus di kantor sehingga mereka akan segera dapat dipromosikan.¹⁶²

Sistem daftar cadangan kader ini muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemimpin-pemimpin Rusia masih tidak percaya mengenai kemampuan sumber daya manusia Rusia untuk memberikan kader yang sesuai dengan birokrasi. Menurut pandangan mereka, para pemimpin harus dapat mengidentifikasi, melatih dan memelihara personel. Sikap ini menjadi bukti munculnya berbagai inisiatif dari tingkat regional dan lokal untuk membangun infrastruktur manusia untuk sektor publik dan swasta. Mereka tidak ingin elit

¹⁶⁰ Pravda, *Op. cit.*, hlm. 173.

¹⁶¹ *Ibid.* hlm. 174.

¹⁶² *Ibid.*

politik, ekonomi dan administrasi diserahkan bebas sesuai dengan keinginan pasar, apalagi untuk daerah yang miskin. Untuk itu dibentuk departemen pengkaderan di berbagai yuridiksi untuk mencari kandidat prospektif untuk masuk dalam daftar cadangan di birokrasi, semenjak ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan universitas.¹⁶³

Kemunculan kembali daftar kader cadangan memberikan kesempatan bagi politisi dan birokrat senior untuk membangun suatu hubungan patron dengan didasarkan kepada loyalitas. Namun, pembentukan daftar cadangan dari kader yang loyal melupakan prinsip dasar dari reformasi birokrasi yaitu perekrutan dengan sistem merit, yang mensyaratkan suatu kompetisi terbuka untuk posisi yang kosong. Pada institusi dimana daftar cadangan dilakukan, pemegang kekuasaan tidak harus mengikuti aturan kompetisi yang fair yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang. Dengan daftar kader cadangan, seleksi terhadap personel dapat dilakukan dengan cepat dan tidak transparan. Tidak hanya membuat pengurangan jumlah pendaftar, tetapi sistem ini meningkatkan klientalisme dengan menghubungkan kesuksesan *rezervisty* bagi politisi atau birokrasi tingkat tinggi yang mampu merekrut serta mengeliminasi daftar cadangan. Hal ini menyebabkan patron hanya akan melayani kepentingan dari orang yang telah merekrutnya. Pada periode kepresidenan Putin kedua, semakin terlihat bahwa terjadi peningkatan sistem patronase. Lembaga kepresidenan mempunyai kekurangan dalam memonitor calon kader. Hasilnya, proposal pemerintah untuk memberlakukan sistem rotasi kader, yang mempunyai efek positif pada era Soviet untuk mengurangi hubungan politik lokal, gagal untuk dilakukan. Selain itu, tidak ada *senior executive* yang dapat dipergunakan oleh presiden untuk memperkirakan posisi-posisi strategis para pejabat di administrasi tingkat federal dan regional.¹⁶⁴

Koordinasi rekrutmen yang dilakukan oleh pemimpin politik dengan kepala departemen dapat terjadi hanya pada tingkat kota atau regional, namun tidak terjadi di tingkat nasional. Pada poin ini terlihat bahwa karena sistem cadangan ini menjadi hambatan bagi otoritas presiden, maka presiden melakukan kontrol ketat terhadap elit lokal atas personel administrasi di wilayahnya. Jika

¹⁶³ *Ibid.* hlm. 174-175.

¹⁶⁴ *Ibid.* hlm. 175.

Putin ingin menggunakan daftar cadangan sebagai instrumen kekuasaan presiden, ia akan perlu untuk mengembangkan mekanisme kelembagaan yang mengontrol pengangkatan kader untuk daftar cadangan kader di Moscow dan provinsi-provinsi.¹⁶⁵

Patronase di Rusia juga melibatkan kelompok elit bisnis. Seperti elit bisnis di Amerika Serikat, Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya, pejabat Rusia secara reguler mencampurkan antara sektor publik dan privat. Pola ini terjadi lebih jelas pada era Putin. Menurut Kryshantovskaya dan White, 15,7 persen dari pimpinan utama merupakan perwakilan bisnis besar dibawah Putin, sedangkan pada masa Yeltsin tidak lebih dari 2,3 persen. Pada sektor bisnis sistem daftar kader cadangan juga diberlakukan. Contohnya departemen pengkaderan republik mempunyai hak untuk membentuk daftar cadangan bagi seluruh perusahaan besar yang dimiliki oleh negara. Di beberapa tempat di Red Belt, selatan Moscow, suatu pemerintahan regional membuat kebijakan penggabungan perekrutan yang membuat daftar cadangan kader untuk memimpin organisasi publik dan juga privat.¹⁶⁶

Perluasan kekuasaan negara melalui daftar kader cadangan untuk mengisi posisi penting di sektor privat memperlihatkan kebijakan intervensi negara dalam sektor bisnis yang telah dimulai pada tahun 1990an. Dengan menentukan personel yang memegang perusahaan besar, Yeltsin dan kelompok terdekatnya, membentuk generasi pertama komunitas bisnis Rusia. Namun, dengan banyaknya aset-aset badan usaha milik negara yang dikuasai oleh pengusaha swasta, negara harus mengadopsi metode berbeda jika ingin meneruskan pengaruhnya dalam rekrutmen elit bisnis. Salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan praktek Soviet yaitu mengintegrasikan pemimpin perusahaan dalam sistem patronase yang dikontrol oleh negara; cara lainnya adalah memperkerjakan orang yang dianggap menjadi ancaman; atau mengintimidasi dan mengeliminasi pemimpin bisnis. Putin mengambil resiko yang lebih besar, dengan dua kebijakan utama; sistem daftar kader cadangan pada sektor pekerjaan privat; dan penangkapan elit bisnis oposisi untuk kepentingan politik, dapat menekan

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Simon Clarke, *The Development of Capitalism in Russia* (London: Routledge, 2007), hlm. 227.

investasi luar negeri, serta menghapuskan perbatasan antara sektor publik dengan privat.¹⁶⁷

Penggunaan sumber administrasi oleh aparaturnegara untuk kemenangan United Russia tidak bisa diragukan. Menurut laporan dari *Organization for Security and Cooperation in Europe's Office for Democratic Institution and Human Right* (OSCE/ ODIHR) menyatakan pemilihan Duma tahun 2003 menguntungkan United Russia, karena adanya keuntungan dalam bantuan instansi pemerintah untuk menggunakan sumber-sumber administrasi negara. Keadaan ini mengaburkan status aparaturnegara antara simpatisan United Russia atau aparat birokrasi. Terjadi partisipasi aktif dari administrasi lokal dalam mendukung United Russia. Laporan OSCE/ ODIHR menemukan di banyak kasus, kandidat United Russia berkampanye di kantor-kantor pemerintahan daerah. Kandidat dari UR menyangkal menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Di beberapa wilayah di Rusia, pemilih memilih kandidat karena adanya tekanan. Contohnya, di St. Petersburg, kandidat dari Yabloko dan Union of Right Forces harus menghadapi tekanan serius dari administrasi saat kampanye. Kandidat Yabloko Anatoly Golov mencontohkan ia kesulitan dalam mendistribusikan bahan-bahan kampanye; kelompok-kelompok yang seharusnya menerima bahan-bahan kampanye diperintahkan dari pemerintah lokal untuk tidak menerima tulisan-tulisan dan iklan-iklan kampanye selain partai United Russia.¹⁶⁸

Dengan memberikan dukungan secara pribadi kepada United Russia, contohnya; dengan mendorong bawahannya untuk memobilisasi sumber daya negara untuk mendukung kandidat United Russia, dan dengan menggunakan kekuatan administratif untuk menunda hasil pemilu jika tidak sesuai keinginannya, Putin telah mengkonsentrasikan kekuatan yang sangat besar sebagai presiden.

¹⁶⁷ Alexander Chepurenko, "The Oligarch in Russian Mass Conciousness" dalam White, *Op. cit.*, hlm. 122.

¹⁶⁸ David White, "Victims of Managed Democracy? Explaining the Electoral Declined of The Yabloko Party" dalam Jurnal *Demokratizasiya*, Vol. 15 Number 2 (Spring 2007), hlm. 220, bersumber dari situs <http://www.demokratizatsiya.org/bin/pdf/DEM%2015-2%20White.pdf> yang diakses pada tanggal 25 Mei 2012 pukul 01.25 WIB.

BAB 4

PEMBATASAN MEDIA DAN PEMANFAATAN MEDIA UNTUK PARTAI UNITED RUSSIA

4.1 Tahapan Transformasi Media di Rusia

Media merupakan sarana komunikasi yang berpengaruh di Rusia. Penggunaan media sebagai alat propaganda memang telah berkembang sejak masa Uni Soviet. Sejak saat itu, media memiliki peranan yang penting, baik sebagai media informasi, propaganda, bahkan masuknya nilai-nilai demokrasi. Pada masa pemerintahan Uni Soviet, media berada di bawah kontrol dari pemerintah. Media tidak memiliki kebebasan. Pada masa Gorbachev dan Yeltsin, media mulai dapat mandiri dan memiliki kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan.¹⁶⁹

Lembaga media massa di Rusia mendapatkan kemerdekaannya dari pemerintah semenjak awal tahun 1990an. Perubahan itu, untuk pertama kalinya, baru pertama kali diperbolehkan kepemilikan media oleh individu atau organisasi non-pemerintah yang dimulai pada Juni 1990. Sebelumnya pada masa itu media massa dimiliki dan dikontrol oleh pemerintah. Saat ini masih terdapat lembaga media yang dimiliki setengah atau sepenuhnya oleh pemerintah.¹⁷⁰

Sejak 15-18 tahun perusahaan media massa berada pada transisi dari model administratif-birokratik ke model pasar dan demokratisasi. Dengan berakhirnya kepemilikan total media massa oleh pemerintah, lembaga-lembaga ini untuk pertama kalinya menemukan keuntungan dari industri ini. Sebelumnya lembaga ini disubsidi dari pemerintah. Sebagai tambahan dari peran tradisional media massa sebagai menyebar informasi, media harus belajar aturan dalam pasar. Walaupun pemerintah sebagai pemilik media massa masih dilihat sebagai agen yang tidak tertarik pada keuntungan, tetapi mereka juga tertarik pada kemampuan media massa mempengaruhi publik melalui konten. Lembaga swasta dan individu

¹⁶⁹ Ekaterina Shmykova, "Effects of Mass Media Ownership on Serving Public Interest" yang bersumber dari situs http://web.mit.edu/comm-forum/mit5/papers/Ekaterina_Shmykova.pdf diakses pada tanggal 7 Juni 2012 pukul 16.29 WIB.

¹⁷⁰ *Ibid.*

yang memiliki media massa harus memastikan bahwa media massa memiliki keuntungan yang cukup untuk tetap bertahan.¹⁷¹

Di Rusia, terkait dengan permasalahan kepemilikan, dapat dibagi ke dalam tiga fase pembangunan pasar media. Fase pertama adalah privatisasi (1990-1995), yang mempunyai karakteristik monopoli dari negara pada peralatan komunikasi hingga kemunculan aktor-aktor swasta. Fase ini dimulai ketika Glasnost tahun 1985. Gorbachev mendukung pembebasan pers dalam rangka mendapatkan dukungan dari publik bagi program reformasi yang tidak didukung oleh Partai Komunis Uni Soviet. Hal ini berarti pers diperbolehkan untuk meliput berbagai kejadian bersejarah dan secara bertahap menciptakan ketertarikan dan keinginan masyarakat untuk membaca surat kabar. Semenjak pengembalian pasukan Uni Soviet dari Afghanistan, pers dan bahkan stasiun televisi menjadi sangat independen dan sulit bagi Partai Komunis untuk memecat jurnalis atau editor. Seperti pada sektor ekonomi lainnya, transisi ini memiliki momen yang tidak jelas dan terkadang menghasilkan keuntungan bagi pebisnis yang mempunyai hubungan dengan elit politik dan memiliki mekanisme ilegal untuk memanipulasi media. Periode antara tahun 1990 hingga awal 1992 disebut oleh McNair sebagai Tahun Emas bagi kebebasan media. Hal ini adalah periode ketika tampilan publik dari berita di media berkembang secara spektakuler. Sementara ketika institusi sosial dan politik jatuh, media kembali meraih statusnya semenjak akhir 1980an. Terjadi peningkatan profesionalisme dalam publikasi, dan adanya keinginan untuk memisahkan antara melaporkan dengan mengomentari. Pada saat yang sama media berita memperluas kerjasamanya dengan Boris Yeltsin dan menjadi basis kekuatan yang penting bagi dirinya.¹⁷²

Fase kedua yang disebut *oligarchization* terjadi pada pertengahan 1990an dan didominasi oleh oligarkh, pemilik media terstruktur dan terdistribusi diantara mereka. Fase terakhir adalah yang terjadi pada masa Vladimir Putin yaitu strategi untuk menempatkan partai berkuasa Partai United Russia, yang disebut sebagai de-oligarchization. Kelompok oligarkh, bersedia atau tidak, harus meninggalkan

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Adele del Sordi, "Parties, Media Control, and Power in Post Soviet Russia and Kazakhstan", bersumber dari situs <http://www.ecprnet.eu/databases/conferences/papers/884.pdf> yang diakses pada tanggal 17 Oktober 2011 pukul 08.30 WIB.

bisnis media, dan memberikannya kepada negara sehingga dikontrol penuh ataupun sebagian oleh negara.¹⁷³ Sebelum melakukan kontrol terhadap media, pemerintahan Putin terlebih dahulu pada awal tahun 2001 mengambil alih sebagian besar saham dari media elektronik dan cetak.¹⁷⁴ Media elektronik dan cetak secara keseluruhan hampir dikuasai seluruhnya oleh negara. Struktur kepemilikan menghasilkan terdapat tiga tipe kepemilikan media; pertama, perusahaan-perusahaan negara seperti VGTRK, ITAR-TASS, Ria ‘Novosti’; kedua, kepemilikan gabungan antara perusahaan swasta dengan negara, contohnya Channel 1. Tipe Kepemilikan selanjutnya adalah perusahaan, terdapat beberapa sub tipe, media yang berisi tentang sektor-sektor di luar bisnis media (Prof-Media, Gazprom-Media), perusahaan besar dengan berbagai kepentingan (AiF, MK) dan perusahaan dengan isi bisnis media (Radio Russkaja Media Group, Hachette Fillipacci-Sckulev, Id Rodionov). Sedangkan keberadaan perusahaan luar, biasanya lebih independen dalam keuangan dan konten, memang tetap ada tetapi terbatas pada media hiburan dan publikasi dalam bahasa Inggris.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

Tabel 4.1
Kepemilikan Media Massa di Rusia Masa Pemerintahan Vladimir Putin

Media yang Dimiliki oleh Negara	Media yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Moscow	Media yang Dikontrol oleh Negara	Media yang secara Tidak Langsung Dikontrol Negara	Media Independen
Stasiun Berita				
RIA Novosti				Interfax
ITAR-TASS				
Media Cetak				
Rossiyskaya Gazeta	Tverskaya 12		Seven Days Publishing House	Onexim Group
Parlamentskaya Gazeta	Vechernyaya Moskva			Expert Media Holding
Moskovskiye Novosti				Media B
Radio dan Stasiun Televisi				
VGTRK Holding	TV Center	Channel 1	NTV	National Media Group
89 Televisi Regional dan Stasiun Radio	Moscow 24		TNT	Prof Media
Zvezda Media Group	Radio Center		Ocho of Moscow	YuTV Holding
Rossiya 24			First Popular	STS Media
Zvezda Media Group			City FM	
			Detskoye Radio	

Sumber: Tai Adelaja, "Coming in Age in New Age" *Russia Profile*, Fall 2011: 26.

Tidak sulit untuk membayangkan pengaruh elit politik dalam pembuatan keputusan di perusahaan negara. Hal yang menarik adalah bagaimana melihat beberapa perusahaan yang secara resmi disebut “swasta” berada dalam pengaruh pemerintah federal. Contoh yang jelas terjadi pada Gazprom-Media, perusahaan media yang 94,14% sahamnya dikuasai oleh perusahaan Gazprom, yang telah berubah menjadi perusahaan negara yang terbuka, tetapi negara tetap sebagai penguasa saham terbesar. Gazprom-Media termasuk salah satu perusahaan yang aktif dalam memperoleh aset media pada awal tahun 2000, disaat disebut perang informasi. Hasil terbaik dari kebijakan de-oligarchization adalah pengambilalihan Grup Media Most yang sebelumnya dikuasai oleh Vladimir Gusinsky oleh Gazprom-Media. Media Most berkembang di tahun 1990an, dengan bantuan bantuan dari lembaga birokrasi Boris Yeltsin, termasuk berkembangnya radio yang terkenal Echo of Moscow dan stasiun televisi kontroversial NTV, yang terkenal atas kritik tajamnya terhadap perang Chechen Kedua dan dukungannya pada partai oposisi Fatherland pada pemilihan tahun 1999. Kremlin membiarkan Media Most terus berkembang, sehingga dapat menjadi senjata ketika negara berusaha untuk mengambilalih kontrol dari grup ini, bekerjasama dengan melanggar aturan fiskal dan pidana; negara tiba-tiba meminta hutang yang dimiliki oleh grup ini, dan Gusinsky ditahan pada awal tahun 2000. Setelah bernegosiasi dengan Menteri Informasi, Gusinsky mengundurkan diri dari pemilik Media Most dan kabur ke Spanyol, sedangkan grup Media Most dibubarkan di awal tahun 2001 oleh aparat pajak yang berwenang.¹⁷⁵

Terkait dengan landasan hukum mengenai kepemilikan media, kurangnya pembahasan undang-undang mengenai media, sehingga pada masa Uni Soviet diatur oleh aturan partai dan lembaga birokrasi. Undang-Undang pertama mengenai media masa diadopsi pada masa Uni Soviet pada Juni 1990, saat periode *glasnost*: sensor dihilangkan dan untuk pertama kali kebebasan atas informasi, dan bagi partai politik diproklamasikan. Bunyi pasal dari Undang-Undang ini memberikan landasan bagi dan untuk aturan pertama bagi media

¹⁷⁵ *Ibid.*

massa di Rusia. Undang-Undang ini meskipun diubah beberapa kali, teks awal tersebut masih digunakan hingga saat ini.¹⁷⁶

Pada kasus Rusia, saat prosedur registrasi mudah dan transparan, aturan untuk izin siaran stasiun televisi dan radio ditentukan secara de facto oleh kontrol negara. Aturan “Media Massa” (Pasal 30) diperkenalkan suatu lembaga independen yang berwenang dalam memberikan izin siaran, suatu lembaga yang belum pernah didirikan. Aturan ini kemudian diubah dengan aturan baru dengan sistem yang lebih kompleks, penugasan untuk frekuensi udara dan terkait izin harus berdasar pada izin dua lembaga yaitu Kementerian Komunikasi dan Kementerian Informasi. Selain itu, opini dari Komisi untuk Pemancar, yang sebagian independen, juga dibutuhkan. Seperti dicatat oleh pengamat Alexey Simonov, Stasiun televisi yang berada dibawah kontrol negara, eksistensinya tergantung pada lembaga pemerintah dan tidak dapat independen. Izin siaran dapat dicabut dengan mudah oleh lembaga yang telah memberikan izin sebelumnya, dan bukan melalui pengadilan, yang memberikan keputusan yang tidak adil, dengan basis pelanggaran terhadap prosedur, dan pelanggaran atas aturan “Pada Media Massa” dan “Pada Iklan.” Selain itu pemberi izin siaran dapat menutup media tanpa alasan yang jelas, dan mereka sering menggunakan hak ini, terutama jika pemberi izin berasal dari lembaga negara. Para pemilik stasiun televisi tidak mempunyai hak yang jelas.¹⁷⁷

Wilayah lain dimana undang-undang dan aplikasinya digunakan untuk mengontrol media adalah adanya hak terhadap penyerangan harga diri dan fitnah secara personal. Aturan ini merupakan warisan dari praktek Soviet, ketika kritik adalah alat yang kuat dalam mendiskreditkan dan mengeliminasi musuh politik yang masih hidup. Undang-Undang terhadap hak ini memiliki berbagai bagian untuk manipulasi. Di Rusia, contohnya, sejak aturan “terhadap media massa” memperkenalkan tugas mengawasi fitnah di media, Aturan Kode Sipil tahun 1996 memberikan sistem lain, yaitu memberikan pengadilan untuk menentukan

¹⁷⁶ Norwegian Helsinki Committee, “Freedom of Expression in Russia (2011)” yang bersumber dari situs http://www.nhc.no/filestore/Dokumenter/Ytringsfrihet_2011/Russland/FreedomofexpressioninRusshort.pdf diakses pada tanggal 6 Juni 2012 pukul 08.38 WIB.

¹⁷⁷ del Sordi, *Loc. Cit.*

kesalahan atau pelanggaran terhadap penyerangan harga diri seseorang dan hukuman yang harus diberikan.¹⁷⁸

Hal ini menekankan pada aspek hukuman daripada rehabilitasi terhadap figur publik, dan tidak berkontribusi terhadap pengembangan toleransi daripada kritisi. Selain itu, untuk pencemaran nama baik dan pelanggaran martabat pejabat publik, media/wartawan harus membayar denda tinggi yang sering merusak masa depan mereka untuk menerbitkan suatu tulisan, dan terkadang hingga dipenjara. Ketakutan merupakan salah satu alasan utama terjadinya fenomena sensor-sendiri dan semakin rendahnya kualitas jurnalisme, tidak hanya di Rusia tetapi juga hampir seluruh negara-negara Commonwealth of Independence (CIS). Aspek lainnya yang semakin membuat kondisi menjadi buruk adalah, jurnalis yang mengkritik figur publik, maka ia sulit untuk menerbitkan segala bentuk produk jurnalistik, dan sulit untuk mendapatkan publikasi.¹⁷⁹

4.2 Media Massa pada Masa Pemerintahan Vladimir Putin

Rusia menampilkan suatu paradoks komunikasi dimana terdapat banyak sumber informasi namun sedikit demokrasi. Negara ini memiliki sejumlah sumber informasi media untuk menyampaikan pendapat melalui media televisi, cetak, dan online. Stabilitas ekonomi media Rusia di bawah kepresidenan Vladimir Putin, terutama televisi, turut meningkatkan kemajuan media di negara ini. Namun tampak jika media Rusia kontemporer mempunyai kedekatan erat dengan tradisi Soviet dibandingkan model Barat lainnya. Keragaman sumber informasi telah meningkat, tetapi ide mengenai media yang objektif dan seimbang tidak pernah diadopsi oleh media Rusia. Seluruh segmen dari masyarakat Rusia, termasuk para politisi hingga publik termasuk jurnalis, memandang media massa sebagai pemain politik daripada pengawas atau pengontrol yang dapat mengontrol kekuasaan politik. Meskipun tidak ada lagi sensor negara terhadap media Rusia seperti masa Soviet dahulu, tetapi media Rusia tidak bebas untuk berkontribusi di dalam proses demokrasi di negaranya. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial-masyarakat seperti kurangnya keinginan dalam menciptakan jurnalisme yang seimbang dan objektif, penggunaan media sebagai pion politik oleh para pemimpin, dan penerimaan

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

publik terhadap media dengan adanya anggapan jika media sebagai suara dari penguasa bukan pemasok informasi.¹⁸⁰

Rusia memiliki gabungan kepemilikan media antara negara dan swasta. Bagi warga negara yang kaya di kota-kota seperti Moscow dan St. Petersburg, mereka dapat mendapatkan keragaman media seperti yang dimiliki oleh warga negara Eropa Barat. Terdapat televisi yang dimiliki oleh negara dan juga swasta. Bagi mereka yang mampu dapat menggunakan satelit untuk mengakses televisi yang ada di Eropa Barat. Stasiun radio, meskipun sebagian besar menyampaikan musik, tetapi mereka juga menyampaikan sejumlah berita. Terdapat pula majalah yang berisi spektrum politik dan ekonomi, dan surat kabar dari surat kabar yang berisi mengenai bisnis keuangan dunia hingga surat kabar yang hanya berisi iklan-iklan.

Namun demikian, terdapat dua faktor kunci yang hilang dalam gabungan kepemilikan media di Rusia. Pertama, tidak ada stasiun televisi sentral yang melayani kepentingan publik. Televisi negara *Channel 1* memberikan berita-berita dengan kualitas tinggi dan berbagai program lainnya, tetapi tampak bias dengan dukungan terhadap pandangan politik Kremlin. Sebagai tambahan, sumber informasi internet masih terbatas terutama di wilayah-wilayah Rusia yang belum berkembang, sehingga tidak terdapat alternatif berita politik atau diskusi.¹⁸¹

Para penonton televisi di Rusia memiliki sejumlah pilihan acara televisi. Dua stasiun televisi yang dimiliki negara secara konsisten memiliki penonton terbanyak; *Channel 1* (atau dikenal dengan nama *The First Channel*) 51% sahamnya dikuasai oleh pemerintah Rusia, dan stasiun televisi *Rossiya* (Russia) yang dimiliki penuh oleh negara. Kedua stasiun televisi ini memiliki berbagai acara seperti acara berita *prime-time*, hiburan, dan program diskusi analisa, meskipun demikian mereka semakin terbatas dalam keragaman pandangan politik

¹⁸⁰ "Limitless Threat, Limited Choices?: Party Messages and News Framing in the 2003 and 2004 Russian Elections" dalam Sarah, Oates, Lynda Lee Kaid, dan Mike Berry. *Terrorism, Elections, and Democracy: Political Campaign in the United States, Great Britain, and Russia* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), hlm. 145.

¹⁸¹ Marianna Poberezhskaya, "Broadcasting Climate Change: State and Media" bersumber pada situs <http://www.ecprnet.eu/MyECPR/proposals/reykjavik/uploads/papers/1181.pdf> yang diakses pada tanggal 5 Juni 2012 pukul 21.38 WIB.

dari waktu ke waktu. Contohnya saja salah satu acara diskusi mingguan di stasiun televisi Rossiya tidak pernah mengkritik kebijakan yang dibuat oleh Kremlin.¹⁸²

Televisi komersial (swasta) terutama jaringan televisi NTV ditonton oleh sebagian masyarakat Rusia. Televisi regional tetap populer di Rusia, hal ini disebabkan sering menampilkan informasi kesehatan dan isu sosial yang tidak terdapat pada televisi nasional. Beberapa stasiun televisi regional juga memasukkan diskusi mengenai peran Chechen, dan isu-isu sensitif seperti *xenophobia* dan korupsi. Namun, muncul rencana pemerintahan Putin yang berusaha untuk mengontrol sejumlah jaringan regional televisi dengan mengkonsentrasikan kepemilikan kepada sejumlah kecil pemilih. Meskipun banyak sumber informasi dari media, namun hanya sedikit informasi yang objektif dan seimbang bagi masyarakat/pemilih. Media Rusia sebagian besar diisi oleh kepentingan politik, terutama oleh Kremlin dan Presiden Vladimir Putin.¹⁸³

Menurut ranking *Freedom House*, Rusia berada posisi yang sama dengan Kazakhstan, Sudan dan Yaman yaitu di posisi 170 pada *Freedom of the Press World Rankings* di tahun 2008. Organisasi yang berpusat di Amerika Serikat ini memasukkan Rusia pada daftar yang rendah dari 195 negara disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah adanya kemungkinan perubahan undang-undang sehingga pemerintah dapat mensensor media yang dianggap mengancam keamanan negara. Selain itu, *Freedom House* juga menemukan sejumlah bukti pembunuhan terhadap jurnalis yang meliput partai politik alternatif pada Kampanye Pemilihan Duma tahun 2007. Terdapat bukti kekerasan terhadap jurnalis, termasuk kematian misterius dua reporter yang disebut bunuh diri dan penyerangan terhadap jurnalis yang berusaha untuk meliput demonstrasi politik di tahun yang sama.¹⁸⁴

Rusia bukanlah satu-satunya negara yang mempunyai undang-undang membatasi media demi kepentingan keamanan negara, tetapi undang-undang ini digunakan untuk menghadapi kelompok oposisi yang mengkritik kebijakan atau tindakan pemerintah. Menurut laporan *Freedom House*, kampanye parlemen pada pemilihan Duma, Desember 2007 menampilkan erosi kebebasan pers dalam

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Norwegian Helsinki Committee, *Loc. cit.*

negara. Indikasi yang tampak adalah kematian sejumlah jurnalis sebagai akibat profesi yang ia kerjakan. Menurut laporan *Freedom House* di tahun 2007, setidaknya terdapat empat jurnalis (selain kasus kematian Anna Politkovskaya yang terkenal) yang terbunuh. Kematian para jurnalis sebagian besar karena resiko berada di tengah pertempuran antara angkatan bersenjata Rusia dengan kelompok Chechen.¹⁸⁵

Diluar zona perang, kekerasan terhadap jurnalis Rusia juga terjadi. Kasus yang terkenal adalah pembunuhan Anna Politkovskaya di tahun 2006 yang menulis secara mendalam mengenai perang Chechen bagi surat kabar liberal *Novaya Gazeta* di Moscow. Politkovskaya ditembak di dalam elevator di gedung apartemennya di Moscow ketika ia pulang ke rumah dari berbelanja. Tidak ada tersangka dalam kasus ini. Meskipun kematiannya memunculkan berbagai komentar di dunia internasional, Presiden Putin menyebutkan bahwa Politkovskaya hanya memiliki pengaruh kecil pada kehidupan politik di Rusia.¹⁸⁶

Namun, kebebasan media seringkali mengakibatkan terdapat pemberitaan-pemberitaan yang melemahkan legitimasi dari pemerintah, seperti yang terjadi pada pemerintahan Gorbachev dan Yeltsin. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka Vladimir Putin merasa bahwa perlu adanya pembatasan terhadap media. Putin mulai menghancurkan kebebasan dari jaringan media televisi dengan pengaturan dan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dilakukannya terhadap NTV yang selama ini banyak melakukan kririk terhadap pemerintah.¹⁸⁷ Selain itu, Putin juga sempat melakukan tindakan tegas terhadap jurnalis yang menulis artikel yang sangat kritik terhadap pemerintah. Pembunuhan jurnalis Anna Politkovskaya yang kritis terhadap Kremlin, Oktober 2006, tidak terungkap hingga kini.¹⁸⁸ Dengan demikian maka pemerintah dapat mengontrol pemberitaan yang dilakukan dan secara tidak langsung dapat pula mengawasi opini masyarakat yang terbentuk.

Kebebasan media seringkali mengakibatkan terdapat pemberitaan-pemberitaan yang melemahkan legitimasi dari pemerintah, seperti yang terjadi

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Allen C. Lynch, *How Russia Is Not Ruled* (New York: Cambridge University Press), hlm.161.

¹⁸⁸ "Putin: Delapan Tahun Masa Tugasnya", diakses dari <http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3151203,00.html> diakses pada tanggal 13 Mei 2012 Pukul 18.25 WIB.

pada pemerintahan Yeltsin. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka Vladimir Putin merasa bahwa perlu adanya pembatasan terhadap media. Putin mulai membatasi kebebasan dari jaringan media televisi dengan pengaturan dan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dilakukannya terhadap NTV yang selama ini banyak melakukan kririk terhadap pemerintah.¹⁸⁹

Semenjak Putin berkuasa, media elektronik menjadi perluasan dari kekuasaan negara, hal ini disebabkan oleh 4 faktor.¹⁹⁰ Faktor pertama media berita penting Rusia dikuasai oleh sejumlah pebisnis kaya atau dikontrol langsung dari negara. Sebagian besar dari pemilik media tidak masuk bisnis media untuk menghasilkan uang tetapi untuk menambah teman atau meningkatkan pengaruh politik. Keadaan ini terpengaruh oleh realitas ekonomi dari industri periklanan Rusia, yang sulit untuk membiayai sebuah surat kabar secara independen. Hal ini menjadi alasan mengapa semenjak pertengahan dekade 90-an perimbangan kekuasaan telah merubah dari jurnalis yang profesional menjadi jurnalis yang sesuai dengan keinginan pemilik media yang mengeluarkan uang untuk menjaga media tetap bertahan. Terdapat beberapa contoh dari editor atau seluruh karyawan media dipecat setelah pemilik baru mengambil alih. Kondisi ini membuat kesulitan bagi jurnalis yang terpercaya untuk didengar oleh masyarakat.

Faktor kedua adalah jurnalis yang profesional harus mengikuti adanya aturan tidak tertulis diantara para jurnalis dan perjanjian mengenai nilai-nilai dan etik profesional. Beberapa penelitian mengindikasikan perasaan ini tidak hanya kuat diantara jurnalis di Rusia. Menurut Svetlana Juskevits yang melakukan survey terhadap jurnalis di St. Peterburg dan membagi kelompok-kelompok utama dalam jurnalis. Kelompok pertama adalah generasi tua yang dilatih dan dipekerjakan masa Soviet. Mereka masih terus memandang jurnalisme adalah kegiatan sosial yang penting yang bekerjasama dengan penguasa. Generasi muda lebih heterogen mereka memandang bahwa jurnalisme sebagai karier dan mereka bekerja atas dasar keinginan sendiri. Mereka berorientasi pada peran baru sebagai penghibur masyarakat melalui agenda sensasional dan mereka memandang

¹⁸⁹ Lynch, *Op. cit.*, hlm.161.

¹⁹⁰ Simon Kruse Rasmussen, "Russia's Dependent Media: The Rise and Fall of Trustee Journalism" yang bersumber dari situs www.simonkruse.dk/trustee.pdf yang diakses pada tanggal 5 Juni 2012 pukul 18.46 WIB.

jurnalisme sebagai *public relations* (hubungan masyarakat) untuk promosi kepentingan politik dan ekonomi klien media. Kedua kelompok menerima bahwa fungsi politik jurnalisme adalah sebagai mesin propaganda. Hal ini berbeda dari tradisi jurnalisme barat. Juskevits menekankan, masyarakat Rusia juga mendukung peningkatan kontrol negara terhadap media. Alasan yang kuat adalah hilangnya kredibilitas media berita semenjak awal tahun 1990an. Hal ini juga terkait kepentingan pemilik dan juga beberapa kasus korupsi yang terjadi pada jurnalis, dengan dibayar untuk memberitakan informasi negatif mengenai rival politik.

Faktor keempat adalah kebijakan Putin dalam menyatukan pandangan antara televisi nasional dengan Kremlin menjadi faktor utama menyatunya media elektronik dengan kepentingan Kremlin. Dengan mengambil posisi kuat terhadap oligarkh yang mendapat kekuasaan saat Yeltsin, Putin mampu dalam menggunakan media sebagai alat untuk merekonstruksi kekuatan negara. Pernyataan publik Putin di media menyebutkan dua diskursus yang berbeda: diskursus mengenai demokrasi, yang berargumen bahwa media yang bebas merupakan pilar demokrasi, bagian dari demokrasi dan diskursus mengenai tanggung jawab yang menekankan tanggungjawab media dalam meliput agenda dalam cara yang benar. Diskursus pertama berorientasi nilai rasional sementara diskursus kedua adalah tujuan rasional. Diskursus kedua terkait dengan peliputan isu-isu penting negara seperti keadaan darurat nasional, serangan teror dan sebagainya, dan dalam contoh tersebut diskursus tanggungjawab lebih mendominasi. Dengan pemikiran yang sama seperti dibalik kebijakan membuat stasiun televisi mendekat kepada pandangan Kremlin.

4.3 Media dan Pemilihan Umum.

Aktivitas media pada saat kampanye dan pemilihan umum juga penting. Di Rusia, ketentuan utama yang mengatur partisipasi media dalam proses pemilihan umum terdapat dalam Undang-Undang “Garansi Dasar bagi Hak-Hak Pemilihan dan Hak Warga Negara dalam Federasi Rusia untuk Berpartisipasi dalam Referendum” (2002). Prinsip yang diadopsi adalah kesempatan yang seimbang, meski secara umum memadai, tetapi aturan ini memiliki sejumlah celah

untuk penyalahgunaan media: misalnya, saat aturan melarang jurnalis untuk mengambil keuntungan atas posisi mereka saat kampanye, tidak disebutkan bagi pemilik media, seseorang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk menyalahgunakan medianya. Aturan lain yang menyebabkan keterbatasan atas kebebasan informasi adalah larangan bagi jurnalis untuk mendukung secara terbuka kandidat manapun.¹⁹¹

Sejak tahun 1991, di Rusia terdapat lima kali pemilihan umum untuk Duma, majelis rendah parlemen. Pada saat pemilihan pertama, di tahun 1993, peran dari media tidak terlalu relevan, karena mereka sedang menghadapi krisis ekonomi dan langkanya popularitas. Salah satu alasan adalah rendahnya dukungan dalam pemilihan umum, Duma tidak mendapat reputasi yang baik dan bagi banyak masyarakat, ikut dalam pemilihan hanya bukti protes. Peran media baru mulai relevan saat pemilihan legislatif tahun 1995, dalam konteks kampanye pemilihan yang adil dan berimbang, stasiun televisi nasional utama mendukung partai baru yang liberal dan demokratis dan mengkampanyekan secara aktif sebagai bentuk dukungan. Hasilnya, Partai Komunis memperoleh 22% suara, sementara kandidat dari partai yang didukung Kremlin kalah. Media sebenarnya dimobilisasi beberapa bulan kemudian, untuk pemilihan presiden, membangun suatu kampanye dalam menghadapi kemungkinan kembalinya komunis. Dukungan mereka terhadap terpilihnya Yeltsin di Kremlin krusial. Tentunya hubungan dengan antara Yeltsin, lingkaran dalam, dan oligarkh yang mengontrol media memiliki pengaruh dalam organisasi kampanye menciptakan ketakutan irasional akan kembalinya komunis: tetapi alasan media mendukung secara terbuka terhadap Yeltsin adalah janji untuk mendukung kebebasan informasi, semacam *gentleman's agreement* bahwa dalam jangka pendek untuk memastikan kemenangan bagi Yeltsin dan bertahannya media swasta independen dan setengah independen. Dalam jangka panjang, meskipun perjanjian ini berujung pada hilangnya kemerdekaan bagi kelompok media, dan menjadi serangan yang mudah bagi pemerintah ketika Yeltsin tidak lagi berkuasa yang dianggap sebagai pendukung kebebasan media.¹⁹²

¹⁹¹ del Sordi, *Loc. cit.*

¹⁹² *Ibid.*

Perjanjian ini tetap berlaku, dan saat kampanye pemilihan umum untuk pemilihan umum selanjutnya tahun 1999 terjadi perang informasi dalam dunia nyata. Media secara terbuka mendukung dua partai yang berusaha menjadi partai berkuasa. Pada satu sisi terdapat partai Fatherland-All Russia yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Yevgeny Primakov dan Walikota Moscow Yury Luzhkov. Partai ini memiliki kesempatan untuk mencetak hasil yang bagus pada pemilihan Duma dan juga memasukkan nama seorang kandidat yang dapat maju menjadi presiden. Sementara itu dengan dukungan yang bias dari media, kesuksesan dicapai oleh Partai Unity, partai baru Kremlin yang memperoleh 23% suara, dan Vladimir Putin ikut dalam pemilihan presiden yang berlangsung beberapa bulan kemudian. Media yang mendukung Unity dan Putin yaitu stasiun televisi ORT, yang kemudian dikontrol oleh kelompok Logo Vaz, kelompok Boris Berezovsky, sementara TV-6 dikontrol oleh kelompok yang dekat dengan Luzhkov, mendukung OVR. NTV, pada sisi yang berbeda lebih seimbang tetapi mendekati pada Union of Right Forces. Mungkin untuk menentukan media yang adil yaitu stasiun televisi RTR, meskipun negatif terhadap Fatherland-All Russia.¹⁹³

Kampanye pemilihan sejak tahun 1993 hingga 2008 merefleksikan ketakutan akan kekacauan dan pengarahannya terhadap pemilih Rusia. Konstitusi Rusia tahun 1993, telah mengatur suatu demokrasi yang berdasar pada partai politik dengan mendukung formasi partai politik dan menciptakan aturan liberal saat berkampanye. Hal ini termasuk waktu luang bagi partai politik dan kandidat, peliputan partai dan kandidat secara adil dan setara pada media negara, termasuk kebebasan partai politik dan kandidat untuk mengumpulkan dana untuk membayar sejumlah waktu untuk iklan kampanye di televisi. Harus dicatat bahwa tidak ada dari aturan ini yang membawa pada perlakuan yang adil bagi partai politik, baik dilihat secara logistik maupun politis. Sejumlah kecil partai politik mempunyai sumber daya untuk menggunakan waktu luang di televisi nasional, yang sering memunculkan materi yang membosankan, tidak jelas dan terkadang menyerang partai politik atau kandidat lain. Seluruh media telah gagal meliput seluruh partai secara adil, misalnya daripada mendukung sekutu politiknya, media

¹⁹³ *Ibid.*

cenderung menjelek-jelekan orang-orang yang menantang sponsor politik mereka. Komisi Sentral Pemilihan Umum Rusia telah gagal untuk menjamin peliputan yang adil bagi seluruh partai politik, justru mereka sering memberikan info yang membingungkan dan tidak jelas mengenai aturan peliputan pemilihan umum.¹⁹⁴

Hanya sedikit partai yang didanai (secara ilegal) dari anggaran pemerintah yang dapat membeli sejumlah waktu iklan pada televisi nasional. Aturan pemilihan umum dan partai politik telah diamandemen, terutama oleh administrasi Putin setelah pemilihan Duma tahun 2003. Amandemen ini telah menyulitkan partai baru untuk mengorganisasikan partainya karena mereka harus memiliki cabang di tingkat nasional tidak hanya pada satu atau dua kota besar. Tingkat organisasi di negara yang sangat luas ini sangat sulit tanpa dukungan pemerintah atau kemampuan untuk menjalankan sebuah kampanye informasi melalui media massa.¹⁹⁵

Jika melihat pada masa pasca komunisme, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Boris Yeltsin untuk menciptakan partai politik yang kuat pada dasarnya mengalami gagal, melalui partai pro-Yeltsin Pilihan Rusia (*Russia's Choice*) tampil relatif buruk pada pemilihan Duma tahun 1993. Pada tahun 1999, Kremlin telah belajar bagaimana untuk membuat partai politik (Unity, yang kemudian menjadi United Russia) yang memeluk retorika nasionalis dan patriotik dengan cara yang beresonansi dengan mayoritas pemilih Rusia. Keberhasilan pemasaran dilengkapi oleh liputan media yang bias dengan mengecualikan suara-suara politik lainnya serta perubahan hukum yang mendukung partai pro-pemerintah membuat partai ini menguat. Pada pemilu 2007, aturan partai yang disetujui tahun 2005, harus memenuhi persyaratan ketat untuk mendaftar. Partai politik harus memiliki cabang di seluruh negara Rusia serta mendapatkan setidaknya 7 persen suara dengan sistem proporsional untuk mendapatkan kursi Duma. Hal ini memiliki efek membatasi pihak yang tidak memiliki akses ke birokrasi negara terutama terkait uang dan organisasi. Pada pemilu 2007 Duma,

¹⁹⁴ Rick Simon, "Media, Myth and Reality in Russia State-Managed Democracy yang bersumber dari situs <http://www.clas.ufl.edu/users/bmoraski/Simon-Media04.pdf> yang diakses pada tanggal 7 Juni 2012 pukul 22.10 WIB.

¹⁹⁵ *Ibid.*

partai pro-Kremlin United Russia mendominasi dengan memperoleh 64 persen dari seluruh jumlah suara.¹⁹⁶

Pada pemilihan Duma tanggal 7 Desember 2003 terdapat sedikit dikusi mengenai kebijakan, *platforms*, atau bahkan ideologi dalam kampanye. Namun, kampanye didominasi oleh agenda Putin, lingkaran kecil elit Kremlin, dan pesan solidaritas dan nasionalisme Rusia. Pada pemilihan 2003 yang masih menggunakan sistem campuran, sistem proporsional dimenangkan oleh partai pro-Kremlin, Partai United Russia (38 persen dari jumlah suara), Partai Komunis (13 persen), Liberal Demokrat (11 persen), dan partai nasionalis baru dengan nama Motherland (9 persen). Partai liberal Yabloko telah gagal mendapatkan kursi di Duma. Penerapan *managed democracy* yang dilakukan Putin menyulitkan partai-partai politik selain United Russia dalam melakukan kampanye melalui media cetak dan televisi. Putin membatasi media cetak dan televisi pada masa menjelang kampanye Pemilihan Duma pada tahun 2003.¹⁹⁷

Periode kampanye pemilihan Rusia telah diatur satu bulan sebelum hari pemilihan, dengan larangan laporan kampanye 24 jam sebelum pagi hari saat pemilihan umum. Semenjak pemilihan umum tahun 1993, terjadi berbagai trend penting dari stasiun televisi negara Channel 1 dan stasiun televisi swasta NTV. Mereka memiliki dua peliputan berita yang berbeda. Meskipun berita komersial telah hilang semenjak tahun 2003, namun masih terdapat pemberitaan mengenai kritik terhadap kebijakan pemerintah. Program berita the *Vremya* (Waktu) di Channel 1 terlihat bias, program ini melaporkan pemberitaan mengenai berbagai tokoh yang berkuasa dan dekat dengan kepentingan Kremlin. Individu yang berani menentang Kremlin dilaporkan dengan pemberitaan yang negatif. Channel 1 memiliki jangkauan terluas di Rusia dan dianggap sebagai stasiun televisi yang paling populer. Sedangkan NTV saat pemilihan tahun 2003 juga merupakan salah satu stasiun televisi terpopuler bagi masyarakat Rusia, NTV dapat menjangkau sekitar 75 persen dari populasi masyarakat Rusia, atau terutama di wilayah sekitar perkotaan.¹⁹⁸

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ del Sordi, *Loc. cit.*

¹⁹⁸ Emy Wangborg, "Russian Media and Democracy under Putin" yang bersumber dari situs http://www.sras.org/russian_media_and_democracy_under_putin diakses pada tanggal 30 Mei 2012 pukul 14.40 WIB.

Presiden Vladimir Putin adalah tokoh yang dominan dalam program berita di dua stasiun televisi terbesar di Rusia. Dengan pemberitaan yang dominan ini, Putin selalu dihubungkan dengan United Russia terkait dengan seluruh aspek kebijakan atau tindakan dalam program berita Channel 1, *Vremya*, saat pemilihan parlemen tahun 2003. Seluruh berita penting dilaporkan dengan menghubungkan dengan presiden, termasuk pemimpin partai pro-pemerintah United Russia dan hubungan politik yang dekat dengan presiden, bagaimana Putin memimpin pemerintahan sentral dan menyelesaikan masalah regional, dan bagaimana Putin membuat Russia kembali berperan dalam politik internasional.¹⁹⁹

Putin juga menjadi figur sentral dalam program berita NTV, *Sevodnya* (Hari Ini), tetapi tidak seperti *Vremya* pemberitaan tidak dihubung-hubungkan dengan segala aspek yang dekat dengan Putin. NTV tidak terlalu fokus pada peran Rusia di dunia internasional dan lebih kepada isu-isu umum. Pemberitaan internasional tahun 2003 terkait masalah konflik di Georgia. *Sevodnya* masih membicarakan berita tentang pertempuran di Chechen. Jika dilihat *Vremya* lebih serius dan otoritatif. Sedangkan gaya *Sevodnya* lebih santai dengan menggabungkan antara gaya sensasional dan ironis pada satu waktu.²⁰⁰

Kampanye untuk pemilihan legislatif di tahun 2003 (dan untuk pemilihan presiden) dipersiapkan secara akurat oleh Putin dan dengan melakukan berbagai tindakan (seperti pengambilalihan NTV dan reformasi undang-undang terkait partisipasi media pada kampanye pemilihan umum) bertujuan untuk memastikan kontrol negara terhadap media dan kesuksesan pemilihan umum bagi partai United Russia yang mendapatkan 37,57% suara.

¹⁹⁹ Tara Warner, "NTV Takes Center Stage as Final Episodes Unfold" yang bersumber dari http://russiajournal.com/archive/The_Russia_Journal/2001/April/06.04.2001/Analysis/Apr.06-04.pdf yang diakses pada tanggal 20 Mei 2012 pukul 22.24 WIB.

²⁰⁰ Wangborg, *Loc.cit.*

Tabel 4.2
Tabel Persentase Pemberitaan Televisi Mengenai Subjek Politik
dalam Program Berita TV Rusia pada Pemilihan Duma tahun 2003

	Yabloko	YeR	SPS	KPRF	LDPR	Motherland	Presiden
First Channel	2,48	18,42	2,77	11,94 *	2,49	2,27	36,16
Russia TV	5,06	16,01	6,33	14,70 *	3,43	1,48	35,41
NTV	2,94	5,96 **	13,36 **	5,88 *	6,87 **	3,34	34,83
TV Center	5,61	21,93	1,66 **	13,92 *	5,83	1,52	23,01
Ren TV	2,97**	9,14	19,16	5,14 *	15,90	7,07**	12,82**
Rata-Rata	3,81	14,29	8,65	10,32	6,90	3,14	28,44

Catatan:

* Mengindikasikan pemberitaan negatif lebih dari 50%

** Mengindikasikan pemberitaan negatif lebih dari 25%

YeR= United Russia; SPS= Union of Right Forces; KPRF= Communist Party of Russian Federation; LDPR= Liberal Democratic Party of Russia

Sumber: David White, "Victims of Managed Democracy? Explaining the Electoral Decline of The Yabloko Party" dalam Jurnal *Demokratizatsiya*, Vol. 15 Number 2 (Spring 2007), hlm. 219, bersumber dari situs <http://www.demokratizatsiya.org/bin/pdf/DEM%2015-2%20White.pdf>

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pemberitaan mengenai Partai United Russia dan Vladimir Putin jauh lebih besar daripada partai-partai lain. Terutama pada Channel 1 (18,42% untuk United Russia dan 36,16% untuk Presiden Putin) dan Russia TV (16,01% untuk United Russia dan 35,41% untuk Presiden Putin) sebagai stasiun televisi terbesar dan mampu menjangkau lebih dari 95% wilayah di Rusia. Sedangkan bagi partai lain seperti Partai Komunis Rusia, pemberitaan di lima stasiun televisi yang diteliti pemberitaan negatif lebih dari 25-50%. Untuk partai-partai lainnya seperti Liberal Demokrat, Yabloko, Union of Right Forces, dan Motherland; tidak banyak masuk pemberitaan di televisi. Namun, khusus bagi Union Right Forces, pemberitaan mereka di Ren TV cukup besar mengungguli pemberitaan mengenai United Russia dan Presiden Putin. Hal ini disebabkan karena stasiun televisi ini masih dimiliki oleh kelompok liberal namun hanya menjangkau hanya di kota-kota besar Rusia.

Tabel 4.3
Tabel Persentase Pemberitaan
Media Cetak Mengenai Subjek Politik
pada Pemilihan Duma tahun 2003

	Yabloko	YeR	SPS	KPRF	LDPR	Motherland	President
<i>Parlamentskaya gazeta</i>	3,24 **	10,24	4,08 **	4,31 *	2,49	2,04	9,44
<i>Rossiiskaya gazeta</i>	4,08 *	22,28	7,93 **	8,67 *	2,75 *	7,98*	15,27
<i>Moskovskii komsomolets</i>	18,42	30,42 **	12,26 *	3,22 *	> 1,00 *	2,38 *	10,93 **
<i>Komsomolskaya pravda</i>	12,45	17,59 **	10,92 **	5,92 *	4,87 *	7,07 **	11,54 **
<i>Kommersant</i>	1,95 **	9,16 *	11,93 *	8,79 *	4,04 *	3,91 *	17,58 *
<i>Novaya gazeta</i>	3,81	21,61*	15,11 **	8,04*	5,09 *	4,75 *	20,58*
<i>Argumenty i fakty</i>	17,95**	19,19 **	9,86 *	2,82 *	2,47 *	16,38 **	12,40
Rata-Rata	10,00	18,64	10,30	5,96	3,50	6,36	13,96

Catatan:

* Mengindikasikan pemberitaan negatif lebih dari 50%

** Mengindikasikan pemberitaan negatif lebih dari 25%

YeR= United Russia; SPS= Union of Right Forces; KPRF= Communist Party of Russian Federation; LDPR= Liberal Democratic Party of Russia

Sumber: David White, "Victims of Managed Democracy? Explaining the Electoral Decline of The Yabloko Party" dalam Jurnal *Demokratizatsiya*, Vol. 15 Number 2 (Spring 2007), hlm. 219, bersumber dari situs <http://www.demokratizatsiya.org/bin/pdf/DEM%2015-2%20White.pdf>

Tidak banyak berbeda pemberitaan media cetak di Rusia saat pemilihan Duma tahun 2003, sebagian besar masih memberitakan mengenai Partai United Russia baik berita-berita yang positif maupun negatif. Pada media cetak, pemberitaan mengenai Presiden Putin tidak sebesar di stasiun televisi. Pembaca koran yang semakin berkurang dan daya jangkauannya yang tidak seluas televisi membuat fokus United Russia dan Kremlin tidak lagi di media cetak. Sehingga media cetak sedikit lebih berani dalam memberitakan berbagai kejadian-kejadian dan fenomena saat kampanye 2003.

Kampanye pemilihan umum bagi pemilihan legislatif berlangsung pada Desember 2007 hampir sama, baik metode dan hasil. Dukungan bagi partai United Russia oleh media negara kembali sangat luas. Seperti yang dilaporkan oleh sekelompok pengamat pemilihan umum, adalah sulit bagi pemilih untuk

mendapatkan informasi pilihan yang seimbang karena media yang dibiayai negara gagal dalam mengemban amanat publik untuk memberikan peliputan yang berimbang dan objektif. Hasil yang luar biasa didapat oleh United Russia (64,3% suara), selain itu, dibentuk suatu partai baru pro-Kremlin yang bernama A Fair Russia yang dipercaya dibuat oleh administrasi Putin.²⁰¹

Keterpilihan Vladimir Putin sebagai presiden menciptakan banyak perubahan dalam sosial-politik media. Putin memiliki banyak modal politik dari kemenangannya pada pemilihan umum dan dukungan publik bagi programnya dalam membangun kembali kapasitas negara, menguatkan power-vertical dan menghilangkan kekuasaan oligarkh. Kremlin tidak hanya berlawanan dengan jurnalis secara individu tetapi seperti yang telah dijelaskan diatas adanya konflik antara Kremlin dengan kekaisaran media Vladimir Gusinsky, Media Most, kelompok media anti pemerintah. Kritik tajam terhadap kebijakan ini diberikan dari luar Rusia, tetapi bagi dalam negeri kejadian ini tidak ditanggapi secara serius. Pada survey pada musim gugur tahun 2003 menunjukkan bahwa 36% dari masyarakat melihat bahwa peningkatan kontrol negara terhadap media sebagai sesuatu yang positif, sementara 25% berfikir bahwa kebijakan tersebut merugikan, dan 39% lainnya merasa acuh tidak acuh. Jurnalis dari NTV dua kali berusaha untuk untuk menciptakan stasiun televisi baru tetapi percobaan ini gagal karena hambatan administratif dan pajak yang diciptakan oleh penguasa.²⁰²

Pada tahun 2003 negara secara de facto mengontrol tiga stasiun televisi nasional. Sementara terdapat semi-independen program di NTV, gerakan ini merepresentasikan tindakan melanggar pluralisme dalam media. Hal ini diikuti semakin menurunnya dukungan pentingnya media cetak, yang tidak tersentuh dalam kampanye Kremlin.²⁰³

Semua media cetak telah berubah dari sumber informasi bagi masyarakat umum menjadi sumber informasi bagi elit politik dan bisnis. Masyarakat Rusia memperoleh informasi dari menonton berita di TV dan negara berpengaruh sehingga kepemilikan pada stasiun televisi penting.

²⁰¹ del Sordi, *Loc. cit.*

²⁰² Rasmussen, *Loc. cit.*

²⁰³ *Ibid.*

Beberapa tahun terakhir, strategi dalam membatasi peliputan media terus berlangsung. Saat terjadi insiden Kursk tahun 2000 dan pengepungan tahun 2002, terdapat kritik secara sporadis kepada penguasa. Seiring dengan waktu pengepungan sekolah di Beslan tidak mendapat liputan yang kritis terhadap penguasa. Talkshow politik terakhir yang bisa dianggap independen di NTV ditutup pada tahun 2004. Hingga saat ini media elektronik semakin sesuai dengan Kremlin.²⁰⁴



²⁰⁴ *Ibid.*

BAB 5

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG SISTEM PEMILIHAN UMUM DAN ATURAN PARTAI POLITIK

5.1 Perubahan Undang-Undang Sistem Pemilihan Umum

Semenjak periode Soviet, Rusia menggunakan sistem pemilihan umum distrik dengan mengkombinasikan ambang batas bagi calon anggota legislatif. Mekanisme ini dilaksanakan pada 17-18 Maret 1990 untuk memilih 1068 kursi Kongres Deputi Rakyat Federasi Rusia yang masih dibawah kekuasaan Uni Soviet. dibandingkan dengan pemilihan Soviet, sistem ini terbagi dalam dua tahapan, dimana masing-masing wilayah mendapat 168 kursi yang tidak sama besar. Rusia adalah republik federal yang asimetris; terdapat 16 Republik Otonom Rusia yang berhak untuk 5 kursi di teritorial masing-masing, lima Oblast Otonom Rusia dengan 2 kursi masing-masing dan 94 unit lainnya diberikan 1 kursi masing-masing. Sisa 900 kursi dialokasikan bagi konstituen-konstituen yang lebih kecil dan digabungkan dengan teritorial-teritorial yang lebih kecil agar mencapai batas yang telah ditentukan.²⁰⁵ Meskipun secara Undang-Undang Kongres ini memiliki kekuasaan legislatif yang tidak terbatas, pada prakteknya kongres ini hanya berfungsi dalam pemilihan 376 anggota Supreme Soviet, sebuah lembaga legislatif tingkat nasional yang dibentuk pemerintahan Mikhail Gorbachev berfungsi sebagai lembaga legislatif negara hingga dijatuhkan presiden Boris Yeltsin di tahun 1993. Sebelumnya, sebagai alternatif dari perdebatan mengenai pilihan aturan pemilihan umum, dibentuklah Sub-komite dalam Komite Konstitusional Soviet.

Draft awal peraturan baru pemilihan umum diberikan pada Juli 1992, namun draft ini ditolak oleh *Supreme Soviet* karena dianggap tidak siap. Dengan pemilihan umum selanjutnya yang akan dilakukan tahun 1995, reformasi peraturan pemilihan umum bukan dianggap sebagai prioritas. Konflik antara Supreme Soviet dengan presiden yang terjadi di awal 1993, memunculkan ide kelompok masyarakat (mayoritas pendukung Yeltsin) untuk mempercepat

²⁰⁵ Stephen White, "Russia: The Authoritarian Adaptation of an Electoral System" dalam Michael Gallagher dan Paul Mitchell, *The Politics of Electoral System* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 315.

pemilihan umum pada tahun 1994 atau bahkan 1993. Ide ini ditolak oleh mayoritas anggota dari Kongres dan Supreme Soviet menolak, mereka menginginkan adanya aturan yang baku sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Aliansi yang didukung oleh mayoritas kelompok konservatif di Supreme Soviet tetap menginginkan sistem mayoritarian, sedangkan kelompok pendukung Yeltsin, yang dipimpin oleh Victor Sheinis, menakankan sistem campuran (*mixed*).²⁰⁶

Pertentangan ini tampak pada dua draft yang diberikan oleh komite pada Juni 1993. Draft A menggunakan sistem single member district atau two member district dengan kekuasaan plural. Draft B menerapkan *single member district* pada 70% pemilihan anggota legislatif dan 30% sisanya menggunakan sistem proporsional.²⁰⁷

Bagi Yeltsin, adanya sistem distrik di daerah menguntungkan kelompok komunis dan oposisi. Namun pada sisi yang berbeda, Yeltsin juga percaya bahwa anggota parlemen yang dipilih melalui sistem distrik dapat lebih mudah dikontrol dan dapat lebih mendukung presiden. Semenjak pemilihan tahun 1990, tampak dengan jelas bahwa sistem *single-member distrik* di ibukota Moskow dan kota St. Petersburg dipenuhi dengan nama-nama besar politisi yang maju menjadi anggota parlemen. Sistem campuran (*mixed*) menjadi kesempatan bagi politisi untuk dapat mengikuti di dalam sistem distrik ataupun berada pada daftar partai. Meskipun demikian 96 persen dari kandidat *single-member district* dinominasikan dari partai dan jugadimasukkan dalam daftar nasional sistem proporsional partai.²⁰⁸

Hubungan yang tidak baik antara Yeltsin dengan Supreme Soviet berakhir dengan dikeluarkannya aturan baru pemilihan umum dan konstitusi. Dengan menekan lembaga legislatif, Yeltsin tidak lagi memberlakukan konstitusi lama dan menyatakan bahwa parlemen baru akan dipilih dalam tiga bulan kedepan (Keputusan Presiden No. 1400, 21 September 1993). Keputusan presiden ini mendapat arahan dari Victor Sheinis. Menurut rekomendasi Sheinis, besaran anggota parlemen melalui sistem proporsional harus lebih besar. Arahan lainnya juga diberikan partai kanan dan pendukung pemerintah, *Russia's Choice*, yang

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 316.

²⁰⁸ *Ibid.*

menekankan merubah sistem *majority runoff* menjadi *simple plurality*. *Russia's Choice* beralasan sistem majority runoff akan menguntungkan kelompok tengah dan kanan (reformis) dan tidak menguntungkan partai pro-reformis seperti *Russia's Choice*. Selain itu, itu mengurangi kesempatan terpilihnya anggota parlemen dari sistem distrik, Yeltsin melarang penggunaan lambang partai atau afiliasi partai bagi calon anggota legislatif dari sistem distrik. Tidak adanya label partai berdampak luas terhadap fragmentasi pemilihan umum.²⁰⁹

Sistem paralel campuran (*the parallel mixed system*) mempunyai efek negatif bagi keterwakilan politik. Dalam sistem perwakilan proporsional, ambang batas menghalangi fragmentasi kepentingan yang besar karena bila kandidat memperoleh suara kurang dari 5 persen dari suara total maka ia dianggap memperoleh kursi nol untuk setiap calon partai. Menurut Pasal 70 Undang-Undang Pemilihan, mandat representasi proporsional didistribusikan dengan sistem sisa terbesar, dengan menggunakan kuota. Komisi Pemilihan Pusat menambah hak suara bagi partai-partai yang dapat melampaui ambang batas 5 persen dan membagi angka tersebut dengan 225 untuk menghitung kuota. Mandat yang tidak diklaim akan diberikan ke partai dengan sisa terbesar. Koalisi dan merger antara organisasi kecil harus dilakukan agar terdapat perwakilan dari mereka dalam lembaga legislatif.²¹⁰

Pada pemilihan di sistem distrik, kampanye dari kandidat individu akan mendapatkan dorongan yang besar jika ia dapat bekerjasama dengan kandidat lain di distrik yang berbeda untuk membentuk suatu kampanye tingkat nasional. Sehingga dalam teorinya akan membentuk setidaknya dua koalisi nasional para kandidat lembaga legislatif dari sistem distrik. Dalam sistem paralel campuran (*the parallel mixed system*), kegagalan partai dalam mencapai ambang batas dapat dielakkan dengan kemenangan calon individu dari sistem distrik. Dalam pemilihan-pemilihan umum, partai-partai kecil dapat memasukkan pemimpin mereka dalam lembaga legislatif melalui sistem distrik meskipun partai mereka gagal dalam melampaui ambang batas 5 persen dalam sistem proporsional. Sistem

²⁰⁹ Olga V. Shvetsova, "Russia: Compromising a Long-Lasting Transitional Formula", dalam Josep Colomer (ed.), *Handbook of Electoral System Choice* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), hlm. 385.

²¹⁰ *Ibid.*

distrik menjadi salah satu faktor pemecah belah karena pemilih non-komunis berada dibawah tekanan untuk segera berkoordinasi dalam memilih kandidat yang paling demokratis agar dapat mengalahkan kandidat dari partai komunis. Nominasi kandidat distrik seperti sebuah permainan, dimana kandidat yang demokratis diharapkan oleh banyak orang untuk segera menarik diri dari kompetisi pemilihan umum demi mencegah kemenangan komunis.²¹¹

Kegagalan koordinasi kelompok demokrat disebabkan banyaknya kasus tidak menyatunya pendukung demokrat. Tidak hanya kandidat dari partai-partai reformis yang tidak menyatu, baik pada pemilihan tahun 1993 dan 1995, terdapat pula salah satu distrik dimana dua kandidat *Russia's Choice* saling bersaing. Bila dihitung rata-rata, terdapat 6,8 kandidat terpilih dari sistem distrik pada tahun 1993, 12,1 persen di tahun 1995, dan 10 pada tahun 1999. Memang sistem distrik dengan tidak berbeda dengan negara-negara lain, dengan banyaknya jumlah kontestan dalam satu distrik, tetapi bagi transisi demokrasi di Rusia setiap kandidat memperoleh bagian dalam pemilihan distrik. Rata-rata keefektifan kandidat per distrik adalah 5,5 persen di tahun 1993, 6,6 persen di pemilihan tahun 1995 dan 5,6 persen di pemilihan tahun 1999. Serta rata-rata pemenang dari sistem distrik sebesar 30% dari seluruh kandidat. Selain itu, calon kandidat yang tidak berasal dari afiliasi partai, dapat berjalan dengan label independen dalam sistem perwakilan proporsional. Pada pemilihan tahun 1993, 667 kandidat distrik dinominasikan dari partai politik, sementara 822 lainnya melalui independen dan memenangkan 136 dari 225 kursi.²¹²

Secara keseluruhan sistem paralel campuran tampak berusaha untuk memperkuat konsolidasi partai. Pada saat yang sama institusionalisasi partai memodifikasi pengaruh institusi. Kemampuan dan stabilitas dukungan kepada Partai Komunis, kontras dengan cairnya partai yang diberi label kanan dan kanan-tengah. Partai-partai kanan-tengah dan kanan harus berjuang dalam meningkatkan dukungan dan harus berkonsolidasi di tingkat dalam partai, suatu kondisi yang telah dilakukan Partai Komunis semenjak masa Soviet. Partai Komunis berhasil memenangkan pemilihan umum baik melalui sistem proporsional maupun distrik. Keuntungan yang dimiliki oleh Partai Komunis dengan telah selesainya

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*, hlm. 386.

konsolidasi partai di dalam membuat partai tersebut tidak terpecah dan tidak terdapat partai ‘kiri’ lainnya yang menjadi saingan Partai Komunis.²¹³

Kandidat baik dari sistem mayoritarian dan proporsional dinominasikan melalui tanda tangan dari para pemilih, atau dengan membayar sejumlah biaya yang jika dijumlah mencapai 15 persen dari pengeluaran biaya kampanye maksimal yang diperbolehkan. Calon dari kelompok independen harus mendapat tanda tangan setidaknya dari 1 persen pemilih terdaftar sesuai dengan wilayahnya, jika pemilih terdaftar kurang dari 100.000, setidaknya dibutuhkan 1.000 tanda tangan. Prosedur yang sama dilakukan jika suatu partai politik atau blok meminta untuk menominasikan kandidat dalam sistem mayoritarian. Suatu partai atau bloc yang menginginkan memasukkan kandidatnya pada pemilihan tingkat federal (pusat), harus mendapatkan setidaknya 200.000 tanda tangan, dan tidak boleh melebihi 14.000 tanda tangan di setiap republik atau wilayah. Regulasi lain terkait penggunaan dana kampanye, tidak boleh melebihi 6.000.000 Ruble (atau sekitar AS\$ 200.000) bagi kandidat dengan sistem mayoritarian, atau tidak boleh 250.000.000 Ruble (atau AS\$ 8,3 Juta) bagi partai politik atau blok, pembiayaan kampanye tergantung pada inflasi tahunan di Rusia.²¹⁴

Presiden Rusia dipilih setiap empat tahun sekali. Dia adalah kepala negara, dan dibawah konstitusi didefinisikan sebagai pengatur kebijakan internal ataupun luar negeri negara. Kandidat harus warga negara Rusia, dengan usia tidak lebih dari 35 tahun, dan sudah tinggal di Federasi Rusia setidaknya sepuluh tahun. Tidak ada presiden Rusia yang bertugas lebih dari dua periode. Sesuai dengan undang-undang yang diadopsi Januari 2003, kandidat presiden Rusia didukung oleh kelompok yang berinisiatif yang terdiri setidaknya 500 warga negara, dan didukung oleh partai politik atau blok pemilihan umum; kandidat tidak harus menjadi anggota dari partai politik.²¹⁵

Sesuai dengan aturan pemilihan umum Desember 2002, pemenang dari sistem mayoritarian adalah seseorang yang memperoleh total suara terbanyak (jika terjadi total suara yang sama, pemenang adalah kandidat yang pertama kali mendaftar). Pemilihan dapat diulang, jika pemilih ‘menentang semua’ lebih

²¹³ Ross, *Op. cit.*, hlm. 21.

²¹⁴ Gallagher dan Mitchell, *Op. cit.*, hlm. 320.

²¹⁵ *Ibid.*,

daripada total suara kandidat yang terpilih, atau jika total pemilih tidak lebih dari 25 persen dari daftar pemilih. Bagi para perancang undang-undang ini, pilihan ‘menentang semua’ dianggap diinginkan untuk meningkatkan jumlah pemilih. Hal ini merupakan inovasi yang populer. Pada pemilihan Duma tahun 2003, contohnya, setidaknya hampir 3.000.000 masyarakat yang memilih pilihan ‘menentang semua’ atau mampu melebihi 4 partai dari 23 partai yang mengikuti pemilihan umum. ‘menentang semua’ merupakan kompetitor yang nyata saat pemilihan Duma, walaupun ada larangan untuk mengkampanyekan pilihan ini.²¹⁶

Pada sistem proporsional (daftar kursi) dialokasikan semua untuk partai politik atau blok yang dapat mencapai setidaknya 5 persen dari total suara, membuat setidaknya tiga dari partai berusaha untuk mencapai treshold dan mereka setidaknya mendapat 50 persen dari sistem proporsional. Jika gagal mencapai hal ini, partai-partai digabung dan akan dibuat ranking hingga jumlah suara setidaknya melebihi 50 persen dari suara proporsional dan setidaknya tiga partai masuk. Jika kurang dari tiga partai yang mencapai 50 persen atau lebih, partai lain akan diikutkan kepada pengurangan suara dalam rangka ketiga partai ini mencapai alokasi suara. Semenjak Pemilihan duma tahun 2007 dan seterusnya, treshold diubah menjadi 6 persen, dan setidaknya akan terdapat empat partai yang harus berbagi alokasi pada daftar partai (proporsional). Pemilihan dengan menggunakan sistem mayoritarian akan diulang jika jumlah peilih tidak melebihi dari 25 persen, dan jika tidak ada partai politik yang mencapai 5 persen dari total suara, atau jika semua partai secara bersama tidak dapat memenangkan lebih dari 50 persen total suara (secara teoritis memungkinkan jika ada kerusakan surat suara dan memilih ‘menentang semua’ dimasukkan dalam total jumlah suara). Prosedur dalam mengkonversi suara ke dalam kursi juga diatur dalam aturan pemilihan duma; ia mengikuti sistem Metode Hare.²¹⁷

Sistem pemilihan umum Rusia dibuat untuk menciptakan suatu perubahan politik, terutama pembangunan dari partai politik. Aturan pemilihan umum tahun 1993, mengidentifikasi asosiasi pemilihan umum sebagai badan yang memiliki hak untuk menominasikan kandidat dalam kompetisi sistem proporsional nasional, tetapi mereka dengan jelas memasukkan gerakan politik dan partai

²¹⁶ *Ibid.*,

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 321.

politik. Aturan pemilihan umum dibuat tanpa ada referensi terhadap partai politik sama sekali, memberikan alokasi hak untuk menominasikan kandidat dalam kompeksi nasional ke asosiasi pemilihan umum dan blok pemilihan umum yang merupakan kombinasi dari asosiasi pemilihan umum yang telah terbentuk untuk kepentingan pemilihan umum. Pada tahun 1993, 13 partai politik atau gerakan masuk dalam kertas suara; pada 1995 terdapat lebih 43 partai politik dan hanya sedikit yang dapat melewati *threshold* 5 persen. Undang-Undang tahun 1999, terus melanjutkan asosiasi pemilihan umum dan blok sebagai kendaraan yang dilalui oleh kandidat untuk dinominasikan dalam kontes nasional, dengan asosiasi didefinisikan sebagai ‘organisasi politik lainnya’ dan ‘gerakan’ sama seperti partai politik. Aturan yang baru pada pemilihan Duma tahun 2003, mendefinisikan hak-hak nominasi dalam beberapa cara dengan membatasi partisipasi pada kontes nasional bagi partai politik, atau blok pemilu yang terdiri atas dua atau tiga partai. Formulasi yang lebih ketat diikuti dengan adopsi aturan baru bagi partai politik pada diikuti dengan adopsi aturan baru partai politik pada Juli 2001, yang bertujuan untuk mengeliminasi sejumlah organisasi yang mengikuti pemilihan sebelumnya, termasuk perserikatan dagang dan pegawai di organisasi-organisasi dan partai-partai yang tidak pernah lolos *threshold*.²¹⁸

Peraturan Duma saat ini, diadopsi aturan pada tahun 2005 sebagai suatu seri pengaturan yang didesain untuk menguatkan kekuasaan eksekutif (terkait penyanderaan di Beslan, Kaukasus Utara). Peraturan khusus yang berubah adalah hilangnya 225 kursi untuk sistem mayoritarian. Semenjak Pemilihan Duma tahun 2007 dan selanjutnya Duma baru akan diisi oleh anggota-anggota partai politik yang lolos melalui sistem proporsional dengan *threshold* sebesar 7% (sebelumnya 5%) dengan alokasi kursi ditentukan oleh sistem Hare. Sebuah amandemen tahun 2006, menghilangkan kesempatan untuk memilih ‘menentang semua’ kandidat dan daftar partai. Amandemen selanjutnya yaitu pada tahun 2007, menghilangkan minimal persyaratan jumlah pemilih, jika sebelumnya yaitu minimal 25% dari jumlah daftar pemilih. Efek dan perubahannya adalah semakin memperluas kemampuan Kremlin untuk mengamankan dominasi parlemen dengan diisi para pendukungnya dengan sejumlah kecil elemen oposisi. Sesuai dengan aturan baru

²¹⁸ Stephen White, “The Duma Election in Russia, December 2007” yang bersumber pada Jurnal *Electoral Studies*, Vol. 28, No. 1, Mei 2009, hlm. 174.

pemilihan umum, partai yang memiliki perwakilan dalam Duma memiliki hak untuk menominasikan sejumlah kandidat tanpa melalui proses dari awal. Sedangkan partai lain harus disetujui oleh Komisi Sentral Pemilihan Umum, mereka harus mempunyai tandatangan setidaknya dari 200.000 pemilih atau membayar deposit pemilihan umum sebesar 60 juta Ruble (atau sekitar AS\$ 2,5 juta). Jika ditemukan lebih dari 5% tanda tangan tidak sah atau jika tanda tangan berada dibawah minimum, partai politik dapat ditolak untuk mendaftar. Dari 14 partai politik yang mengikuti pemilihan umum, tiga partai sudah berada di Duma yaitu United Russia, Partai Komunis Rusia, dan Partai Liberal Demokrat; empat partai mendaftar dengan membayar deposit pemilihan umum diantaranya: Union of Right Forces, Yabloko, Patriots of Russia dan Fair Russia. Partai lainnya lolos melalui pengumpulan tanda tangan. Tiga partai ditemukan mempunyai jumlah tanda tangan yang tidak sah yaitu partai the Greens, the People's Union, dan Peace and Unity Party. Partai Agrarian Party, Civic Force dan Democratic Party of Russia dan Partai Social Justice memenuhi persyaratan legal. Sehingga terdapat 11 partai yang tercantum dalam kartu suara, dengan total 4584 kandidat dalam daftar.²¹⁹

5.2 Perubahan Aturan Partai Politik

Peraturan baru pemilihan Duma yang diadopsi tahun 2005, menghilangkan *single-member constituencies* sehingga memberikan kesempatan kepada partai kecil dan independen, serta meningkatkan ambang batas perwakilan dari sebelumnya 5 persen menjadi 7 persen. Peningkatan ambang batas ini menguntungkan bagi partai-partai besar. Kremlin sendiri tidak menutupi jika ambisi mereka seperti yang dikatakan oleh Putin membentuk suatu partai yang normal dan *civilized* dengan 2, 3, atau 4 partai politik.²²⁰

Partai yang bergantung pada dukungan rezim, sulit untuk menentang segala kebijakan yang disponsori oleh Kremlin, meskipun kebijakan tersebut tidak populer dan menyengsarakan masyarakat. Ketergantungan lebih besar kepada dukungan penguasa daripada dukungan aktif dari anggota, membuat internal partai tidak kuat. Pengumpulan dana partai tidak efektif karena mengandalkan

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 175.

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 174.

dana dari pemerintah. Prioritas bagi anggota dikesampingkan karena pimpinan partai di Duma lebih mementingkan jual-beli suara untuk berbagai kepentingan termasuk untuk kepentingan orang yang ingin berkuasa. Akibatnya, dari beberapa Pemilihan Duma yang terjadi sebagian masyarakat memilih untuk tidak memilih semua kandidat. Pada Pemilihan Duma tahun 2003, lebih banyak masyarakat yang memilih tidak bagi calon-calon yang berasal dari partai. Menurut warga Rusia, mereka memiliki pengaruh kurang pada pemilihan umum meskipun mereka telah memilih salah satu perwakilan partai pada Pemilihan Duma. Untuk itu, mereka meminta pemulihan peran partai politik yang memungkinkan seluruh warga negara untuk mendapat kesempatan mewakili warga negara lainnya dalam lembaga legislatif.²²¹

Kekuatan organisasional partai-partai Rusia menjadi salah satu sub-topik yang dibahas oleh White. Konteks organisasional dalam partai politik dapat didefinisikan sebagai aturan dalam partai politik yang diadopsi pada peraturan Musim Panas tahun 2001. Perdebatan yang muncul terkait dengan isu-isu kontroversial, salah satunya adalah jumlah minimum anggota yang dibutuhkan. Tanpa dukungan dana yang besar dari sponsor atau dukungan dari struktur pemerintahan, sulit bagi suatu partai untuk mendapatkan jumlah anggota 10.000 orang yang mungkin akan menjadi halangan representasi bagi seluruh masyarakat. Pembatasan untuk membuat partai lokal atau regional juga membatasi hak-hak dari seluruh warga negara. Bagi pendukung *draft* pembuatan partai lokal menyatakan perlunya '*single political space*', partai lokal dibutuhkan dalam rangka membatasi kekuasaan penguasa daerah yang mungkin akan berakibat pada separatisme regional dan melemahkan pemerintah federal untuk mempengaruhi pembangunan di seluruh negara. Kepala Komisi Pemilihan Umum Rusia (*Central Electoral Commission*) menyatakan bahwa partai politik yang berdiri saat ini hanya partai untuk bangsa Rusia '*only be all-Russian parties*'.²²²

Pembiayaan partai oleh negara juga memicu berbagai kontroversi. Muncul ancaman mengenai independensi partai, yang juga berdampak pada semakin tidak populernya pemilihan umum. Terdapat dua perbedaan sikap yang

²²¹ Derek S. Hitchenson, *Political Parties in the Russia Region* (London: RoutledgeCurzon, 2003), hlm. 33.

²²² White, *Op. cit.*, hlm. 32.

diberikan oleh partai-partai non pemerintah. Bagi partai non-pemerintah seperti Partai Komunis Rusia, pembiayaan partai oleh negara tidak dapat dihindarkan. Menurut Gennadii Zyuganov, Ketua Partai Komunis Rusia, negara membiayai partai agar partai terbebas dari kepentingan sponsor kaya yang dapat mengontrol partai tersebut, selain itu pembiayaan dari negara membuat mereka terbebas dari kepentingan kelompok *oligarchs*. Pada akhirnya pasca-Pemilihan Duma tahun 2003, masalah pembiayaan partai diformulasikan dengan memberikan kebebasan bagi partai untuk tidak menerima pembiayaan dari negara, Partai *Union of Right Forces* (yang memiliki akses lebih banyak ke sponsor swasta dibandingkan dengan partai lain) yang tidak mendukung pembiayaan partai oleh negara menyambut aturan tersebut dengan positif.²²³

Menurut aturan partai politik, yang mengatur segala aspek aktivitas partai (*‘O politicheskikh partiyakh’*), bagi partai yang ingin mendaftar harus memiliki anggota minimal 50.000 orang (sebelumnya hanya diatur 10.000 orang, namun diamandemen tahun 2004). Sebagai tambahan, partai politik harus mempunyai cabang di lebih dari setengah daerah di Rusia, di setiap daerah harus memiliki keanggotaan minimal 500 orang, dan cabang-cabang partai di daerah lainnya harus memiliki anggota minimal 250 orang. Tujuan utama partai politik, menurut peraturan, adalah suatu formasi dari opini publik, pendidikan politik, artikulasi dari pendapat warga negara mengenai kehidupan sehari-hari, dan menominasikan kandidat dalam pemilihan umum untuk merepresentasikan suatu lembaga. Seperti negara lain, partai politik tidak boleh menyokong ekstrimisme dan menghasut sosial, rasial, nasional atau antipati terhadap agama tertentu. Partai harus terdaftar di negara secara nasional atau level lokal sesuai dengan dokumen yang ada; mereka harus memiliki aturan dan program. Seorang anggota harus berumur minimal 18 tahun dan boleh mempunyai keanggotaan di lebih dari satu partai. Partai, sesuai dengan aturan, dapat ikut dalam pemilihan umum dan referendum, mengadakan rapat dan mempropagandakan pandangan mereka. Namun pada kenyataannya partai hanyalah suatu badan yang hanya diperbolehkan mengikuti pemilihan umum dengan masing-masing kandidat, dengan juga terdapat calon independen yang berasal dari non-partai. Jika mereka gagal untuk mencapai

²²³ *Ibid.*, hlm. 33.

jumlah suara atau jumlah perwakilan dalam lembaga legislatif sesuai dengan aturan dalam waktu 5 tahun periode (atau dalam 2 kali pemilihan umum), maka mereka akan dibubarkan sesuai dengan instruksi dari Mahkamah Agung.²²⁴

Peraturan tahun 2001 juga menjelaskan mengenai sumber-sumber dana yang didapat oleh partai termasuk berasal dari iuran anggota, donasi dan pendapatan dari aktivitas partai, termasuk kegiatan komersil. Sumbangan dari individu dalam satu tahun tidak boleh 10 kali dari upah minimum rata-rata (pada tahun 2006 berarti tidak boleh dari 8.000 Ruble atau sekitar AS\$ 280). Donasi tidak boleh berasal dari negara asing, perusahaan atau warga negara asing, atau dari perusahaan Rusia dengan kepemilikan asing lebih atau sama dengan 30 persen, atau dari organisasi internasional atau lembaga pemerintahan negara asing. Tidak diperbolehkan donasi dalam satu tahun dari satu lembaga yang mencapai 100.000 kali dari upah minimum rata-rata. Peraturan menunjukkan suatu sistem baru dukungan negara bagi partai politik, meskipun dalam skala yang lebih sederhana. Iuran anggota pun dibatasi yaitu 5 Ruble (AS\$ 0,17) dikali dengan jumlah pemilih; calon independen dapat mengklaim tingkat pembayaran yang sama, mereka mendapatkan setidaknya 3 persen dari daftar tingkat nasional, atau jika kandidat memenangkan pada pemilihan presiden. Pembayaran dilakukan pertahun, sesuai dengan Pemilihan Duma, atau sekali pada pemilihan presiden, dan dapat berubah sesuai dengan inflasi.²²⁵

Dari survei yang dilakukan pada tahun 2005, tidak lebih dari 1 persen dari populasi dewasa yang menyatakan bahwa mereka anggota partai politik tertentu. Jika dibandingkan pada survei yang sama lebih dari 2 persen individu mengasosiasikan diri sebagai anggota dari kelompok masyarakat di kawasan perumahannya, 3 persen mengaku anggota dari kelompok musik dan seni, 6 persen mengaku anggota dari klub olahraga, dan 12 persen adalah anggota dari serikat dagang. Gambaran ini memperlihatkan sulitnya partai mendapatkan anggota ataupun loyalitas anggota. Namun terdapat sejumlah bukti dari beberapa partai menggunakan tiga daftar anggota yang berbeda-beda: pertama untuk konsumsi publik, kedua untuk Kementerian Keadilan/ *Ministry of Justice* dan terakhir untuk kepentingan internal. Partai *Liberal Democratic Party* contohnya

²²⁴ *Ibid.*,

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

menyatakan kepada Kementerian Keadilan memiliki 19.100 anggota, tetapi mengklaim memiliki 600.000 anggota kepada publik. Sama dengan LDP, Partai Komunis Rusia menyatakan memiliki anggota sebanyak 19.300 orang, tetapi kepada publik mengklaim memiliki 500.000 anggota. Partai *United Russia* turut melakukan tindakan yang sama. Berbagai konsultan atau perusahaan dipekerjakan untuk mengatur keanggotaan ini, termasuk pembuatan aturan dan keanggotaan, untuk pembayaran sekitar AS\$ 200.000; banyak dari partai-partai ini lebih menyukai mengamankan sedikit suara di pemilihan tingkat nasional daripada sejumlah anggota mereka rekrut sebelumnya.²²⁶

Jumlah keanggotaan di setiap partai sering kali berubah seiring dengan waktu. Partai Komunis Rusia, pada awal tahun 2000 memiliki anggota terbesar dengan 500.000 atau lebih anggota; tetapi keanggotaan tersebut terus menurun, Menurut Kementerian Keadilan pada awal tahun 2006 anggota Partai Komunis Rusia tidak lebih dari 184.000. *United Russia* sendiri mengalami penambahan jumlah anggota dari sebelumnya 300.000 pada akhir tahun 2001 menjadi 500.000 anggota; tetapi bagi banyak pihak peningkatan ini merupakan hasil dari cara-cara Soviet yang berdasarkan perintah dari atasan kepada bawahan. Di kawasan perbelanjaan di Kota Moscow, contohnya, setiap pedagang diminta untuk menyiapkan dua orang untuk menjadi anggota *United Russia*; pada kota Velikie Luki, pegawai pemerintahan daerah akan dipecat atau upahnya mengalami penundaan jika ia tidak menjadi anggota *United Russia*.²²⁷

Anggota, seperti di banyak tempat lainnya, berperan penting sebagai pendapatan utama dari partai politik. Dalam prakteknya terdapat sejumlah alternatif pendapatan partai politik. Bagi partai politik dengan jumlah anggota yang banyak (seperti Partai Komunis Rusia), iuran yang dibayarkan oleh anggota mempunyai peran yang signifikan bagi pendapatan partai. Pendapatan lain didapatkan dari negara, pada tahun 2006 sebanyak 270 juta Ruble atau sekitar AS\$ 9.5 juta dibagi ke 9 partai dan blok yang telah mencapai batas minimal 5 persen pada Pemilihan Duma tahun 2003. Hal yang lebih kontroversial, partai dapat secara langsung didukung oleh individu atau badan korporatisme. Aturan partai politik membatasi dukungan individu dan korporatisme dalam negeri, tetapi

²²⁶ *Ibid.*,

²²⁷ Hutcheson, *Op. cit.*, hlm. 35.

aturan ini dapat dihindari oleh partai politik, sumber dukungan utama bagi sebagian partai politik tetap berasal korporatisme bekas *oligarch* maupun non-*oligarch*.²²⁸

Partai politik, sesuai dengan aturan, harus selalu siap jika diinspeksi oleh pemeriksa pajak negara, dan harus memberikan laporan keuangan setiap tahunnya ke Kementerian Keadilan (sejak tahun 2006) atau ke Komisi Pemilihan Umum. Suatu kejadian menarik ketika Boris Berezovsky, salah satu pemimpin *oligarch*, muncul untuk mendukung salah satu partai; tetapi Kremlin memaksa agar perusahaan yang dimiliki oleh Berezovsky, *Interros* dan *Yukos*, tidak mendukung atau menyumbang sejumlah dana ke salah satu partai karena ditakutkan akan membuat partai tersebut tergantung pada Berezovsky. Beberapa eksekutif *Yukos* kemudian ikut dalam daftar calon anggota legislatif federal untuk Partai Komunis Rusia pada Pemilihan Duma tahun 2007. Namun, seperti partai lain, penempatan anggota legislatif federal hanya akan diberikan jika kontribusi dana yang besar dapat diberikan kepada partai.²²⁹

Partai Liberal Demokrat pada sisi yang berbeda, ia mengakut tidak mempunyai pendapatan yang reguler dari anggotanya, menurut Zhirinovsky, Ketua Partai Liberal Demokrat, jika mereka bisa membayar mereka akan membayar. Tetapi bagi sebuah partai di Rusia, dana operasional partai perbulan minimal AS\$ 500.000 atau 6 Miliar Ruble. Salah satu contohnya adalah Partai Liberal Demokrat menyatakan bahwa dana operasional partainya hanya AS\$ 20.000 per bulan; cabang-cabang di daerah mampu untuk membiayai sendiri, tetapi pusat tetap memberikan subsidi bagi cabang partai di daerah.²³⁰

Zhirinovsky menjelaskan, ia meminta pertolongan dana kepada setiap orang; termasuk penyumbang dana (sponsor), mayoritas berasal dari wilayah-wilayah di Rusia, walaupun partai ini tidak mempunyai pendukung jangka panjang. Partai Liberal Demokrat lebih memilih pembiayaan partai oleh negara.

²²⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

²²⁹ Richard Rose dan Neil Munro, *Elections without Order: Russia's Challenge to Vladimir Putin*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 133.

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

Selain itu mereka juga berusaha untuk mendapatkan pendanaan partai dari berbagai publikasi yang dibuat oleh partai.²³¹

Partai kiri-tengah, *Yabloko*, berusaha mendapatkan pendanaan partai dari anggota dan juga dari sponsor. Partai ini memungut iuran ke anggota partai sebesar 12 Ruble per tahun untuk memperbaharui kartu anggota, tetapi dengan jumlah anggota yang tidak banyak, sumber pendanaan partai ini tidak dapat melebihi 400.000 Ruble (AS\$ 12.600) setahun, yang berarti tidak cukup untuk operasional partai dalam lingkungan politik di Rusia. Mayoritas pendanaan partai ini berasal dasar sejumlah sponsor, sponsor ini tidak terbatas dari skala kecil hingga besar. Misalnya saja sponsor membiayai kantor partai di pusat Moscow ataupun di daerah, perjalanan dinas partai di dalam negeri maupun di luar negeri, pembayaran gaji staf partai. Pemimpin utama Yukos, Mikhail Khodorkovsky – *oligarch*, pada Pemilihan Duma tahun 2003 menyatakan dukungannya kepada *Yabloko* dan *Union Right Forces*. Menurut White, dukungan Khodorkovsky ini yang menyebabkan ia ditahan pada Oktober 2003 dengan tuduhan penggelapan pajak.²³²

Partai lainnya, *The Union of Right Forces*, mendapat bantuan dana dari *Unified Energy System* yang dikepalai oleh Ketua Partai Anatolii Chubais. Walaupun aturan partai tidak memperbolehkan satu sponsor berkontribusi lebih dari 10 persen dari pendapatan partai, tetapi partai ini mengklaim bahwa mereka mendapatkan dukungan dana dari ‘hampir seluruh’ kelompok *oligarch*. Partai ini satu-satunya partai yang tidak mendukung pembiayaan partai oleh negara. Iuran yang dibayarkan anggota pertahun 300 Ruble (AS\$ 10,30) atau secara simbolik 20 Ruble (AS\$ 0,68) bagi pelajar/mahasiswa, pensiunan, karyawan perusahaan negara, dan penyandang cacat. Pengeluaran terbesar partai adalah aparat di pusat dan daerah pada waktu di luar pemilihan umum. Namun pimpinan partai Boris Nemtsov menolak untuk memberikan detail yang lebih lengkap. Ia menyatakan bahwa pendapatan *The Union of Right Forces* tidak lebih dari United Russia, tetapi hampir sama dengan *Yabloko* atau Partai Komunis Rusia.²³³

²³¹ *Ibid.*,

²³² White, *Op. cit.*, hlm. 37.

²³³ Marlene Laruelle, *In the Name of Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia* (New York: Palgrave Macmillan, 2009), hlm. 17.

Suatu sistem komprehensif mengenai data keuangan partai baru-baru ini memperlihatkan bahwa *United Russia* masih dominan secara politik dan juga secara keuangan dengan pendapatan lebih dari 10 partai-partai lain. Semua partai politik besar, kecuali Partai Komunis Rusia, 80 persen pendapatannya berasal dari perusahaan swasta atau organisasi. Partai Komunis Rusia, memiliki pendapatan terbesar dari donasi individu, dan setengah dari pendapatannya dibayarkan oleh anggota partai (atau dengan kata lain sumber utama). Pengeluaran partai biasanya terdiri atas: pembiayaan sehari-hari untuk kantor pusat dan daerah, serta pengeluaran lain untuk mendukung pemilihan umum dan kampanye. Partai Liberal Demokrat adalah partai yang menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk kampanye partai. Partai ini juga merupakan partai yang mengalami kerugian terbesar meskipun *balance* pendapatan partai ini masih positif. Dari ke-36 partai yang terdaftar, mereka mendapatkan pendapatan 170 juta Ruble (atau sekitar AS\$ 6 juta) lebih banyak daripada yang mereka belanjakan.²³⁴

Selain itu, lebih dari 90 persen pendapatan partai berasal dari badan yang legal, dalam prakteknya bisnis swasta. Menurut salah seorang pemikir Moscow, para pengusaha mempunyai tiga alasan utama berinvestasi di partai politik. pertama adalah harapan pada partai yang akan menjamin stabilitas lingkungan bisnis – inilah alasan sebagian besar donasi diberikan ke partai yang dekat dengan Kremlin seperti *United Russia* dan *Party of Life* (yang dikepalai oleh Ketua Majelis Tinggi Rusia). Alasan kedua adalah harapan diberikannya tempat dalam daftar pemilihan legislatif oleh partai yang diberikan sumbangan. Motivasi ketiga adalah alasan ideologis, beberapa pengusaha masih menganut ideologi tertentu (komunis atau liberal) dan mendukung partai yang paling dekat dengan ideologi yang mereka percaya. Namun, *United Russia* sebagai partai yang tidak menganut ideologi komunisme ataupun liberalisme mendapat pendapatan yang berasal pengusaha lebih banyak daripada partai lainnya.²³⁵

Dari dana yang mereka dapatkan, partai-partai di Rusia memiliki banyak kesempatan lain untuk meningkatkan pendapatan –suara partai, contohnya, dapat diperdagangkan oleh para pemimpin partai dengan imbalan kerjasama bisnis, dan menjalin hubungan dengan *organized crime*. Sebuah indeks korupsi terhadap

²³⁴ White, *Op. cit.*, hlm. 38-39.

²³⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

partai politik dipublikasikan pada awal tahun 2006 oleh sekelompok akademisi independen. Dengan tidak memperhitungkan *United Russia*, ‘party of power’, karena subordinasi terhadap Kremlin dan tingginya derajat sentralisasi memberikan ruang yang kecil bagi pengayaan pribadi. Partai lainnya yang terkorup, dengan skala 10, adalah Partai Komunis (nilai 8,6), diikuti dengan *Yabloko* (nilai 7,9), *the Union Right Forces* (7,3), dan *Rodina* (6,5). Dapat disimpulkan bahwa partai yang berada pada struktur oposisi yang mengklaim akan membuat kondisi lebih baik terinfeksi dengan korupsi. Partai oposisi juga dianggap tidak terbuka, contohnya dalam penetapan daftar kandidat calon anggota legislatif, partai-partai oposisi masih tertutup dalam proses pencalonan anggota legislatif. Sehingga partai-partai ini dianggap tidak memberikan prospek perbaikan dan tidak lebih baik dari partai-partai pro-pemerintah.²³⁶

Setelah pemilihan umum berlangsung, terdapat partai yang gagal dalam mempertahankan posisinya karena ketidakcukupan kursi yang didapat sehingga membuat sponsor mengurangi bahkan tidak lagi memberikan sumbangan kepada partai. Partai *the Union of Right Forces* menyatakan bahwa setelah kegagalan mereka menembus ambang batas (*threshold*) pada Pemilihan Duma Desember 2003, *Unified Energy System* sebagai penyumbang dana terbesar mengurangi dukungannya kepada partai ini meskipun salah seorang ketua partai merupakan kepala *Unified Energy System*. Partai *Yabloko* mengalami kondisi yang lebih serius, selain tidak mampu melewati *threshold* yang ditentukan pada Pemilihan Duma 2003, *Yukos*, perusahaan yang mendanai *Yabloko* mengalami permasalahan terkait dengan pemimpinnya Mikhail Khodorkovsky yang ditahan oleh pemerintah. Kremlin tidak dapat menerima adanya *oligarch* yang tidak loyal yang mendukung partai oposisi, untuk itu Kremlin melakukan investigasi secara mendetail terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh Khodorkovsky.²³⁷

Media Rusia, seperti pada negara-negara industri, didominasi oleh televisi. Televisi di Rusia kepemilikannya didominasi oleh negara. Terdapat dua televisi nasional terbesar yang dikuasai oleh negara. Ketika meliput pemilihan umum, hingga saat ini, terlalu bias terhadap partai dan kandidat yang loyal kepada

²³⁶ *Ibid.*,

²³⁷ Stephen Fortescue, “Institutionalization and Personalism in the Policy Making Process of the Soviet Union and Post-Soviet Russia” dalam Fortescue, *Op. cit.*, hlm. 43.

Kremlin. Pada Pemilihan Duma Desember 1999, televisi negara mampu menjadi pendorong posisi *Unity* dan menjatuhkan citra partai *Fatherland-All Russia* yang tampil sebagai penantang kelompok ‘*Family*’ Boris Yeltsin. Televisi independen *NTV* yang mendukung partai-partai oposisi terutama Partai *Yabloko*, diambil alih oleh negara melalui monopoli gas negara pada tahun 2001 (pemilik sebelumnya, *oligarch* Vladimir Gusinsky ditahan). Pada pemilihan selanjutnya, pada Desember 2003, pengamat internasional menemukan bias dukungan terhadap *United Russia* melawan Partai Komunis. Televisi negara yang memiliki jangkauan terluas secara ‘terbuka mempromosikan *United Russia*’.²³⁸

Media lainnya seperti surat kabar turut mempunyai pengaruh terhadap opini masyarakat. Beberapa partai mempunyai surat kabar tersendiri, salah satunya adalah Partai Komunis Rusia. Surat kabar partai ini adalah *Pravda* yang memiliki sirkulasi hampir 65.000 eksemplar pada tahun 2000, dan sepertiga salinannya dibuat diluar Moscow dengan tambahan berita regional. *Pravda Rossii*, sebelumnya masuk di dalam surat kabar *Sovetskaya Rossiya* yang muncul seminggu sekali dengan sirkulasi sekitar 74.000 eksemplar yang diberikan terutama kepada anggota. Cabang partai di daerah kemudian membuat salinannya sebanyak 800.000 eksemplar seminggu sekali. Sehingga pers yang berhaluan ‘kiri-patriotik’ memiliki sirkulasi sebanyak lebih dari 2 juta eksemplar. Ada pula stasiun radio yang dimiliki oleh Partai Komunis, dan pada tahun 1997 situs resmi Partai Komunis dibuat. Situs ini mendapat kunjungan 500.000 pengunjung pada tahun 2000 (pemimpin partai Zyuganov memiliki sendiri situs bagi dirinya). Dengan demikian, sulit untuk berargumentasi jika ada partai lain pada era Post-Komunis yang memiliki kemampuan organisasional sebaik Partai Komunis Rusia.²³⁹

Negara sendiri dominan di berbagai wilayah, terutama melalui kontrol terhadap media elektronik, tetapi juga melalui sumber administrasi yang memperbolehkan negara untuk menggunakan aparat pemerintahan untuk mendukung partai dan kandidat yang disukai. Dukungan ini termasuk kendaraan (transportasi) dan jasa sekretaris, penggunaan ruang rapat, jasa percetakan dan publisitas, dan kemampuan mendistribusikan investasi publik sebagai cara untuk

²³⁸ White, *Op. cit.*, hlm. 40-41.

²³⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

memberikan ‘penghargaan’ bagi aparat lokal yang sangat mendukung partai dan kandidat yang disukai oleh Kremlin, serta untuk ‘menghukum’ aparat yang usahanya kurang berhasil.²⁴⁰

Elemen pluralisme diperkenalkan oleh *oligarch*, yang mampu menggunakan sumber daya pribadi untuk mempertahankan partai, serta gerakan-gerakan yang kritis terhadap Kremlin. Boris Berezovsky, salah seorang *oligarch* dan pengasingan politik, dapat menggunakan kekayaan yang cukup untuk mendirikan sebuah partai yang dikenal dengan nama Liberal Russia dan mempertahankannya. Tetapi penahanan Khodorkovsky yang disertai dengan hukuman 8 tahun penjara pada tahun 2005, merupakan ancaman yang serius.²⁴¹

Aspek lainnya dari rekrutmen politik adalah keterwakilan dari perempuan. Penggunaan sistem proporsional membantu perempuan untuk memperoleh wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif dibandingkan jika menggunakan sistem mayoritarian, sehingga turut meningkatkan jumlah perempuan yang ikut mendaftar menjadi calon anggota legislatif. Partai besar menjadi kendaraan bagi calon perempuan yang akan ikut Pemilihan Duma. Blok Zhirinovskiy (*Liberal Democrat Party*) menjadi partai yang sedikit dipilih oleh perempuan sebagai kendaraan politik, hanya 3 persen dari total perempuan yang mencalonkan pada Pemilihan Duma. Sebaliknya *Union of Right Forces* menaruh satu perempuan pada tiga besar daftar nomor urut calon anggota Duma. Pada Pemilihan Duma tahun 2003, semakin banyak perempuan yang masuk ke dalam lembaga legislatif. Pada saat rapat pertama Duma, terdapat 28 perempuan diantara 306 anggota legislatif dari fraksi *United Russia*, 6 perempuan diantara 52 deputi Partai Komunis Rusia, 4 perempuan diantara 38 deputi Partai *Rodina*, dan hanya 2 perempuan diantara 36 deputi *Partai Liberal Demokrat*, serta 4 perempuan dari 15 deputi calon independen.²⁴²

Level keaktifan partai di Rusia tidak terlalu tinggi. Dalam survei yang dilakukan oleh White tahun 2005, tidak lebih dari 1,1 persen warga masyarakat mengaku sebagai anggota partai politik; hampir 3 kali lebih banyak (3,2 persen)

²⁴⁰ *Ibid.*,

²⁴¹ *Ibid.*,

²⁴² Suvi Salmenniemi, *Democratization and Gender in Contemporary Russia* (London: Routledge, 2008), hlm. 82.

masyarakat meliangkan waktunya untuk aktivitas partai. Anggota yang paling aktif menurut White berasal dari Partai Komunis terutama anggota yang telah mengikuti pemilihan Duma sebelumnya. Tingkat keaktifan anggota, pada beberapa negara, didefinisikan keikutsertaan anggota dengan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh partai. Partai Komunis Rusia memiliki aturan-aturan tersebut warisan dari Partai Komunis Uni Soviet. Aturan-aturan ini kemudian ditiru oleh Partai United Russia. Anggota *United Russia*, sama halnya dengan Partai Komunis Rusia, harus membayar iuran, mengikuti kegiatan partai yang diadakan oleh cabang, mengimplementasikan keputusan danri pimpinan, dan menjalani instruksi partai. Sama seperti Partai Komunis Rusia, mereka memiliki hak untuk menerima informasi tentang partai, memohon banding terhadap keputusan oleh tertinggi partai, untuk mengekspresikan pandangan mereka sebebannya, dan mempertanyakan organ partai, mereka juga dapat ikut dalam referendum partai kapan saja diadakan. Anggota diperbolehkan untuk ikut dalam pemilihan internal partai, dan jika mereka masuk ke badan legislatif mereka harus bergabung dengan fraksi partai dan berlaku sesuai dengan instruksi partai. Aturan Partai Komunis Rusia banyak mengikuti aturan yang dibuat oleh Partai Komunis Uni Soviet. Aturan ini diantaranya demokrasi sentralisme, dimana anggota terbawah harus menjalankan instruksi dari pembuat keputusan (petinggi partai).²⁴³

Semua partai politik memilih pimpinannya secara tidak langsung; pada Partai Komunis Rusia, misalnya, terdapat Komite Sentral, yang dipilih oleh kongres, memilih pimpinan partai. Partai liberal *Yabloko* juga menggunakan prinsip yang sama. *Yabloko* seperti halnya *United Russia* dan *Union of Right Forces* memiliki pendukung yang berasal dari warga negara biasa, mereka adalah warga negara yang mendukung kebijakan partai tetapi tidak terikat dengan hak-hak dan kewajiban seperti yang dimiliki keanggotaan formal. *The Union of Right Forces* menjadi satu-satunya partai yang memperbolehkan anggotanya untuk tidak mengikuti keputusan pimpinan jika mereka tidak berada pada saat penandatanganan keputusan, meskipun pada akhirnya mereka tidak dapat dapat melawan implementasinya oleh partai.²⁴⁴

²⁴³ White, *Op. cit.*, hlm. 47.

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

Tabel 5.1
Perubahan Sistem Pemilihan Umum dan Aturan Partai Politik di Rusia
Tahun 1993-2005

Perubahan	1993	2001	2005
Sistem Pemilihan Umum	Mixed System (Proporsional dan Mayoritarian)	Mixed System (Proporsional dan Mayoritarian)	Proporsional
Parliamentary Treshold	5%	5%	7%
Koalisi Partai Politik	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
Pendanaan Operasional Partai Politik	Tidak Dijelaskan	Minimal 400.000 Ruble	Minimal 400.000 Ruble
Minimal Jumlah Cabang di Daerah	Tidak ada Batasan	50 (dengan Anggota per cabang minimal 100)	50 (dengan Anggota per cabang minimal 500)
Minimal Jumlah Anggota Partai Politik	Tidak Ada Batasan	10.000 Anggota	50.000 Anggota
Minimal Jumlah Pemilih Sehingga Pemilihan tidak Diulang	25%	25%	Tidak ada Batas Minimal
Metode Perhitungan Suara (Konversi Suara ke Kursi)	Sistem Hare (kuota)	Sistem Hare (kuota)	Sistem Hare (kuota)
Pilihan Menentang Semua Kandidat/ Partai	Ada	Ada	Tidak Ada
Jumlah Minimal Tanda Tangan untuk Kandidat Duma	200.000	200.000	150.000 (dengan maksimal tanda tangan tidak sah tidak boleh lebih dari 5%)

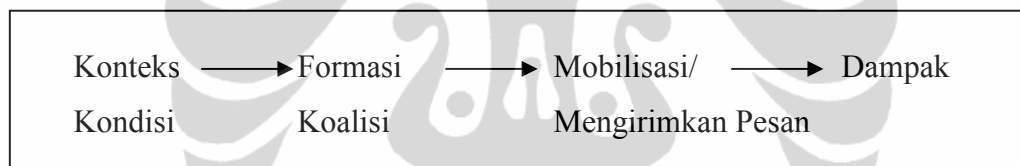
Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

BAB 6 DOMINASI PARTAI UNITED RUSSIA PADA PEMILIHAN DUMA TAHUN 2003-2007

6.1 Penerapan Strategi Politik Vladimir Putin untuk Kemenangan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003-2007

Strategi politik yang diterapkan oleh Vladimir Putin terkait dengan penerapan managed democracy yang menjadi landasan kebijakan Putin. Dalam definisi strategi politik yaitu sebuah rencana sistematis dan mengimplementasikannya dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang politik.²⁴⁵ Putin membuat suatu rencana sistematis yang yang disebut sebagai *managed democracy*, implementasi kebijakan ini bertujuan untuk memenangkan partai United Russia pada pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007.

Seperti argumen Hanspeter Kriesi, Laurent Bernhard, Regula Hänggli, disebutkan terdapat empat tahapan strategi politik:²⁴⁶



Faktor awal yaitu terkait dengan kondisi atau konteks. Hal ini terkait dengan institusi-institusi yang telah ada, aturan yang telah ada, isu-isu yang dapat mendukung, faktor-faktor dari luar, dan juga sifat atau budaya dari masyarakat. Sedangkan yang termasuk dalam formasi dan koalisi adalah konfigurasi dari aktor-aktor, tujuan atau kepercayaan, dan sumber daya. Tahapan Selanjutnya yaitu mobilisasi terkait dengan komunikasi. Komunikasi terkait dengan media, baik media elektronik maupun cetak. Untuk itu hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya waktu, target yang ingin dicapai, repertoar komunikasi, agenda-building, dan strategi-strategi yang mendukung mobilisasi massa. Ketiga tahapan ini akan menghasilkan suatu dampak yang terdiri atas reaksi, penampakan (*visibility*), dukungan, perilaku pemilih dan evaluasi. Keempat tahapan ini dilakukan untuk mencapai tujuan kemenangan bagi suatu partai atau kandidat.

²⁴⁵ Nawawi, *Op. cit.*, hlm. 149.

²⁴⁶ Kriesi, Bernhard, dan Hänggli, *Loc. cit.*

Diawali dari konteks atau kondisi. Salah satu poin dari konteks atau kondisi adalah institusi-institusi dan aturan-aturan yang telah ada. Dalam hal aturan-aturan yang telah ada, Putin berusaha untuk mengubah aturan-aturan sistem pemilihan umum dan partai politik. Ia menginginkan kontrol terhadap pemilihan umum dan kompetisi politik dalam rangka mendapatkan legitimasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, misalnya saja perubahan dalam undang-undang sistem pemilihan umum dan aturan partai politik.

Pada pemilihan umum tahun 2003, sistem pemilihan umum yang digunakan oleh Rusia adalah Sistem paralel campuran (*the parallel mixed system*). Dalam sistem perwakilan proporsional, jika ambang batas suara kurang dari 5 persen dari total suara maka tidak dapat memperoleh kursi di parlemen. Menurut Pasal 70 Undang-Undang Pemilihan, representasi dengan proporsional didistribusikan dengan sistem sisa suara terbesar, dan dengan menggunakan sistem kuota. Komisi Pemilihan Pusat menambah hak suara bagi partai-partai yang dapat melampaui ambang batas 5 persen dan membagi angka tersebut dengan 225 untuk menghitung kuota. Koalisi dan merger antara organisasi kecil harus dilakukan agar terdapat perwakilan dari mereka dalam lembaga legislatif.²⁴⁷

Sedangkan pada pemilihan di sistem distrik, kandidat individu akan didorong untuk bekerjasama dengan kandidat lain di distrik yang berbeda untuk membentuk suatu kampanye tingkat nasional. Sehingga dalam teorinya akan membentuk setidaknya dua koalisi nasional para kandidat lembaga legislatif dari sistem distrik. Dalam sistem paralel campuran (*the parallel mixed system*), kegagalan partai dalam mencapai ambang batas sistem proporsional dapat dielakkan dengan kemenangan calon individu dari sistem distrik. Dalam pemilihan-pemilihan umum, partai-partai kecil dapat memasukkan pemimpin mereka dalam lembaga legislatif melalui sistem distrik meskipun partai mereka gagal dalam melampaui ambang batas 5 persen dalam sistem proporsional.²⁴⁸

Namun pada pemilihan umum Duma tahun 2007, sesuai dengan perubahan hukum pada Mei 2005, *parliamentary threshold* dinaikkan menjadi 7% dan tidak ada lagi sistem pemilihan distrik sesuai dengan usulan Presiden Putin dan

²⁴⁷ Colomer (ed.), *Op.cit.*, hlm. 385.

²⁴⁸ *Ibid.*

disahkan oleh Duma.²⁴⁹ Peningkatan *parliamentary threshold* dari 5% menjadi 7% membuat United Russia mendapatkan keuntungan. Ia bisa mendapatkan lebih banyak suara melalui sistem proporsional. Sedangkan bagi partai-partai kecil adanya perubahan ini semakin mengurangi kesempatan mereka untuk menaruh perwakilannya dalam parlemen.

Perbedaan ini tampak jelas pada hasil pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007.

Tabel 6.1
Tabel Hasil Pemilihan Parlemen (Duma) Tahun 2003

Partai Politik	Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi di Parlemen
United Russia (UR)	22.779.279	37,57	221 Kursi
Communist Party of Russia Federation (CPRF)	7.647.820	12,61	52 Kursi
Liberal Democratic Party (LDP)	6.943.885	11,45	38 Kursi
Rodina (Motherland)	5.469.556	9,02	37 Kursi
Yabloko	2.609.823	4,30	4 Kursi*
Union of Right Forces	2.408.704	3,97	3 Kursi*
Agrarian Party	2.205.823	3,65	2 Kursi*
People's Party of the Russian Federation	714.652	1,18	19 Kursi*
Partai lainnya			8 Kursi*
Independen			67 Kursi*
Jumlah	59.297.870		450 Kursi

Catatan: Partai Yabloko, Union of Right Forces, Agrarian Party dan People's Party of the Russian Federation, partai lainnya, dan independen mendapatkan kursi legislatif melalui pemilihan sistem distrik/mayoritarian.

Sumber: Richard Sakwa, "The 2003-2004 Russian Elections and Prospect for Democracy" dalam *Jurnal Europe-Asia Studies*, Vol. 57, No. 3, May 2005, hlm. 372.

Pada pemilihan Duma tahun 2003, beberapa partai yang tidak lolos treshold 5% pada sistem proporsional masih dapat berharap pada sistem distrik atau mayoritarian. Terlihat bahwa partai-partai kecil seperti Yabloko, Union of Right Forces, Agrarian Party, People's Party of the Russian Federation, serta Independen masih dapat mendudukkan anggota atau perwakilannya dalam

²⁴⁹ Stephen White, *Op. cit.*, hlm. 25.

parlemen. Partai-partai ini memiliki basis massa yang berada di wilayah-wilayah yang dihuni oleh kelompok minoritas. Sehingga kelompok minoritas di suatu daerah masih mungkin untuk mendapati perwakilannya duduk di parlemen.

Tabel 6.2
Tabel Hasil Pemilihan Parlemen (Duma) Tahun 2007

Partai Politik	Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi di Parlemen
United Russia (UR)	44.714.241	64,30	315 Kursi
Communist Party of Russia Federation (CPRF)	8.046.886	11,60	57 Kursi
Liberal Democratic Party (LDP)	5.660.823	8,10	40 Kursi
Fair Russia: Rodina (Motherland)/ Pensioners, Life	5.383.639	7,70	38 Kursi
Jumlah			450 Kursi

Sumber: Stephen White, "The Duma Election in Russia" dalam Jurnal *Electoral Studies*, Vol. 2, No. 1, Desember 2007, hlm. 171.

Sedangkan pada Pemilihan Duma tahun 2007, dengan menggunakan sistem yang berbeda yaitu proporsional dengan treshold 7%, tidak nampak lagi partai-partai kecil yang dapat mendudukan anggotanya dalam parlemen. Hanya ada tiga partai besar yang dapat melewati batas treshold 7% yaitu Partai United Russia sebagai pemenang pemilihan umum, Partai Komunis Rusia, dan Liberal Demokrat. Sedangkan Fair Russia merupakan koalisi antara tiga partai yaitu Rodina, Pensioners dan Life. Sedangkan partai-partai lain yang sebelumnya masih mendapatkan kursi di Duma seperti Yabloko sudah tidak dapat melewati batas 7%.

Aturan lain juga diubah yaitu aturan partai politik, yang mengatur segala aspek aktivitas partai ('*O politicheskikh partiyakh*').²⁵⁰ Beberapa persyaratan yang memberatkan partai-partai kecil adalah; bagi partai yang ingin mendaftar harus memiliki anggota minimal 50.000 orang. Selain itu, persyaratan lain yang memberatkan adalah partai politik harus mempunyai cabang di lebih dari setengah daerah di Rusia, di setiap daerah harus memiliki keanggotaan minimal 500 orang,

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

dan cabang-cabang partai di daerah lainnya (distrik) harus memiliki anggota minimal 250 orang.

Perubahan aturan partai lainnya adalah aturan pendanaan partai, dana operasional partai perbulan minimal AS\$ 500.000 atau 6 Miliar Ruble. Sumbangan dari individu dalam satu tahun tidak boleh 10 kali dari upah minimum rata-rata (pada tahun 2006 berarti tidak boleh dari 8.000 Ruble atau sekitar AS\$ 280). Donasi tidak boleh berasal dari negara asing, perusahaan atau warga negara asing, atau dari perusahaan Rusia dengan kepemilikan asing lebih atau sama dengan 30 persen, atau dari organisasi internasional atau lembaga pemerintahan negara asing. Tidak diperbolehkan donasi dalam satu tahun dari satu lembaga yang mencapai 100.000 kali dari upah minimum rata-rata. Peraturan menunjukkan suatu sistem baru dukungan negara bagi partai politik, meskipun dalam skala yang lebih sederhana. Iuran anggota pun dibatasi yaitu 5 Ruble (AS\$ 0,17) dikali dengan jumlah anggota.²⁵¹

Bagi partai-partai besar, jumlah keanggotaan tidak terlalu bermasalah. Misalnya saja, menurut Kementerian Keadilan pada awal tahun 2006 anggota Partai Komunis Federasi Rusia tidak lebih dari 184.000. Partai Liberal Democratic Party menyatakan kepada Kementerian Keadilan memiliki 19.100 anggota, tetapi mengklaim memiliki 600.000 anggota kepada publik. United Russia sendiri mengalami penambahan jumlah anggota dari sebelumnya 300.000 pada akhir tahun 2001 menjadi 500.000 anggota; tetapi menurut banyak pihak peningkatan ini merupakan hasil dari cara-cara Soviet yang berdasarkan perintah dari atasan kepada bawahan.²⁵²

Selain itu, poin strategi politik pada kondisi/ konteks lainnya adalah institusi. Strategi yang dilakukan oleh Putin adalah memanfaatkan institusi-institusi yang telah ada, seperti menggunakan institusi pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Salah satu agenda yang ingin dicapai oleh Putin pada masa pemerintahannya adalah mengembalikan sentralisasi kekuasaan negara.

Salah satu strategi karakteristik *managed democracy* adalah presiden yang kuat dan institusi negara lain yang lemah. Putin ingin kembali memusatkan kekuasaan negara pada pemerintahan pusat. Hal ini dilakukan karena Putin

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² *Ibid.*, hlm. 34.

melihat dalam beberapa waktu lalu terjadi pertentangan diantara pemerintah regional dan lokal sehingga ingin melakukan resentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik di tangan Kremlin. Dengan pemusatan yang dilakukan, maka presiden memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan di tingkat pusat dan lokal.

Semenjak ia terpilih menjadi Presiden di tahun 2000, beberapa kebijakan dibuat untuk mengembalikan peran sentral presiden. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya; prosedur perekrutan dalam Dewan Federasi (Majelis Tinggi) diubah, Dewan Federasi tidak lagi dipilih melalui pemilihan umum tetapi penunjukan langsung oleh Presiden. Hal yang sama terjadi pada calon Gubernur di suatu wilayah. Aturan dalam pemilihan gubernur diubah. Saat ini, Presiden Rusia dapat secara langsung ikut campur dalam proses nominasi posisi gubernur yang hanya bisa ditolak oleh parlemen lokal. Presiden Rusia juga memiliki hak untuk memecat lembaga legislatif di daerah, dan jika lembaga legislatif menolak nominasi calon gubernur tiga kali atau menolak membuat keputusan segera terhadap permasalahan ini, Presiden Rusia dapat memecat gubernur jika mereka kehilangan kredibilitas, gagal dalam menampilkan tugasnya sesuai dengan hukum federal.

Dalam hubungan antara pusat (federal) dengan daerah, masalah desentralisasi dimulai pada masa kepresidenan Boris Yeltsin. Desentralisasi memiliki salah satu bagian penting transisi menuju demokrasi. Namun, masyarakat Rusia mulai melihat bahwa desentralisasi telah jauh dari tujuan sebenarnya. Para pemimpin regional menguat secara signifikan dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang dibuat oleh presiden. Untuk itu Putin tidak memiliki pilihan lain selain merubah kebijakan desentralisasi Yeltsin dan memulai untuk kembali melakukan sentralisasi kekuasaan dibawah kekuasaan kepresidenan.

Tahapan selanjutnya adalah formasi atau koalisi. Dalam formasi dan koalisi terdapat poin-poin konfigurasi dari aktor-aktor, tujuan atau kepercayaan, dan sumber daya. Para aktor-aktor yang terkait yaitu para kepala daerah dan birokrasi atau aparatur negara. Hal ini dimulai semenjak munculnya ide mengembalikan kembali kekuasaan negara sebagai alasan pembentukan partai United Russia. Partai harus memberikan dukungan administratif kepada elit

politik. Partai juga menjadi kendaraan bagi anggota yang loyal dalam lembaga legislatif tingkat nasional dan memberikan dukungan legislatif kepada pemerintah. Hal inilah yang dicoba diselesaikan oleh Putin ketika ia memulai reformasi untuk mengembalikan kekuasaan negara.

Dengan menunjuk orang-orang yang loyal kepada United Russia, Putin telah mendapat dukungan administratif dan loyalitas dari legislatif. Partai ini memiliki keterbatasan dalam kekuasaan atau tanggungjawab terhadap elit politik. Pembentukan struktur penguasa loyal telah berhasil membuat United Russia besar. Fakta bahwa setiap orang terkait dengan United Russia memberikan arti jika mereka bergantung pada dukungan yang diberikan United Russia. Oleh karena itu, penguasa daerah yang tidak merupakan elit politik secara signifikan membutuhkan dukungan dari United Russia.

Di pertengahan 2007, partai United Russia telah mengontrol mayoritas kepala daerah di 76 dari 86 daerah. Di tahun 2006, 90% kepala daerah di Rusia telah bergabung di Partai United Russia, termasuk 7 walikota dari 10 kota besar di Rusia. Sejak tahun 2005, partai telah melakukan upaya dalam memperluas pengaruhnya pada 24.000 kepala daerah serta legislatif daerah. Selain itu, 50% kepala Oblast adalah anggota partai United Russia tahun 2007.²⁵³

Semenjak pertengahan tahun 2003 baik Kremlin dan elit daerah telah meningkatkan komitmen mereka. Elit-elit berusaha untuk mencari pengaruh politik agar Kremlin perlu untuk mengkooptasi mereka. Kremlin memang membutuhkan mereka karena terkait dominasi pemilihan umum dan mayoritas dominasi di legislatif serta memelihara stabilitas politik. Pengaturan ini tampaknya berhasil, elit daerah mengandalkan Kremlin untuk terus menyalurkan sumber daya melalui partai dan mereka yakin bahwa Kremlin memiliki saham di partai tersebut. Kremlin mampu berkomitmen untuk partai karena mereka tahu kelemahan dari elit daerah. Tidak ada pihak yang berencana untuk keluar dari partai ini, mengingat kurangnya kesempatan di partai lain.

Untuk itu, Putin memutuskan cara terbaik dalam mencapai tujuannya adalah mengembalikan kepemimpinan dari atas ke bawah (*topdown*), suatu hal yang biasa ketika masa Uni Soviet. Saat ini Putin berusaha untuk mengembalikan

²⁵³ Hale dan Colton, *Loc. cit.*, hlm. 23.

kewenangan top-down yang ia katakan “*the vertikal of power*” yaitu dengan memperkuat birokrasi negara, menghilangkan independensi birokrasi dengan memasang orang-orang kepercayaan presiden di jabatan-jabatan kunci. Untuk mengimplementasikan rencana ini akan terdapat anggota loyal United Russia di setiap cabang pemerintah, termasuk dalam militer dan yudisial. Putin juga dapat memastikan loyalitas dari pengadilan dengan menempatkan anggota partai yang akan terus mendukung United Russia dan Putin. Putin bahkan dapat memastikan loyalitas dari militer, intelijen, dan penegak hukum dengan menempatkan loyalisnya atau sering disebut *siloviki* di posisi-posisi penting.

Dibawah kepresidenan Vladimir Putin, pendekatan patronase kembali muncul. Dasar dari kebijakan ini adalah sistem Soviet, *nomenklatura*, yang berusaha melakukan rekrutmen politik dalam demokrasi manajemen patronase. Kebangkitan sistem ini dapat dipandang positif ataupun negatif, pandangan positif terhadap sistem ini adalah untuk memastikan efisiensi dan kohesi dalam negara modern, tetapi pandangan negatif melihat sistem ini menjadi dasar bagi suatu tatanan neo-otoritarian.

Menurut peraturan pegawai negeri sipil, yang diadopsi April 2003, meminta adanya daftar formasi kader cadangan di semua institusi negara dan di semua tingkat pemerintahan.²⁵⁴ Daftar kader cadangan berisi nama dari individu yang telah ‘memenuhi syarat awal’ untuk mengisi posisi di birokrasi. Pada setiap posisi di kepala departemen dan di atasnya –dan di semua lembaga yuridiksi, bahkan posisi rendah –memiliki daftar cadangan. Daftar tersebut berisi data sejumlah personel yang berasal dari lembaga administratif ataupun politik. Setelah masuk ke daftar cadangan, kepada eksekutif terpilih di setiap tingkat administrasi kemudian menyetujui kandidat-kandidat untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil tetap, seorang pegawai negeri sipil sendiri memilih bawahannya yang berasal dari daftar cadangan sesuai dengan departemen atau lembaga. Keanggotaan dalam daftar cadangan dapat berarti tidak hanya bagi promosi, tetapi harapan bahwa mereka akan secara aktif diberikan tugas yang lebih menantang, baik pelatihan secara formal atau seminar secara periodik hingga pelatihan khusus di kantor sehingga mereka segera dapat dipromosikan. Kemunculan kembali daftar kader

²⁵⁴ Pravda, *Op. cit.*, hlm. 173.

cadangan memberikan kesempatan bagi politisi dan birokrat senior untuk membangun suatu hubungan patron dengan didasarkan kepada loyalitas. Dengan daftar kader cadangan, seleksi terhadap personel dapat dilakukan dengan cepat dan tidak transparan. Tidak hanya membuat pengurangan jumlah pendaftar, tetapi sistem ini meningkatkan klientalisme. Hal ini menyebabkan patron hanya akan melayani kepentingan dari orang yang telah merekrutnya.

Pola patronase yang dijalankan oleh Putin tidak hanya terbatas pada jabatan politik yang berfungsi untuk melayani keinginan dari pimpinan pusat, biasanya anggota staf senior atau kader utama dalam inti eksekutif. Pejabat terpilih, pegawai negeri permanen, dan pimpinan bisnis serta organisasi non-pemerintah menjadi sasaran dari kelompok patronase untuk dipengaruhi sehingga akan mengancam pluralisme politik.

Dengan sistem kemampuan melakukan rekrutmen secara luas, Putin telah membuat suatu kebijakan patronase yang lebih sistematis. Dengan memberikan dukungan secara pribadi kepada *United Russia*, misalnya dengan mendorong bawahannya untuk memobilisasi sumber daya negara untuk mendukung kandidat *United Russia*, dan dengan menggunakan kekuatan administratif untuk menunda hasil pemilu jika tidak sesuai keinginannya, Putin telah mengkonsentrasikan kekuatan yang sangat besar sebagai presiden.

Selain itu, sebagai Presiden Rusia, Vladimir Putin dapat memilih pejabat-pejabat negara yang sesuai dengan keinginannya. Pejabat-pejabat pilihan presiden tidak dapat diveto atau dipertanyakan oleh institusi lain, meskipun terdapat 200 pejabat Kremlin yang ditunjuk presiden harus disetujui dahulu oleh parlemen. Diantara pejabat-pejabat ini adalah perdana menteri, kepala badan pemeriksa keuangan dan gubernur bank sentral –semuanya harus didukung oleh Duma – dan juga kejaksaan; serta hampir 100 anggota Hakim Agung dan 19 anggota Hakim Mahkamah Konstitusi harus disetujui *Federation Council*. Namun sejumlah personel tentara nasional secara formal atau informal dipilih oleh presiden. Jumlah ini semakin bertambah dengan tambahan anggota dari daerah dan republik, mulai dari gubernur jenderal dan deputi-deputi pertama di tujuh distrik federal, setiap deputi tersebut memiliki staf minimal 150 orang, hingga

lebih dari 18.000 hakim dalam peradilan komersial, militer, dan umum di seluruh negara.

Hasilnya pada beberapa kasus tampak birokrasi mendukung partai United Russia. Contohnya pada Pemilihan Duma tahun 2003, United Russia diuntungkan karena adanya bantuan dari instansi pemerintah untuk menggunakan sumber-sumber administrasi negara. Menurut Laporan OSCE menemukan pada banyak kasus, kandidat United Russia berkampanye di kantor-kantor pemerintahan daerah. Kandidat dari United Russia menyangkal menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Di beberapa wilayah di Rusia, pemilih memilih kandidat karena adanya tekanan. Contohnya, di St. Petersburg, kandidat dari Yabloko dan Union of Right Forces harus menghadapi tekanan serius dari administrasi saat kampanye. Kandidat Yabloko Anatoly Golov mencontohkan ia kesulitan dalam mendistribusikan bahan-bahan kampanye; kelompok-kelompok yang seharusnya menerima bahan-bahan kampanye diperintahkan dari pemerintah lokal untuk tidak menerima tulisan-tulisan dan iklan-iklan kampanye selain partai United Russia.²⁵⁵

Selain itu, aparat hukum Rusia juga memenjarakan beberapa tokoh oposisi. Salah satunya adalah Mikhail Khodorkovsky, seorang pemimpin kelompok *Oligarkh* dan pendukung partai oposisi Yabloko. Pada Pemilihan Duma tahun 2003 partai Yabloko mendapatkan kesulitan dalam pembiayaan kampanye. Hal ini disebabkan karena Khodorkovsky dipenjara oleh pemerintah Putin dengan dakwaan penyelewengan pajak dan terkait dengan kasus Yukos. Tanpa adanya dukungan dana dari Khodorkovsky menyulitkan mereka untuk melakukan kampanye dan menggalang massa. Kasus Khodorkovsky memunculkan permasalahan baru bagi Yabloko karena melalui stasiun televisi dan media cetak pemerintahan Putin, kasus Yukos membuat citra partai ini memburuk.²⁵⁶

Setelah ditahannya Khodorkovsky, para pemimpin bisnis besar (*oligarchs*) menyadari bahwa mereka bergantung kepada Kremlin dan menyesuaikan diri di dalam kehidupan politik. Daripada mencoba melawan seperti Khodorkovsky,

²⁵⁵ David White, *Loc cit.*, hlm. 220.

²⁵⁶ Stuart D. Goldman, "Russia" dalam Jurnal Online *Congressional Research Service*, tanggal 14 April 2003, hlm. 5, yang bersumber dari situs <http://fpc.state.gov/documents/organization/19855.pdf> dikutip pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 02.00 WIB.

mereka berusaha untuk mendapatkan dana portofolio yang besar dari partai politik. Pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007 mereka mengkonsentrasikan investasi mereka kepada partai pendukung pemerintah, United Russia. Hal ini membuat Putin dapat dengan mudah memperkuat kekuasaannya dengan didukung oleh pengusaha-pengusaha besar melalui hubungan yang asimetris.²⁵⁷

Dengan sentralisasi kekuasaan negara dan memberikan banyak politisi loyal dalam legislatif dan daerah, Putin secara sukses telah merestrukturisasi kompetisi politik di Rusia. Jika seorang ingin menjadi politisi yang sukses maka ia harus bergabung dalam partai United Russia untuk mendapat dukungan yang diberikan partai ini dan elit politik yang ikut dalam United Russia. Minimal, politisi harus ikut dalam partai politik pro-Kremlin seperti Just Russia.

Tahapan selanjutnya adalah mobilisasi atau mengirimkan pesan kepada calon pemilih. Strategi yang dibuat oleh Putin adalah memanfaatkan media massa nasional terutama media televisi. Putin telah berhasil menggunakan dukungan administrasi dan politisi yang loyal untuk mencapai tujuannya mengembalikan kontrol negara atas media massa. Semenjak tahun 2003, Putin telah berhasil mengembalikan stasiun televisi nasional dibawah kontrol negara. Hal ini bisa terjadi dengan menempatkan orang-orang yang loyal kepada Putin dan United Russia pada posisi yang bertanggungjawab dalam stasiun televisi Rusia. Pada kasus lain, negara memaksa perusahaan untuk menjual sahamnya, kemudian negara membeli saham stasiun televisi tersebut. Akhirnya strategi ini berhasil membuat tiga stasiun televisi nasional; Pervy, Rossiya, dan NTV, loyal kepada Kremlin.

Hasil yang diberikan dari pengambilalihan saham secara paksa pada stasiun televisi swasta nasional, cukup baik bagi pemberitaan mengenai Partai United Russia dan Presiden Putin di media elektronik. pemberitaan mengenai Partai United Russia dan Vladimir Putin jauh lebih besar daripada partai-partai lain. Terutama pada Channel 1 (18,42% untuk United Russia dan 36,16% untuk Presiden Putin) dan Russia TV (16,01% untuk United Russia dan 35,41% untuk Presiden Putin) sebagai stasiun televisi terbesar dan mampu menjangkau lebih dari 95% wilayah di Rusia. Sedangkan bagi partai lain seperti Partai Komunis

²⁵⁷ Pravda, *Op. cit.*, hlm. 31.

Rusia, pemberitaan di lima stasiun televisi yang diteliti pemberitaan negatif lebih dari 25-50%. Untuk partai-partai lainnya seperti Liberal Demokrat, Yabloko, Union of Right Forces, dan Motherland; tidak banyak masuk pemberitaan di televisi. Namun, khusus bagi Union Right Forces, pemberitaan mereka di Ren TV cukup besar mengungguli pemberitaan mengenai United Russia dan Presiden Putin. Hal ini disebabkan karena stasiun televisi ini masih dimiliki oleh kelompok liberal namun hanya menjangkau hanya di kota-kota besar Rusia.

Kesuksesan strategi politik Putin dihasilkan dengan dukungan dari partai, legislatif, dan politisi melalui partai United Russia. Dengan menciptakan partai United Russia, Putin dapat memastikan bahwa ia memiliki orang-orang yang loyal dengannya di berbagai wilayah di Federasi Rusia. Putin harus membersihkan berbagai kekacauan yang dibuat oleh Yeltsin. Selain itu, banyak orang yang mulai memiliki pusat kekuasaan sebagai hasil dari kepresidenan Yeltsin.

Dampak dari strategi ini bagi Partai United Russia adalah sebagai partai yang baru, partai ini telah secara cepat menjadi partai dominan di Rusia. Dimulai dengan percobaan untuk menghilangkan kesempatan keterpilihan dari partai oposisi telah bermetamorfosis selama beberapa tahun menjadi partai besar dengan dukungan mandat pemilih yang besar dan dukungan dari Kremlin. Pada saat ini, Partai United Russia telah menyerap beberapa partai kecil. Pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007 tampak jika strategi ini berhasil memenangkan Partai United Russia. Hingga pada akhirnya, United Russia dapat berkembang dan menjadi aspek penting dalam pembuatan kebijakan Vladimir Putin.

6.2 Implikasi Strategi Politik Vladimir Putin dan Dominasi Partai United Russia terhadap Transisi Demokrasi di Rusia.

Terkait dengan strategi politik yang diterapkan oleh Vladimir Putin. Apakah Rusia telah mengalami suatu konsolidasi demokrasi dan menghasilkan suatu demokrasi liberal? Dari karakteristik yang dibuat oleh Alan Ball dan Guy Peters menyebutkan bahwa karakteristik dari demokrasi liberal adalah ²⁵⁸ (1) Terdapat lebih dari satu partai politik yang berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan politik. (2) Kompetisi perebutan kekuasaan terbuka, tidak tertutup, dan

²⁵⁸ Ball dan Peters, *Op.cit*, hlm. 54-55.

berdasarkan pada prosedur yang telah ada dan telah diterima, termasuk pemilihan umum. (3) Rekrutmen posisi dalam kekuasaan politik relatif terbuka. (4) Terdapat pemilihan yang periodik dengan hak pilih yang universal. (5) Kelompok penekan dapat bekerja untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Organisasi seperti unit usaha tidak mendapat kontrol yang ketat dari pemerintah. (6) Kebebasan sipil, seperti kebebasan berbicara, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan dari penangkapan yang sewenang-wenang, dilindungi dalam sistem politik. Hal ini mengasumsikan adanya kemerdekaan, dan kebebasan dari kontrol pemerintah terhadap media massa, seperti radio, televisi, dan media cetak (walaupun pemerintah dapat mempunyai dan beroperasi dalam beberapa komponen dari media). (7) Terdapat pemisahan kekuasaan seperti lembaga legislatif mengontrol terhadap eksekutif, dan yudisial independen terhadap eksekutif dan legislatif.

Sedangkan menurut Ball dan Peters, sistem politik otoritarian mempunyai karakteristik seperti:²⁵⁹ (1) Terbatasnya dan tertutupnya kompetisi politik. (2) Peran dari suatu ideologi yang besar. (3) Penggunaan kekerasan oleh negara. (4) Rendahnya dukungan terhadap kebebasan sipil. (5) Rendahnya independensi lembaga yudisial. (6) Peran yang besar dari elit tradisional atau militer yang menentukan arah kebijakan negara.

Dalam bab *Democracy and Its Arenas*, Linz dan Stepan berpendapat bahwa pada transisi demokrasi menuju tahap konsolidasi, terdapat lima pilar utama yang harus terbangun dengan baik agar konsolidasi demokrasi berhasil tercapai. Yaitu, masyarakat sipil (*civil society*), masyarakat politik (*political society*), penegakan hukum (*rule of law*), aparatur negara (*state apparatus*), dan masyarakat ekonomi (*economic society*).²⁶⁰

Masyarakat sipil terdiri dari banyak kelompok dan organisasi dan pers, dimana mereka memiliki kemampuan untuk melakukan mobilisasi berupa gerakan sosial yang berposisi terhadap rezim non demokrasi. Sehingga dengan pengaruhnya yang luas mampu menumbangkan rezim otoriter yang berkuasa. Contohnya saja adanya adanya kemerdekaan, dan kebebasan dari kontrol pemerintah terhadap media massa, seperti radio, televisi, dan media cetak. Namun yang terjadi di Rusia sulit untuk terjadi terutama pada masa Presiden Vladimir

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 7-15.

Putin. negara melakukan kontrol terhadap media, kebebasan media seringkali mengakibatkan terdapat pemberitaan-pemberitaan yang melemahkan legitimasi dari pemerintah, sehingga kontrol negara terhadap media diperlukan. Kebebasan media seringkali mengakibatkan terdapat pemberitaan-pemberitaan yang melemahkan legitimasi dari pemerintah, seperti yang terjadi pada pemerintahan Yeltsin. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka Vladimir Putin merasa bahwa perlu adanya pembatasan terhadap media. Putin mulai membatasi kebebasan dari jaringan media televisi dengan pengaturan dan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dilakukannya terhadap NTV yang selama ini banyak melakukan kritik terhadap pemerintah.²⁶¹

Rusia menampilkan suatu paradoks terkait komunikasi dimana terdapat banyak sumber informasi namun sedikit demokrasi. Negara ini memiliki sejumlah sumber informasi media untuk menyampaikan pendapat melalui media televisi, cetak, dan online. Keragaman sumber informasi telah meningkat, tetapi ide mengenai media yang objektif dan seimbang tidak pernah diadopsi oleh media Rusia. Seluruh segmen dari masyarakat Rusia, termasuk para politisi hingga publik termasuk jurnalis, memandang media massa sebagai pemain politik daripada pengawas atau pengontrol yang dapat mengontrol kekuasaan politik.

Beberapa media terutama stasiun televisi yang berposisi terhadap pemerintah Putin berusaha diambil alih kontrolnya oleh negara. Contohnya saja pengambilalihan Grup Media Most yang sebelumnya dikuasai oleh Vladimir Gusinsky oleh Gazprom-Media. Media Most berkembang di tahun 1990an, dengan bantuan bantuan dari lembaga birokrasi Boris Yeltsin, termasuk berkembangnya radio yang terkenal Echo of Moscow dan stasiun televisi kontroversial NTV, yang terkenal atas kritik tajamnya terhadap perang Chechen Kedua dan dukungannya pada partai oposisi Fatherland pada pemilihan tahun 1999. Kremlin membiarkan Media Most terus berkembang, sehingga dapat menjadi senjata ketika negara berusaha untuk mengambilalih kontrol dari grup ini, bekerjasama dengan melanggar aturan fiskal dan pidana; negara tiba-tiba meminta hutang yang dimiliki oleh grup ini, dan Gusinsky ditahan pada awal tahun 2000. Setelah bernegosiasi dengan Menteri Informasi, Gusinsky mengundurkan diri dari

²⁶¹ Lynch, *Op. cit.*, hlm.161.

pemilik Media Most dan kabur ke Spanyol, sedangkan grup Media Most dibubarkan di awal tahun 2001 oleh aparat pajak yang berwenang.²⁶²

Selain itu, menurut ranking *Freedom House*, Rusia berada posisi yang sama dengan Kazakhstan, Sudan dan Yaman yaitu di posisi 170 pada *Freedom of the Press World Rankings* di tahun 2008. Organisasi yang berpusat di Amerika Serikat ini memasukkan Rusia pada daftar yang rendah dari 195 negara disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah adanya kemungkinan perubahan undang-undang sehingga pemerintah dapat mensensor media yang dianggap mengancam keamanan negara. *Freedom House* juga menemukan sejumlah bukti pembunuhan terhadap jurnalis yang meliput partai politik alternatif pada Kampanye Pemilihan Duma tahun 2007. Terdapat bukti kekerasan terhadap jurnalis, termasuk kematian misterius dua reporter yang disebut bunuh diri dan penyerangan terhadap jurnalis yang berusaha untuk meliput demonstrasi politik di tahun yang sama.²⁶³

Tekanan yang besar diberikan oleh Presiden Putin kepada yang media massa dan pers mengindikasikan jika masyarakat sipil seperti yang diungkapkan oleh Juan J. Linz dan Alfred Stephan tidak terjadi di Rusia. Rusia masih memberikan keterbatasan bahkan sensor ketat terhadap media yang ada di Rusia. Pembatasan tersebut diawali dari penguasaan media oleh negara, sehingga negara dapat dengan mudah mengontrol berita-berita yang muncul di masyarakat. Pembatasan media ini juga berarti hilangnya akses masyarakat dalam memperoleh informasi. Informasi yang mereka dapatkan hampir semua berasal dari stasiun televisi atau media yang dikuasai oleh negara.

Keadaan ini justru sesuai dengan karakteristik sistem politik otoritarian yaitu: Penggunaan kekerasan oleh negara dan Rendahnya dukungan terhadap kebebasan sipil. Penggunaan kekerasan oleh negara terkait dengan terjadinya kekerasan terhadap beberapa wartawan yang berani dalam mengungkap berbagai kejadian yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah Vladimir Putin. Menurut laporan *Freedom House* di tahun 2007, setidaknya terdapat empat jurnalis (selain kasus kematian Anna Politkovskaya yang terkenal) yang terbunuh. Kematian para

²⁶² Sarah, Oates, Lynda Lee Kaid, dan Mike Berry, *Op.cit*, hlm. 145.

²⁶³ Norwegian Helsinki Committee, *Loc. cit*.

jurnalis sebagian besar karena resiko berada di tengah pertempuran antara angkatan bersenjata Rusia dengan kelompok Chechen.²⁶⁴

Diluar zona perang, kekerasan terhadap jurnalis Rusia juga terjadi. Kasus yang terkenal adalah pembunuhan Anna Politkovskaya di tahun 2006 yang menulis secara mendalam mengenai perang Chechen bagi surat kabar liberal *Novaya Gazeta* di Moscow. Politkovskaya ditembak di dalam elevator di gedung apartemennya di Moscow ketika ia pulang ke rumah dari berbelanja. Tidak ada tersangka dalam kasus ini. Meskipun kematiannya memunculkan berbagai komentar di dunia internasional, Presiden Putin menyebutkan bahwa Politkovskaya hanya memiliki pengaruh kecil pada kehidupan politik di Rusia.²⁶⁵

Pilar kedua adalah masyarakat politik. Masyarakat politik terdiri dari partai politik, sistem pemilihan, kepemimpinan politik, aliansi partai dan para legislatur. Semasa pemerintahan Vladimir Putin, Rusia menggunakan model elitis. Menurut Guy Peters dan Alan Ball, model elitis adalah model distribusi kekuasaan politik yang mirip dengan karakteristik pendekatan pluralis. Namun, pada pendekatan ini mempunyai inti, di dalam masyarakat terbagi atas dua kelompok, penguasa dan yang dikuasai. Kelompok yang lebih kecil terdiri atas elit politik, mengontrol mayoritas. Menurut Gaetano Mosca, kelas pertama selalu berjumlah sedikit, namun menjalankan sejumlah fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan memperoleh kesenangan dari kekuasaan tersebut; sedangkan kelas kedua berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikontrol oleh kelas pertama. Keinginan kelompok kecil adalah mengontrol sejumlah mayoritas, kelompok elit ini kohesif dan bersatu dalam isu-isu penting.

Adanya elit politik biasa terjadi pada sistem politik, tidak jelas proses rekrutmennya, dan derajat mobilitas sosial dalam masyarakat. Bagi para teoritis elit, sumber kekuasaan elit bisa berasal dari ekonomi, sosial, dan kepemilikan karakteristik psikologi seperti keinginan untuk berkuasa atau kemampuan untuk mengorganisir elit. Bagi para teoritis elit, sumber kekuasaan didapat dari lembaga politik, seperti partai politik atau kepemimpinan politik, atau terkadang kekuatan elit berasal dari landasan ekonomi dan sosial.

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ *Ibid.*

Putin mencoba menyatukan elit politik/ masyarakat politik pada masa pemerintahannya. Sebelumnya, pada masa Boris Yeltsin, Yeltsin gagal dalam menyatukan elit politiknya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor; pertama, absennya aktor yang dominan yang disebabkan kepemimpinan Yeltsin saat menjabat sebagai presiden dengan hegemoni namun tanpa adanya proyek yang jelas; kedua, ketidakefektifan usaha elit untuk menjaga sumber daya, terutama disebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat (mengakibatkan berkurangnya legitimasi elit dan rezim), kapasitas negara yang terbatas dan krisis ekonomi.²⁶⁶ Pada akhir kepemimpinan Yeltsin dapat terlihat bahwa demokrasi yang diterapkan di Rusia pada masa itu masih memiliki banyak kelemahan. Pada awal pemerintahan Yeltsin telah terjadi konflik antar elit yang mengakibatkan keadaan menjadi tidak stabil karena konsolidasi yang sulit terbentuk. Konsolidasi sulit terbentuk karena masing-masing pihak memiliki kepentingannya sendiri.²⁶⁷ Tetapi semenjak Putin menjabat, keadaan ini berubah dan semakin didukung bagi konsolidasi elit nasional.

Upaya dalam melakukan konsolidasi elit dimulai pada Januari 2000, ketika ia bertindak sebagai Pejabat Presiden. Putin berusaha menciptakan sebuah mayoritas di Duma yang loyal untuk memastikan kelancaran berbagai undang-undang yang akan dibuat. Putin relatif sukses pada Duma tahun 2000-2003, ketika faksi parlemen pro-Putin, Unity, membentuk aliansi dengan tiga faksi lainnya, dan meraih kontrol terhadap agenda. Bahkan pada Duma selanjutnya tahun 2004-2007 dan 2008-2011, kontrol Duma sudah berada di tangan lembaga kepresidenan.²⁶⁸

Kedua, Putin, menciptakan kontrol langsung terhadap majelis tinggi parlemen, Dewan Federasi, melalui reformasi sehingga anggotanya ditunjuk. Reformasi ini dilaksanakan pada Musim Panas tahun 2000, menghilangkan gubernur daerah dari dewan federasi dan menggantikannya dengan perwakilan permanen yang dipilih oleh gubernur daerah dan dewan perwakilan daerah. Kremlin melihat proses ini, dapat memastikan bahwa anggota baru akan loyal

²⁶⁶ Steen dan Gel'man, *Op. cit.*, hlm. 44.

²⁶⁷ Alkatiri, *Op. Cit.*, hlm.105.

²⁶⁸ Stephen K. Wegren dan Dale R. Herspring (ed.), *After Putin's Russia: Past Imperfect, Future Uncertain* (Maryland: Rowman & Littlefield Publisher Inc., 2010), hlm. 41.

terhadap keinginan presiden. Sejak itu, Dewan Federasi harus ditunjuk dengan inisiatif dari presiden.²⁶⁹

Ketiga, Putin membuat partai United Russia menjadi partai dominan di seluruh sistem politik, mengontrol tidak hanya di Duma di Moskow tetapi juga pada parlemen regional. Putin melakukan hal ini dengan beberapa cara yang membuat partai lain sulit untuk masuk dalam arena politik (seperti melalui gubernur dan oligarkh), dengan menekan para aparatur pemerintahan di semua bagian untuk berafiliasi dengan Partai United Russia, dan dengan memecah partai suara rival, seperti partai komunis. Pergerakan-pergerakan ini membuat partai United Russia berhasil meraih kemenangan pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007, kedua pemilihan umum ini memberi partai United Russia dua per tiga mayoritas di Duma.²⁷⁰

Saat ini, para pendukung Putin tidak membutuhkan suatu persekutuan dengan partai lain di Duma tetapi telah secara penuh mengontrol agenda dan hasil dari voting. Akhirnya, Putin berhasil membuat agenda parlemen paralel yaitu sebutan bagi pseudo-lembaga parlemen dimana parlemen tidak lagi tempat perdebatan dan pembuatan kebijakan tetapi menjadi suatu lembaga yang dikendalikan oleh presiden. Untuk memperpanjang hal tersebut presiden memberikan parlemen paralel ini hak untuk memberikan saran presiden terkait suatu kebijakan, Dewan Federal kehilangan monopoli konstitusional dalam membuat undang-undang dan pengawasan terhadap eksekutif serta hanya menjadi salah satu badan konsultatif dukungan politik kepada presiden. Dari sekian struktur paralel terdapat Dewan Negara (dibentuk pada tahun 2000 sebagai bagian dari reformasi Dewan Federasi) dan Dewan Publik (dibentuk pada tahun 2005 sebagai salah satu reformasi Putin terkait kejadian insiden Beslan). Sebagai tambahan, Putin terkadang meminta bantuan pada Dewan Keamanan, badan konstitusional yang bertugas memberikan saran kepada presiden terkait masalah keamanan nasional tetapi juga dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan di area yang lebih luas.²⁷¹

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ *Ibid.*

Pilar ketiga dari Linz dan Stephan adalah Aparatur Negara. Aparatur negara harus mendapat dukungan dari masyarakat untuk pengakuan atas kewenangannya yang bersifat legal-rasional. Aparatur negara juga mendapatkan dukungan dana yang dikumpulkan secara legal dari masyarakat politik dan mendayagunakan pajak untuk kepentingan negara.

Strategi dalam memanfaatkan birokrasi atau aparatur negara dimulai dari rekrutmen calon aparatur negara. Jika menurut idealisme Weber, seorang pegawai/birokrasi dapat dipilih berdasarkan merit sistem dan non-merit sistem. Tetapi bagi mereka yang menginginkan kekuasaan politik sering mencari cara untuk mempengaruhi rekrutmen dan promosi pegawai negeri sipil, khususnya pegawai negeri sipil yang memiliki posisi tinggi di birokrasi. Fenomena di Rusia memperlihatkan pemerintahan Putin sering tidak memperdulikan persyaratan formal yang dibutuhkan dalam peraturan pegawai negeri sipil. Peraturan tersebut memberikan desain hierarki birokrasi dari tingkatan terbawah hingga pada golongan V atau sekelas dengan deputi menteri, yang memperlihatkan signifikansi keanggotaan permanen pada birokrasi. Pegawai negeri Rusia yang menginginkan untuk menggantikan pejabat di atas tidak harus harus meminta maaf atau meminta arahan sesuai dengan aturan formal. Perlakuan seperti ini telah meluas di Rusia tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi hingga pemerintahan daerah. Pegawai yang merasa khawatir akan keadaan ini biasanya akan dipindahkan ke departemen lain.²⁷²

Sistem rekrutmen disebut sebagai patronase. Sistem patronase di birokrasi Rusia dibawah Putin sudah diawali secara terbatas pada era Yeltsin, kebijakan ini menjadi elemen sentral dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Putin. Reformasi birokrasi yang dilakukan Putin bertujuan untuk mengurangi jumlah birokrasi, kemudahan dalam pembuatan dokumen perijinan, mengeliminasi inspeksi administratif yang didesain untuk menghindari suap, dan peningkatan gaji dan prestise pegawai.²⁷³ Seperti pada masa Soviet, daftar kader cadangan berisi nama dari individu yang telah ‘memenuhi syarat awal’ untuk mengisi posisi di birokrasi. Pada setiap posisi di kepala departemen dan di atasnya –dan di semua lembaga yuridiksi, bahkan posisi rendah –memiliki daftar cadangan. Daftar

²⁷² Pravda, *Op. cit.*, hlm. 173.

²⁷³ *Ibid.* hlm. 174.

tersebut berisi data sejumlah personel yang berasal dari lembaga administratif ataupun politik. Setelah masuk ke daftar cadangan, kepada eksekutif terpilih di setiap tingkat administrasi kemudian menyetujui kandidat-kandidat untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil tetap, seorang pegawai negeri sipil sendiri memilih bawahannya yang berasal dari daftar cadangan sesuai dengan departemen atau lembaga.

Sistem daftar cadangan kader ini muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemimpin-pemimpin Rusia masih tidak percaya mengenai kemampuan sumber daya manusia Rusia untuk memberikan kader yang sesuai dengan birokrasi. Menurut pandangan mereka, para pemimpin harus dapat mengidentifikasi, melatih dan memelihara personel. Sikap ini menjadi bukti munculnya berbagai inisiatif dari tingkat regional dan lokal untuk membangun infrastruktur manusia untuk sektor publik dan swasta. Mereka tidak ingin elit politik, ekonomi dan administrasi diserahkan bebas sesuai dengan keinginan pasar, apalagi untuk daerah yang miskin. Untuk itu dibentuk departemen pengkaderan di berbagai yuridiksi untuk mencari kandidat prospektif untuk masuk dalam daftar cadangan di birokrasi, semenjak ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan universitas.²⁷⁴

Kemunculan kembali daftar kader cadangan memberikan kesempatan bagi politisi dan birokrat senior untuk membangun suatu hubungan patron dengan didasarkan kepada loyalitas. Namun, pembentukan daftar cadangan dari kader yang loyal melupakan prinsip dasar dari reformasi birokrasi yaitu perekrutan dengan sistem merit, yang mensyaratkan suatu kompetisi terbuka untuk posisi yang kosong. Pada institusi dimana daftar cadangan dilakukan, pemegang kekuasaan tidak harus mengikuti aturan kompetisi yang fair yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang. Dengan daftar kader cadangan, seleksi terhadap personel dapat dilakukan dengan cepat dan tidak transparan. Tidak hanya membuat pengurangan jumlah pendaftar, tetapi sistem ini meningkatkan klientalisme dengan menghubungkan kesuksesan *rezervisty* bagi politisi atau birokrasi tingkat tinggi yang mampu merekrut serta mengeliminasi daftar cadangan. Hal ini menyebabkan patron hanya akan melayani kepentingan dari

²⁷⁴ *Ibid.* hlm. 174-175.

orang yang telah merekrutnya. Pada periode kepresidenan Putin kedua, semakin terlihat bahwa terjadi peningkatan sistem patronase.

Di Rusia sendiri, pergantian pejabat politik dilakukan secara meluas setelah terpilihnya presiden. Selain ditunjuknya menteri-menteri dan pejabat kementerian setelah terpilihnya tahun 2000, Putin melakukan pergantian 77 pejabat setingkat kementerian pada periode 4 tahun masa jabatannya (7 di tahun 2000, 20 di tahun 2001, serta 20 di tahun 2002 dan 2003). Selama 4 tahun masa jabatannya, pergantian pejabat kementerian tidak dilakukan di dua kementerian utama yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan karena Putin menginginkan suatu sirkulasi pengkaderan yang terus berlangsung di dua kementerian penting ini. Selain itu, pada masa Putin tidak ada pergantian Perdana Menteri, alasannya untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan.

Selain itu, Presiden juga mengontrol ketat yudikatif dengan kekuasaan yang dimiliki dapat menunjuk hakim baru. Contohnya, dalam pengadilan provinsi tertinggi atau yang dikenal dengan *charter courts* di daerah dan *supreme courts* di republik. Presiden dapat menunjuk hakim baru, tetapi setelah mereka dicalonkan oleh komisi kualifikasi yudisial tingkat polisi serta diperiksa oleh polisi, petugas bea-cukai, FSB, majelis regional atau republik, kepala *charter courts* dan *supreme courts*. Sebelum dicalonkan oleh presiden, seorang calon harus melewati penyeleksian oleh Gubernur Jenderal di distrik federal, kemudian terakhir seleksi dilakukan oleh Kremlin melalui suatu komisi khusus. Komisi khusus ini berisi 17 orang anggota yang didominasi oleh kekuatan konservatif dan merupakan pejabat penegak hukum dan anggota badan pertahanan. Dengan adanya komisi khusus ini menyulitkan calon yang berasal dari independen atau perwakilan dari kelompok oposisi. Fenomena ini menjadi menarik karena pemerintah yang mengendalikan kekuasaan yudisial. Yudisial sulit untuk independen terhadap legislatif apalagi eksekutif. Salah satu karakteristik demokrasi adalah terdapat pemisahan kekuasaan seperti lembaga legislatif mengontrol terhadap eksekutif, dan yudisial independen terhadap eksekutif dan legislatif, fenomena ini tidak terjadi di Rusia.

Dalam sistem ini pula, Putin memiliki pengaturan dan kontrol terhadap aset-aset negara yang memegang hajat hidup masyarakat banyak. Hal tersebut

terwujud dalam pemilik dari aset-aset tersebut merupakan “orang-orang di sekitar” Putin yang juga terlibat dalam pemerintahan.

Pilar lain dari transisi demokrasi adalah aturan hukum (*rule of law*). Aturan hukum yang dilihat pada masalah ini adalah aturan pemilihan umum dan partai politik. Aturan ini dinilai tidak adil bagi partai politik kecil dan terutama bagi partai politik oposisi pemerintahan Vladimir Putin.

Aturan mengenai partai politik yang pertama adalah pembiayaan partai politik. Pembiayaan partai oleh negara memicu berbagai kontroversi. Hal ini memunculkan ancaman mengenai independensi partai, yang juga berdampak pada semakin tidak populernya pemilihan umum. Terdapat dua perbedaan sikap yang diberikan oleh partai-partai non pemerintah. Bagi partai non-pemerintah seperti Partai Komunis Rusia, pembiayaan partai oleh negara tidak dapat dihindarkan. Menurut Gennadii Zyuganov, Ketua Partai Komunis Rusia, negara membiayai partai agar partai terbebas dari kepentingan sponsor kaya yang pendapat mengontrol partai tersebut, selain itu pembiayaan dari negara membuat mereka terbebas dari kepentingan kelompok *oligarchs*. Pada akhirnya pasca-Pemilihan Duma tahun 2003, masalah pembiayaan partai diformulasikan dengan memberikan kebebasan bagi partai untuk tidak menerima pembiayaan dari negara, Partai *Union of Right Forces* (yang memiliki akses lebih banyak ke sponsor swasta dibandingkan dengan partai lain) yang tidak mendukung pembiayaan partai oleh negara menyambut aturan tersebut dengan positif.²⁷⁵

Aturan partai politik lainnya adalah, yang mengatur segala aspek aktivitas partai (*O politicheskikh partiyakh*), bagi partai yang ingin mendaftar harus memiliki anggota minimal 50.000 orang (sebelumnya hanya diatur 10.000 orang, namun diamandemen tahun 2004). Sebagai tambahan, partai politik harus mempunyai cabang di lebih dari setengah daerah di Rusia, di setiap daerah harus memiliki keanggotaan minimal 500 orang, dan cabang-cabang partai di daerah lainnya harus memiliki anggota minimal 250 orang. Seorang anggota harus berumur minimal 18 tahun dan boleh mempunyai keanggotaan di lebih dari satu partai. Partai, sesuai dengan aturan, dapat ikut dalam pemilihan umum dan referendum, mengadakan rapat dan mempropagandakan pandangan mereka.

²⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

Namun pada kenyataannya partai hanyalah suatu badan yang hanya diperbolehkan mengikuti pemilihan umum dengan masing-masing kandidat, dengan juga terdapat calon independen yang berasal dari non-partai. Jika mereka gagal untuk mencapai jumlah suara atau jumlah perwakilan dalam lembaga legislatif sesuai dengan aturan dalam waktu 5 tahun periode (atau dalam 2 kali pemilihan umum), maka mereka akan dibubarkan sesuai dengan instruksi dari Mahkamah Agung.²⁷⁶

Peraturan tahun 2001 juga menjelaskan mengenai sumber-sumber dana yang didapat oleh partai termasuk berasal dari iuran anggota, donasi dan pendapatan dari aktivitas partai, termasuk kegiatan komersil. Sumbangan dari individu dalam satu tahun tidak boleh 10 kali dari upah minimum rata-rata (pada tahun 2006 berarti tidak boleh dari 8.000 Ruble atau sekitar AS\$ 280). Donasi tidak boleh berasal dari negara asing, perusahaan atau warga negara asing, atau dari perusahaan Rusia dengan kepemilikan asing lebih atau sama dengan 30 persen, atau dari organisasi internasional atau lembaga pemerintahan negara asing. Tidak diperbolehkan donasi dalam satu tahun dari satu lembaga yang mencapai 100.000 kali dari upah minimum rata-rata. Peraturan menunjukkan suatu sistem baru dukungan negara bagi partai politik, meskipun dalam skala yang lebih sederhana. Iuran anggota pun dibatasi yaitu 5 Ruble (AS\$ 0,17) dikali dengan jumlah pemilih; calon independen dapat mengklaim tingkat pembayaran yang sama, mereka mendapatkan setidaknya 3 persen dari daftar tingkat nasional, atau jika kandidat memenangkan pada pemilihan presiden. Pembayaran dilakukan pertahun, sesuai dengan Pemilihan Duma, atau sekali pada pemilihan presiden, dan dapat berubah sesuai dengan inflasi.²⁷⁷

Anggota, seperti di banyak tempat lainnya, berperan penting sebagai pendapatan utama dari partai politik. Dalam prakteknya terdapat sejumlah alternatif pendapatan partai politik. Bagi partai politik dengan jumlah anggota yang banyak (seperti Partai Komunis Rusia), iuran yang dibayarkan oleh anggota mempunyai peran yang signifikan bagi pendapatan partai. Pendapatan lain didapatkan dari negara, pada tahun 2006 sebanyak 270 juta Ruble atau sekitar AS\$ 9.5 juta dibagi ke 9 partai dan blok yang telah mencapai batas minimal 3 persen pada Pemilihan Duma tahun 2003. Hal yang lebih kontroversial, partai

²⁷⁶ *Ibid.*,

²⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

dapat secara langsung didukung oleh individu atau badan korporatisme. Aturan partai politik membatasi dukungan individu dan korporatisme dalam negeri, tetapi aturan ini dapat dihindari oleh partai politik, sumber dukungan utama bagi sebagian partai politik tetap berasal korporatisme bekas *oligarch* maupun non-*oligarch*.²⁷⁸

Partai politik, sesuai dengan aturan, harus selalu siap jika diinspeksi oleh pemeriksa pajak negara, dan harus memberikan laporan keuangan setiap tahunnya ke Kementerian Keadilan (sejak tahun 2006) atau ke Komisi Pemilihan Umum. Suatu kejadian menarik ketika Boris Berezovsky, salah satu pemimpin *oligarch*, muncul untuk mendukung salah satu partai; tetapi Kremlin memaksa agar perusahaan yang dimiliki oleh Berezovsky, *Interros* dan *Yukos*, tidak mendukung atau menyumbang sejumlah dana ke salah satu partai karena ditakutkan akan membuat partai tersebut tergantung pada Berezovsky. Beberapa eksekutif Yukos kemudian ikut dalam daftar calon anggota legislatif federal untuk Partai Komunis Rusia pada Pemilihan Duma tahun 2007. Namun, seperti partai lain, penempatan anggota legislatif federal hanya akan diberikan jika kontribusi dana yang besar dapat diberikan kepada partai.²⁷⁹

Bila melihat pada karakteristik demokrasi menurut Ball dan Peters, seperti: terdapat lebih dari satu partai politik yang berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan politik, adanya kompetisi perebutan kekuasaan terbuka, tidak tertutup, dan berdasarkan pada prosedur yang telah ada dan telah diterima, termasuk pemilihan umum, serta rekrutmen posisi dalam kekuasaan politik relatif terbuka. Maka fenomena di Rusia sulit untuk terjadi. Memang pada masa pemerintahan Putin, terdapat lebih dari 1 partai, namun kompetisi dalam memperebutkan kekuasaan politik tidaklah terbuka dan adil. Terdapat berbagai pembatasan yang membuat partai politik oposisi sulit untuk menghadapi partai pro-Putin, United Russia. Pembatasan tersebut dimulai dari media, tidak banyak media yang meliput atau memberitakan berbagai kegiatan ataupun pendapat dari partai oposisi. Seperti pada pemilihan Duma tahun 2003, mayoritas stasiun televisi terutama Channel 1 yang dapat menjangkau 95% populasi Rusia, memberitakan mengenai Partai United Russia dan Vladimir Putin.

²⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

²⁷⁹ Rose dan Munro, *Op. cit.*, hlm. 133.

Selain itu pembatasan juga terjadi pada aturan-aturan partai politik. Jumlah minimal anggota partai menyulitkan partai oposisi atau partai kecil. Aturan mengenai pendanaan partai juga menyulitkan partai-partai oposisi dan kecil. Rekrutmen untuk posisi politik pun juga telah diubah. Gubernur atau kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat, tetapi sepenuhnya dipilih oleh Presiden. Sama halnya dengan anggota Dewan Federasi (majelis tinggi Rusia), mereka tidak dipilih melalui proses pemilihan umum, tetapi merupakan gubernur yang ditunjuk oleh Presiden. Sehingga legislatif sulit untuk menentang presiden, Partai United Russia mengisi Duma lebih dari 30% pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 60% pada Pemilihan Duma tahun 2007, dan Dewan Federasi direkrut melalui penunjukan oleh presiden.

Dari penjelasan mengenai berbagai fenomena transisi demokrasi dimasa Vladimir Putin, dapat terlihat karakteristik yang hampir sama dengan suatu sistem politik yaitu sistem politik otoritarian. Sistem ini memiliki ciri: pertama; terbatasnya dan tertutupnya kompetisi politik. Fenomena di Rusia kompetisi tidak tertutup namun terbatas, dan cenderung menguntungkan satu atau beberapa partai yang berafiliasi dengan Presiden atau Kremlin. Partai politik lain harus berhadapan dengan pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam aturan partai politik. Selain itu, karakteristik sistem otoritarian selanjutnya adalah kekerasan oleh negara. Kekerasan oleh negara terjadi pada sejumlah jurnalis media massa yang kritis terhadap berbagai kebijakan yang dibuat oleh Vladimir Putin. Contohnya adalah pembunuhan terhadap wartawan yang sedang meliput mengenai kondisi di Chechnya dan beberapa kasus lain yang melibatkan jurnalis independen. Rendahnya dukungan terhadap kebebasan sipil juga diterapkan oleh negara. Stasiun televisi terutama dari kelompok oposisi tidak lagi dapat menyuarakan pendapatnya, karena stasiun televisi ini telah dikuasai oleh negara atau dimiliki oleh perusahaan milik negara. Independensi dari lembaga yudisial juga rendah di Rusia. Hal ini disebabkan karena Hakim-Hakim Agung dipilih dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga sulit bagi lembaga yudisial untuk tetap independen. Peran yang besar dari elit tradisional masih tetap ada di Rusia. Elit tradisional terdiri atas sekelompok bekas anggota KGB (FSB)/ Biro Intelijen Rusia yang merupakan kelompok dekat Vladimir Putin.

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Kemenangan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007 menunjukkan bahwa dukungan dari pemimpin politik melalui kebijakan-kebijakannya dapat berpengaruh pada kemampuan partai untuk berkembang. Partai United Russia menjadi suatu partai dengan sedikit independensi politik, yaitu merepresentasikan kepentingan dari elit politik, dan bertugas sebagai kendaraan bagi pendukung setia dalam legislatif nasional, dan memberikan dukungan administratif.

Rusia pada proses transisi demokrasi menunjukkan bahwa demokrasi liberal tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan di Rusia. Penerapan demokrasi liberal pada masa Boris Yeltsin mengalami kegagalan dan membekas di masyarakat. Munculnya Vladimir Putin sebagai pemimpin baru Rusia, menimbulkan pertanyaan mengenai arah demokratisasi di Rusia. Pemerintahan Vladimir Putin menunjukkan bahwa intitusi demokrasi dapat menjadi penutup wajah (topeng) kekuasaan otoritarian di sebuah negara. Rusia telah menjadi suatu negara otoritarian yang kompetitif pada masa Putin, hal ini berarti aturan demokrasi telah dikombinasikan dengan pemerintahan yang otoriter. Dalam pemerintahan tersebut, kriteria minimum dari demokrasi dilanggar. Hal ini menyebabkan Putin dapat membangun partainya dan melanjutkan proses konsolidasi di Rusia.

Sebagai Presiden Rusia, Vladimir Putin, menerapkan beberapa kebijakan dibuat untuk membangun Partai United Russia dengan tujuan yang lebih luas yaitu kestabilan negara. Kebijakan tersebut diawali dengan reformasi institusi pemerintahan daerah. Kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum, tetapi ditunjuk langsung oleh presiden. Presiden mempunyai kekuasaan yang besar dalam menentukan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan aturan yang dibuat oleh, Presiden bisa memberikan daftar calon gubernur kepada parlemen, parlemen regional bisa tidak menerima calon gubernur yang diajukan presiden, tetapi jika tiga kali tidak diterima oleh parlemen, presiden bisa mengadakan pemilihan umum ulang untuk memilih anggota parlemen regional.

Keadaan ini membuat para politisi mendekat kepada Partai United Russia dan berusaha untuk menjadi loyalis partai Pro-Kremlin ini. Tidak hanya dalam penentuan gubernur (Kepala Daerah), anggota yudikatif terutama Hakim Agung dipilih oleh presiden. Hal ini terbukti pada pertengahan 2007, partai United Russia telah mengontrol mayoritas kepala daerah di 76 dari 86 daerah. Di tahun 2006, 90% kepala daerah di Rusia telah bergabung di Partai United Russia, termasuk 7 walikota dari 10 kota besar di Rusia. Sejak tahun 2005, partai telah melakukan upaya dalam memperluas pengaruhnya pada 24.000 kepala daerah serta legislatif daerah.

Selain itu, sistem patrimonialisme yang diterapkan dalam pengangkatan seorang pegawai negeri sipil atau aparatur negara turut membantu dominasi Partai United Russia. Pola patronase yang dijalankan oleh Putin tidak hanya terbatas pada jabatan politik yang berfungsi untuk melayani keinginan dari pimpinan pusat, biasanya anggota staf senior atau kader utama dalam inti eksekutif. Pejabat terpilih, pegawai negeri permanen, dan pimpinan bisnis serta organisasi non-pemerintah menjadi sasaran dari kelompok patronase untuk dipengaruhi.

Di Rusia, lebih dari 600 pejabat baru berada pada tingkat pusat (Moscow) untuk jabatan-jabatan staf khusus kepresidenan. Misalnya dibutuhkan seorang figur yang dapat memimpin banyak personel dari berbagai subdivisi lembaga kepresidenan seperti kepala kementerian federal, deputy kementerian –terkadang pada sepuluh kementerian- yang disebut kementerian presiden seperti kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, kementerian kehakiman, dan FSB. Selain itu juga hampir 100 anggota Hakim Agung dan 19 anggota Hakim Mahkamah Konstitusi harus disetujui *Federation Council*. Sejumlah personel tentara nasional secara formal atau informal dipilih oleh presiden. Jumlah ini semakin bertambah dengan tambahan anggota dari daerah dan republik, mulai dari gubernur jenderal dan deputy-deputy pertama di tujuh distrik federal, setiap deputy tersebut memiliki staf minimal 150 orang, hingga lebih dari 18.000 hakim dalam peradilan komersial, militer, dan umum di seluruh negara.

Selain itu, dengan melakukan perubahan sistem pemilihan umum dan aturan partai politik, Putin membantu kemenangan partai United Russia. Pada pemilihan umum tahun 2003, sistem pemilihan umum yang digunakan oleh Rusia

adalah Sistem paralel campuran (*the parallel mixed system*). Sistem pemilihan umum tersebut berubah menjadi sistem proporsional dengan *parliamentary threshold* sebesar 7%. Perubahan ini membawa dampak besar bagi partai-partai kecil, karena semakin kecil kemungkinan mereka untuk dapat mendudukkan wakilnya di parlemen. Perubahan lain termasuk perubahan aturan partai politik. Perubahan aturan tersebut termasuk jumlah anggota dan pendanaan partai. Jumlah anggota partai politik harus memenuhi syarat minimal 50.000 orang. Sedangkan sumber pendanaan partai diberikan syarat minimal 500.000 Ruble per bulan untuk dana operasional partai politik.

Aturan ini menyulitkan partai minoritas dan oposisi. Partai-partai kecil terutama partai oposisi sulit untuk memenuhi berbagai persyaratan yang terdapat dalam aturan terbaru. Aturan pendanaan 500.000 Ruble perbulan tentunya menyulitkan bagi partai-partai kecil. Apalagi jika pendanaan partai hanya berasal iuran anggota partai. Hal lain yang menyulitkan adalah syarat minimal jumlah anggota partai sebesar 50.000 orang. Bagi partai-partai kecil sulit untuk melakukan perekrutan anggota partai. Kesulitan dalam mendapatkan anggota partai berakibat pada jumlah iuran yang masuk ke dalam anggaran partai.

Perubahan undang-undang sistem pemilihan umum juga menyulitkan bagi partai politik kecil dan oposisi untuk memasukkan anggotanya ke dalam majelis rendah/ Duma. Hingga tahun 2003, sistem pemilihan umum di Rusia masih sistem campuran, hal ini berarti Rusia menggunakan dua sistem pemilihan umum yaitu sistem pemilihan umum mayoritarian dan sistem pemilihan umum proporsional dengan ambang batas parlemen 5%. Dengan menggunakan sistem pemilihan umum mayoritarian masih memungkinkan partai-partai kecil untuk memasukkan anggotanya dalam majelis rendah. Namun semenjak perubahan tahun 2005, Rusia hanya menggunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan ambang batas parlemen 7%. Ambang batas 7% tentunya menyulitkan partai politik kecil untuk menaruh wakil-wakilnya di parlemen.

Setelah membuat melakukan reformasi pada institusi pemerintahan daerah dan melakukan perubahan pada undang-undang sistem pemilihan umum serta aturan partai politik, kemudian Putin melakukan pembatasan terhadap media dan melakukan pemanfaatan media. Media merupakan sarana komunikasi yang

berpengaruh di Rusia. Penggunaan media digunakan sebagai alat propaganda. Media memiliki peran yang penting, baik sebagai media informasi, propaganda, bahkan termasuk kampanye partai politik. Pada saat pemerintahan Vladimir Putin, media televisi berada di bawah kontrol dari pemerintah. Kontrol yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui kepemilikan media yang dikuasi oleh pemerintah Rusia. Sejumlah media elektronik terbesar di Rusia seperti Channel 1, Russia TV, NTV dan Ren TV menunjukkan dukungannya terhadap Partai United Russia dan pemerintah (khususnya Vladimir Putin). Dari temuan yang didapatkan terbukti bahwa pemberitaan media massa terutama media televisi terkait partai United Russia dan Presiden Vladimir Putin pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007 tidak berimbang. Porsi pemberitaan mengenai United Russia dan Presiden Putin jauh lebih besar dibandingkan partai-partai oposisi.

Proses pengambilalihan media oleh pemerintah dikhawatirkan akan menyebabkan akses informasi masyarakat tidakimbang dan cenderung termobilisasi. Beberapa tokoh oposisi (terutama dari kelompok Oligarkh) berusaha melawan namun tindakan Putin dalam menghadapi mereka yaitu dengan menahan dengan tuduhan penggelapan pajak. Salah satu kejadian yaitu pengambilalihan stasiun televisi NTV, salah satu stasiun televisi yang kritis terhadap pemerintahan Putin dan dimiliki oleh Vladimir Gusinsky seorang tokoh *oligarkh*. Ketika Gusinsky tidak mau melepaskan sebagian besar sahamnya di NTV maka pemerintah menuduhnya melakukan penggelapan pajak pada masa Boris Yeltsin. Akhirnya NTV menjadi milik negara dan dipegang oleh perusahaan milik negara Gazprom-Media.

Selain itu, kekerasan terhadap jurnalis Rusia juga semakin sering terjadi terjadi pada masa Putin. Pada tahun 2006 terjadi kasus yang terkenal, saat kejadian pembunuhan terhadap wartawan surat kabar liberal *Novaya Gazeta*, Anna Politkovskaya, yang menulis secara mendalam mengenai perang Chechen. Politkovskaya ditembak di dalam elevator di gedung apartemennya di Moscow ketika ia pulang ke rumah dari berbelanja. Tidak ada tersangka dalam kasus ini. Kekerasan terhadap jurnalis ini merupakan salah satu bagian kecil tekanan pemerintah terhadap media. Aturan-aturan lain juga membatasi jurnalis-jurnalis independen, seperti larangan memberitakan mengenai tokoh-tokoh politik

terutama terkait dengan Kremlin. Ada aturan yang tegas melarang para wartawan menulis berita fitnah tentang para politisi hukumannya berat, dicabutnya izin meliput hingga ditutupnya media yang memberikan izin meliput.

Dengan reformasi institusi pemerintahan, perubahan sistem pemilihan umum, dan pembatasan serta pemanfaatan media oleh pemerintahan Putin, maka kemenangan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003-2007 tidak sulit untuk terjadi. Ketersediaan sumber daya politik serta ekonomi pada partai ini dan ketergantungan elit daerah membuat partai ini akan terus berkembang. Hal ini dapat dibuktikan pada Pemilihan Duma tahun 2011 lalu yang kembali memenangkan Partai United Russia.

7.2 Implikasi Teori

Dari fenomena yang terjadi di Rusia terutama pada masa kepemimpinan Vladimir Putin mempunyai pengaruh terhadap perkembangan teori demokratisasi. Jika merujuk pada tahapan politik demokrasi; menurut Juan J. Linz dan Alfred Stepan ada tiga tahapan: Pertama, tahap otoriter-totaliter yang anti-demokrasi; Kedua, tahap transisi demokrasi; Ketiga, tahap sistem demokrasi yang diperluas dan diperdalam (*widening and deepening democracy system*). Rusia sampai saat ini disebutkan masih berada pada tahap transisi demokrasi. Namun transisi demokrasi di Rusia pada masa Vladimir Putin tidak mengarah ke sistem demokrasi yang diperluas dan diperdalam, tetapi justru mengarah kembali ke sistem otoriter-totaliter yang anti-demokrasi. *Managed Democracy* yang diterapkan oleh Putin dianggap sebagai suatu sistem otoritarian dengan memberikan label demokrasi.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa karakteristik dari klasifikasi pemerintahan yang dibuat oleh Alan Ball dan Guy B. Peters. Menurut kedua penulis, sistem otoritarian memiliki karakteristik (1) Terbatasnya dan tertutupnya kompetisi politik. (2) Peran dari suatu ideologi yang besar. (3) Penggunaan kekerasan oleh negara. (4) Rendahnya dukungan terhadap kebebasan sipil. (5) Rendahnya independensi lembaga yudisial. (6) Peran yang besar dari elit tradisional atau militer yang menentukan arah kebijakan negara.

Diawali pada poin pertama, kompetisi politik di Rusia belum sepenuhnya tertutup tetapi terbatas. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya pemilihan umum yang dilakukan secara gradual (empat tahun sekali). Namun kompetisi politik tersebut terbatas. Bagi partai-partai kecil, sistem pemilihan umum dan aturan partai politik yang ada menyulitkan mereka untuk menaruh wakilnya dalam lembaga legislatif. Lembaga legislatif yang ada juga tidak memberikan partai politik kecil untuk bersaing. Sistem dua kamar yang dianut oleh Rusia, membawa keuntungan bagi partai pendukung pemerintah. Dewan Federasi sebagai majelis tinggi ditunjuk oleh presiden, sedangkan Duma sebagai majelis rendah dikuasai oleh Partai United Russia. Sistem pemilihan umum terus berubah dan puncaknya pada tahun 2005 ketika sistem pemilihan umum diganti menjadi sistem proporsional dengan *parliamentary treshold* sebesar 7%. Sedangkan aturan partai politik semakin menekan partai kecil, misalnya saja syarat minimal anggota 50.000 anggota membatasi partai kecil untuk ikut dalam pemilihan umum. Aturan lain seperti pendanaan partai, syarat minimal tanda tangan, dan tidak diperbolehkan berkoalisi semakin menyulitkan partai kecil. Poin kedua yaitu peran ideologi yang besar dalam hal ini *managed democracy* yang diterapkan oleh Putin. Selain itu, penggunaan kekerasan oleh negara semakin menguat seiring dengan terbunuhnya sejumlah wartawan media independen (liberal) ketika meliput isu-isu terkait pemerintah. Rendahnya dukungan kebebasan sipil terlihat dengan tidak adanya stasiun televisi yang bisa menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya secara bebas. Lembaga yudisial sendiri, semenjak dilakukan reformasi institusi pemerintahan oleh Putin, seorang hakim agung ditunjuk oleh Presiden sehingga sulit menyatakan independensi lembaga yudisial. Peran dari elit tradisional, masih diisi oleh eks biro rahasia Uni Soviet, KGB yang merupakan asal dari Putin. Sejumlah anggota eks KGB masuk dalam kabinet.

Terkait dengan strategi politik yang digunakan oleh Vladimir Putin, sesuai dengan tahapan strategi politik yang diungkapkan oleh Hanspeter Kriesi, Laurent Bernhard, Regula Hänggli. Tahapan strategi politik yang pertama adalah konteks atau kondisi, beberapa aspek dari tahapan ini adalah institusi dan aturan-aturan yang terkait, Vladimir Putin pada tahap awal melakukan beberapa perubahan-

perubahan dalam reformasi institusi pemerintahan daerah, undang-undang sistem pemilihan umum dan aturan partai politik.

Setelah mengubah beberapa aturan tersebut, kemudian Putin melakukan tahapan selanjutnya yaitu melakukan formasi dan koalisi. Formasi dan koalisi terkait dengan aktor-aktor politik. Dengan perubahan institusi pemerintahan daerah, seorang politisi tidak bisa tidak masuk ke United Russia jika ia mau meningkatkan atau mempertahankan posisi politik. Pada tahun 2007, hampir 80% dari kepala daerah di Rusia yang masuk ke Partai United Russia. Selain itu, formasi aktor diperkuat dengan birokrasi yang termasuk di dalamnya pegawai negeri sipil. Dengan menerapkan kembali sistem *nomenklatura* yang berganti nama dengan sistem daftar kader cadangan, terjadi suatu pola patrimonial.

Setelah aktor-aktor bergabung, tahap selanjutnya adalah mobilisasi melalui media massa. Mobilisasi dilakukan dengan menaruh aktor-aktor United Russia dalam media massa nasional. Misalnya saja setelah diambil alih oleh Putin, NTV diberikan kepada salah satu perusahaan milik negara Gazprom-Media. Penguasaan media penting untuk membatasi informasi dari pihak oposisi dan sebagai alat mobilisasi massa. Dampak dari semua tahapan ini adalah kemenangan Partai United Russia pada Pemilihan Duma tahun 2003 dan 2007. Mobilisasi ini terkait dengan konsep Katz dan Mair yang memandang faktor yang krusial terkait dukungan negara dengan partai yaitu peningkatan penggunaan media elektronik dalam kampanye, biasanya diatur oleh aturan yang dibuat oleh negara. Negara dalam hal ini pemerintah Putin mempunyai kuasa dalam mengatur dan mengontrol media elektronik.

EPILOG

Demokratisasi di negara-negara eks-otoritarian memiliki berbagai pola. Ada beberapa pola kepemimpinan yang mirip antara *Managed Democracy* Vladimir Putin dengan Demokratisasi Terpimpin Soekarno. Karakteristik dari demokrasi terpimpin lebih menekankan kepada upaya presiden untuk menguasai segala aspek dalam pemerintahan. Sistem ini dipengaruhi oleh komunisme dan menilai demokrasi barat tidak bekerja dengan baik. Dalam demokrasi terpimpin, kewenangan presiden baru diatur dalam dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, sehingga tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Presiden melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan membubarkan Dewan Konstituante dan membentuk dewan perwakilan baru, dengan keanggotaan yang ditentukan oleh presiden. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat terlihat bahwa dalam demokrasi terpimpin, presiden mengatur segala aspek dan lembaga-lembaga lainnya sedangkan dalam *managed democracy*, hubungan antar lembaga dalam pemerintahan telah diatur dalam Konstitusi Rusia.

Sedangkan pada masa Demokrasi Pancasila Suharto, terdapat juga pola yang mirip dengan *Managed Democracy* Putin. Pada masa Demokrasi Pancasila Suharto terdapat partai Golongan Karya yang diuntungkan dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Presiden Suharto. Fusi partai politik pada tahun 1973 menguntungkan Partai Golkar, selain itu sumber daya yang berasal dari ABRI, institusi daerah, intelijen, membuat partai ini selalu memenangkan pemilihan umum hingga tahun 1997. Sedangkan Partai United Russia Putin memiliki kemiripan. Partai ini memperoleh berbagai fasilitas yang disediakan untuk berkembang. Partai ini memperoleh sumber daya yang berasal dari institusi daerah, eks-KGB.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkatiri, Zeffry. 2007. *Transisi Demokrasi di Negara Federasi Rusia: Analisa Perlindungan HAM 1991-2000*. Depok: Fakultas Ilmu Budaya UI.
- Aslund, Andres. 2007. *Russia's Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed*. Washington DC: Peterson Institute of International Economics.
- Ascher, Abraham. 2002. *Russia: A Short Story*. Oxford: OneWorld Publication.
- Ball, Alan. R. dan B. Guy Peters. 2000. *Modern Politics and Government: Sixth Edition*. London: Macmillan Press Ltd.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Brundy, Yizhak, Jonathan Frankel, Stefani Hoffman (ed.). 2004. *Restructuring Post-Communist Russia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Colomer, Josep (ed.). 2004. *Handbook of Electoral System Choice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Colton, Timothy J. dan Michael Mc Faul. 2003. *Popular Choice and Managed Democracy: The Russian Elections of 1999 and 2000*. Washington D.C: The Brooking Institution.
- Derleth, J. William. 2000. *The Transition in Central and East European Politics*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Faharurodji, A. 2005. *Russia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fish, M. Steven. 2005. *Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fischer, Sabine (ed.). 2012. *Russia Insight from a Changing Country*. Paris: Institute for Security Studies.
- Fortescue, Stephen (ed.). 2010. *Russian Politics from Lenin to Putin*. New York: Palgrave Macmillan.
- Gallagher, Michael dan Paul Mitchell (ed.). *The Politics of Electoral System*. Oxford: Oxford University Press.

- Gill, Graeme. 2008. *Bourgeoise, State, and Democracy: Russia, Britain, France, Germany and the USA*. Oxford: Oxford University Press.
- Goldman, Marshall I. 2003. *The Piratization of Russia: Russian Reform Goes Awry*. London: Routledge.
- Gorbachev, Mikhail. 2000. *Gorbachev: On My Country and the World*. New York: Columbia University Press.
- Gunther, Richard, Jose-Ramon Montero, dan Juan J. Linz (ed.). 2002. *Political Parties: Old Concept and New Challenges*. Oxford: Oxford University Press.
- Hale, Henry E. 2006. *Why not Parties in Russia? Democracy, Federalism, and the State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huntington, Samuel P. 2001. *Gelombang Demokratisasi Ketiga (terj.)*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Hutcheson, Derek S. 2003. *Political Parties in the Russia Regions*. London: RoutledgeCurzon.
- Kotz, David M. dan Fred Weir. 2007. *Russia's Path From Gorbachev to Putin: The Demise of Soviet System and The New Russia*. New York: Routledge.
- Kunkler, Eileen Marie. 2010. *The Political Club of United Russia: The Incubator of Ideology or Internal Dissent, Tesis*. Ohio: The Ohio State University.
- Lewis, Paul G. 2000. *Political Parties in Post-Communist Eastern Europe*. London: Routledge.
- Linz, Juan Jose dan Alfred Stephan. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- Lynch, Allen C. 2005. *How Russia Is Not Ruled*. New York: Cambridge University Press.
- McCormick, John. 2004. *Comparative Politics in Transition*. Canada: Wadsworth.
- Murrell, G.D.G. 1997. *Russia's Transition Democracy: An Internal Political History, 1989-1996*. Brighton: Sussex Academic Press.
- Neuwman, W. Laurence. 2003. *Social Research Methode: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th ed*. Boston: Allyn and Bacon.

- Oates, Sarah, Lynda Lee Kaid, dan Mike Berry. 2010. *Terrorism, Elections, and Democracy: Political Campaign in the United States, Great Britain, and Russia*. New York: Palgrave Macmillan.
- O'Donnell, Guillermo. et. al (ed.). 1993. *Transisi Menuju Demokrasi (terj.)*. Jakarta: LP3ES.
- Pirani, Simon. 2010. *Change in Putin's Russia: Power, Money, and People*. New York: Pluto Press.
- Pravda, Alex (ed.). 2005. *Leading Russia: Putin In Perspective, Essays in Honour of Archie Brown*. New York: Oxford University Press.
- Rose, Richard dan Neil Munro. 2002. *Elections without Order: Russia's Challenge to Vladimir Putin*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ross, Cameron. 2009. *Local Politics and Demoratization in Russia*. London: Routledge.
- Ritchie, Jane dan Jane Lewis. 2003. *Qualitative Research A Guide for Social Students and Researchers*. London: Sage Publications.
- Sakwa, Richard. 2004. *Putin: Russia's Choice*. New York: Routledge.
- Saragih, Simon. 2008. *Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Shlapentokh, Vladimir dan Joshua Woods. 2007. *Contemporary Russia as a Feudal Society: A New Perspective on the Post-Soviet Era*. New York: Palgrave Macmillan.
- Smyth, Regina. 2006. *Candidate Strategies and Electoral Competition in the Russian Federation: Democracy without Freedom*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Steen, Anton. 2003. *Political Elites and the New Russia: The Power Basis of Yeltsin's and Putin's Regimes*. London: RoutledgeCurzon.
- Steen, Anton dan Vladimir Gel'man (ed.). 2003. *Elites and Democratic Development in Russia*. London: Routledge.
- Taylor, Brian D. 2011. *State Building in Putin's Russia: Policing and Coercion after Communism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thompson, John M. 2009. *Russia and the Soviet Union: An Historical Introduction from the Kievan State to the Present*. Boulder: Westview Press.

- Tatom, David (ed.). 2004. *Comparative Politics in Transition: Fourth Edition*. Canada: Thomson Wadsworth.
- Ware, Alan. 1996. *Political Parties and Party Systems*. Oxford: Oxford University Press.
- Wegren, Stephen K. dan Dale R. Herspring (ed.). 2010. *After Putin's Russia: Past Imperfect Future Uncertain*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- White, Stephen, Alex Pravda, dan Zvi Gitelman (ed.). 1997. *Development in Russian Politics*. Dunham: Duke University Press.
- _____. 2008. *Politics and the Ruling Group in Putin's Russia*. New York: Palgrave Macmillan.
- _____. 2007. *Party Politics in New Democracies*. Oxford: Oxford University Press.

Jurnal

- Hale, Henry E. "The Origins of United Russia and The Putin's Presidency: The Role of Contingency in Party System Development" dalam Jurnal *Demokratizatsiya*, Vol. 12, No. 2, Spring 2004.
- Lavelle, Peter. "What Does Putin Want?" dalam Jurnal *Current History*, Vol. 103, No. 675, Oktober 2004
- McFaul, Michael. "The Perils of of Protacted Transition" yang bersumber dari *Journal of Democracy*, Volume 10, No. 2, 1999.
- Reuter, Ora John dan Thomas F. Remington. "Dominant Party Regimes and the Commitment Problem: The Case of United Russia" dalam Jurnal *Comparative Politics Studies*, Volume 42, Number 4, April 2009.
- Reuter, Ora John. "United Russia and 2011 Elections" dalam Jurnal *Russian Analytical Digest*, No. 102, 26 September 2011.
- Riggs, Jonathan dan Peter Schraeder. "Russia's Political Party System as a (Continued) Impediment to Democratization: The 2003 and 2004 Presidential Elections in Perspective," dalam Jurnal *Demokratizatsiya* Vol. 13, No. 1, Winter 2005.

- Sakwa, Richard. "The 2003-2004 Russian Elections and Prospect for Democracy" dalam Jurnal *Europe-Asia Studies*, Vol. 57, No. 3, May 2005.
- White, David. "Victims of Managed Democracy? Explaining the Electoral Declined of The Yabloko Party" dalam Jurnal *Demokratisasi*, Vol. 15 Number 2 (Spring 2007).
- White, Stephen. "The Duma Election in Russia" dalam Jurnal *Electoral Studies*, Vol. 2, No. 1, Desember 2007.
- _____. "The Duma Election in Russia, December 2007" dalam Jurnal *Electoral Studies*, Vol. 28, No. 1, Mei 2009.

Sumber Internet

- Gel'man, Vladimir. "United Russia Ruling Party or Emperor's New Clothes" yang bersumber dari situs http://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/ponars/pm_0255.pdf
- Gayner, Jeffrey B. "The Retreat from Reform in Russia" yang bersumber dari situs <http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/12678.pdf>
- Hale, Henry E. dan Timothy J. Colton, "Russian and the Putin-Medvedev "Tandemocracy": a Survey-Based Potrait of the 2007-2008 Election Season" yang bersumber dari situs http://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2009_823-03_2_Hale.pdf
- Kriesi, Hanspeter, Laurent Bernhard, Regula Hänggli, "Political Strategies in Direct-Democratic Campaigns" yang bersumber dari situs <http://www.nccr-democracy.uzh.ch/publications/workingpaper/pdf/WP8.pdf>
- Marshall, Seth R. "The Peculiarity of Russian Politics: an Authoritarianism, Civic Culture, and the Issue of Election Falsification" yang bersumber dari situs http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/16154/Marshall_Seth.pdf
- Petrov, Nikolai dan Michael McFaul, "The Essence of Putin's Managed Democracy" bersumber dari <http://www.carnegieendowment.org/events/index.cfm?fa=eventDetail&id=819>

- Sordi, Adele del. "Parties, Media Control, and Power in Post Soviet Russia and Kazakhstan", bersumber dari situs
<http://www.ecprnet.eu/databases/conferences/papers/884.pdf>
- Sell, Daniel James. "Vladimir Vladimirovich Putin's United Russia: The How and Why of Russia's New Party of Power" yang bersumber dari situs
<http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Sell%20Daniel%20James.pdf?osu1226594286>
- Rasmussen, Simon Kruse. "Russia's Dependent Media: The Rise and Fall of Trustee Journalism" yang bersumber dari situs www.simonkruse.dk/trustee.pdf
- Shmykova, Ekaterina. "Effects of Mass Media Ownership on Serving Public Interest" yang bersumber dari situs http://web.mit.edu/comm-forum/mit5/papers/Ekaterina_Shmykova.pdf
- Simon, Rick. "Media, Myth and Reality in Russia State-Managed Democracy" yang bersumber dari situs <http://www.clas.ufl.edu/users/bmoraski/Simon-Media04.pdf>
- Warner, Tara "NTV Takes Center Stage as Final Episodes Unfold" yang bersumber dari
http://russiajournal.com/archive/The_Russia_Journal/2001/April/06.04.2001/Analysis/Apr.06-04.pdf
- Wangborg, Emy. "Russian Media and Democracy under Putin" yang bersumber dari situs http://www.sras.org/russian_media_and_democracy_under_putin
- Warsilah, Henny. "Gerakan Prodemokrasi dan Transformasi Sosial menuju Masyarakat Demokratis" yang bersumber dari situs
<http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/6474/6475.pdf>
- White, Stephen, Ian McAllister, dan Sarah Oates. "Media Effects and Russian Election, 1999-2000" yang bersumber dari situs
<http://politicsir.cass.anu.edu.au/staff/mcallister/pubs/RussiaTV.pdf>
- Norwegian Helsinki Committee, "Freedom of Expression in Russia (2011)" yang bersumber dari situs
http://www.nhc.no/filestore/Dokumenter/Ytringsfrihet_2011/Rusland/FreedomofexpressioninRussiashort.pdf

“Vladimir Putin Penyelamat Rusia keluar Dari Krisis”,

www.antara.co.id/arc/2006/II/28/vladimir-putin-penyelamat-rusia-keluar-dari-krisis/-19k-

“Putin : Delapan Tahun Masa Tugasnya”, diakses dari <http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3151203,00.html>

Koran:

“Pemilu Rusia dan Para Kandidat”, Harian Umum *Kompas*, Minggu, 26 Maret 2000, hlm.1.

Majalah:

Adelaja, Tai. “Coming in Age in New Age” *Russia Profile*, Fall 2011: 26.

